



LAPORAN

PELAKSANAAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

2021



KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2021.

TKPKD Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan kegiatan koordinasi dalam rangka percepatan program penanggulangan kemiskinan tahun 2021 yang hasilnya dapat dimanifestasikan dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021.

Laporan ini menjelaskan tentang pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kutai Timur yang didalamnya menguraikan kelembagaan penanggulangan kemiskinan; capaian kinerja penanggulangan kemiskinan; dan rencana tindak lanjut penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan.

Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi acuan dalam perumusan kebijakan dan program-program yang dapat menjamin percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur.

Sangatta, Agustus 2022

WAKIL BUPATI KUTAI TIMUR

Selaku

KETUA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	8
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	11
1.3.1 Maksud	11
1.3.2 Tujuan	11
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	12
BAB II KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.....	14
2.1. KELEMBAGAAN TKPK.....	14
2.2. KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	17
2.3. PENGENDALIAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	18
2.3.1. Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan	18
2.3.2. Penanganan Pengaduan Masyarakat.....	19
BAB III CAPAIAN KINERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN.....	25
3.1. KONDISI UMUM DAERAH.....	25
3.2. CAPAIAN INDIKATOR SASARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	28
3.3. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR MAKRO PENANGGULANGAN KEMISKINAN.....	36
3.3.1. Dimensi Ekonomi dan Ketenagakerjaan	36
3.3.2 Dimensi Ketenagakerjaan.....	53
3.3.3. Dimensi Pendidikan	57
3.3.4 Dimensi Kesehatan	65
3.3.6 Dimensi Ketahanan Pangan.....	75
3.4. PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN	81
3.5. CAPAIAN KINERJA TAHUNAN	106
3.5.1 Pendidikan.....	106



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

3.5.2 Kesehatan	109
3.5.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	112
3.5.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	116
3.5.6.Sosial	119
3.5.6. Tenaga Kerja	121
3.5.7. Pangan.....	124
3.5.8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	126
3.5.9.Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	129
3.5.10. Kelautan dan Perikanan	131
3.5.11. Pertanian.....	133
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT	138
4.1. RENCANA TINDAK LANJUT PENANGGULANGAN KEMISKINAN	138
4.2.1 Bidang Ketenagakerjaan.....	138
4.2.2 Bidang Pendidikan.....	139
4.2.3 Bidang Kesehatan	139
4.2.4 Bidang Infrastruktur Dasar	140
4.2.5 Bidang Ketahanan Pangan	141
4.2.6 Bidang Sosial	141
BAB V PENUTUP.....	143
5.1. KESIMPULAN	143



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Analisis Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2021	37
Grafik 2.	Analisis Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Jumlah Individu Di Kabupaten Kutai Timur Hasil DTKS Tahun 2021	38
Grafik 3.	Analisis Relevansi Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Kutai Timur Terhadap Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2015-2021	40
Grafik 4.	Analisis Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2021	41
Grafik 5.	Analisis Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kutai Timur Terhadap Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 - 2021	42
Grafik 6.	Analisis Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kutai Timur Terhadap Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 - 2021	43
Grafik 7.	Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kutai Timur Terhadap Kabupaten/Kota Lain di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2021	44
Grafik 8.	Analisis Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kutai Timur Terhadap Kabupaten/Kota Lain di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2021	45
Grafik 9.	Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kutai Timur Terhadap Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2015 - 2021	46
Grafik 10.	Analisis Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kutai Timur Terhadap Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2015-2021	47
Grafik 11.	Analisis Perkembangan Antar Waktu Indeks Gini Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2021	48
Grafik 12.	Analisis Relevansi Indeks Gini Kabupaten Kutai Timur Terhadap Kabupaten/Kota lain di Kalimantan Timur Tahun 2018-2021	49
Grafik 13.	Analisis Relevansi Indeks Gini Kabupaten Kutai Timur Terhadap Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2018-2021	50
Grafik 14.	Analisis Perkembangan Antar Waktu Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2021	52
Grafik 15.	Analisis Relevansi Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Kabupaten Kutai Timur Terhadap Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur Tahun 2015-2021	52
Grafik 16.	Analisis Relevansi Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Kabupaten Kutai Timur Terhadap Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2015-2021 ..	53



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Grafik 17. Analisis Perkembangan Antar Waktu Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2021	54
Grafik 18. Analisis Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.....	55
Grafik 19. Analisis Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kutai Timur terhadap Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2017-2021	56
Grafik 20. Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2021	57
Grafik 21. Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Kutai Timur terhadap Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2014-2021	58
Grafik 22. Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014-2021.....	59
Grafik 23. Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS Kabupaten Kutai Timur terhadap Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2014-2021...	60
Grafik 24. Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014-2021	61
Grafik 25. Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Kutai Timur terhadap Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2014-2021	62
Grafik 26. Analisis Perkembangan Antar Waktu Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014-2021	63
Grafik 27. Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Kutai Timur terhadap Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2014-2021...	64
Grafik 28. Analisis Perkembangan Antar Waktu Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2021.....	65
Grafik 29. Analisis Relevansi Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kutai Timur terhadap Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2017-2021	67
Grafik 30. Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Bayi (Per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	68
Grafik 31. Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2020.....	69
Grafik 32. Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019-2020.....	71
Grafik 33. Analisis Perkembangan Antar Waktu Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2021 .	73
Grafik 34. Analisis Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak di Kabupaten Kutai Timur dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021	75
Grafik 35. Analisis Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama di Kabupaten Kutai Timur dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021	75



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Grafik 36. Perkembangan Harga Beras (Rp/Kg) Bulanan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021	76
Grafik 37. Perkembangan Harga Beras (Rp/Kg) Bulanan di Kabupaten se Kalimantan Timur Tahun 2021	77
Grafik 38. Perkembangan Harga Minyak Goreng Kemasan (Rp/liter) Bulanan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021	78
Grafik 39. Perkembangan Harga Minyak Goreng Kemasan (Rp/liter) Bulanan di Kabupaten se Kalimantan Timur Tahun 2021	79
Grafik 40. Perkembangan Harga Cabe Merah Besar (Rp/kg) Bulanan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021	80
Grafik 41. Perkembangan Harga Cabe Merah Besar (Rp/kg) Bulanan di Kabupaten se Kalimantan Timur Tahun 2021	80
Grafik 42. Rekapitulasi Output Sambungan Rumah Penerima Manfaat Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 - 2021	91



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Capaian Indikator Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021	28
Tabel 2.	Capaian Kinerja Indikator Makro Penanggulangan Kemiskinan	36
Tabel 3.	Jumlah Kepala Keluarga yang Terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 – 2021.....	38
Tabel 4.	Jumlah Individu yang Terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021	38
Tabel 5.	Analisis Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur	39
Tabel 6.	Analisis Posisi Relatif Indeks Gini Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2018-2021	49
Tabel 7.	Perkembangan nilai APK, APM, dan APTs (SD, SMP) di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2021.....	64
Tabel 8.	Analisis Angka Prevalensi Balita Stunting Per Puskesmas di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020.....	70
Tabel 9.	Perkembangan Indikator Kesehatan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2021	72
Tabel 10.	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/ Bersama Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2021	74
Tabel 11.	Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021	81
Tabel 12.	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Per Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur , Tahun 2021	87
Tabel 13.	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Per Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016 - 2021	88
Tabel 14.	Rekapitulasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Kabupaten Kutai Timur Bagi Penerima Manfaat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2020 – 2021	92
Tabel 15.	Jumlah Penerima Manfaat Program Konversi Alam dan Budaya dari PT. KPC Tahun 2021	103
Tabel 16.	Besaran Anggaran Program Konversi Alam dan Budaya dari PT. KPC Tahun 2021	104
Tabel 17.	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar Pendidikan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021	108



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Tabel 18. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2021.....	111
Tabel 19. Capaian Kinerja Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2021.....	112
Tabel 20. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	115
Tabel 21. Indikator Kinerja Program Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021	116
Tabel 22. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	117
Tabel 23. Indikator Kinerja Program Berkaitan Pelayanan Dasar Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021	119
Tabel 24. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar Sosial.....	120
Tabel 25. Capaian Kinerja Sosial di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2021	121
Tabel 26. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja...	123
Tabel 27. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021	124
Tabel 28. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pangan	125
Tabel 29. Capaian Kegiatan Program Pangan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2021	126
Tabel 30. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021	128
Tabel 32. Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	130
Tabel 33. Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2021	131
Tabel 34. Pelaksanaan Urusan Pilihan – Kelautan dan Perikanan	132
Tabel 35. Indikator Kinerja Urusan Pilihan – Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2021	133
Tabel 36. Pelaksanaan Urusan Pilihan – Pertanian	135



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kabupaten Kutai Timur.....	25
Gambar 2. Kegiatan Pengembangan Tanaman Pangan dan Tanaman Pemusim PT. KPC di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021	94
Gambar 3. Kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal dan UMKM PT. KPC di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021	95
Gambar 4. Kegiatan Pengembangan Komunitas Pembatik PT. KPC di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021.....	96
Gambar 5. Kegiatan Pengembangan UMKM Pangan dan Non Pangan PT. KPC di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021.....	96
Gambar 6. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Vendor Lokal PT. KPC di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021.....	96
Gambar 7. Kegiatan Peningkatan Infrastruktur PT. KPC di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021.....	101
Gambar 8. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Masyarakat PT. KPC di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021	103



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan masalah nasional yang menjadi prioritas pembangunan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Dalam penanggulangan kemiskinan selalu menjadi topik utama dalam setiap perencanaan pembangunan, karena kemiskinan adalah permasalahan utama yang harus dicari cara penyelesaiannya dan ditanggulangi secara sinergis dan sistematis dengan melibatkan semua unsur masyarakat, Pemerintah dan Badan Usaha. Kemiskinan bukan hanya menjadi masalah perseorangan, tetapi merupakan permasalahan semua pihak. Karena kemiskinan berdampak sistemik yang menyangkut segala sisi kehidupan. Sehingga jika tidak segera diatasi, maka permasalahan kemiskinan tersebut akan memperparah permasalahan lain yang juga sedang dalam penyelesaian. Kemiskinan juga merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: pendidikan, kesehatan, faktor ekonomi, lokasi tempat tinggal, gender, lokasi lingkungan dan keterbatasan sumberdaya alam.

Sedemikian pentingnya program kegiatan yang berbasis pada penanggulangan kemiskinan, sehingga Pemerintah menetapkan kebijakan prioritas penanggulangan kemiskinan dalam Pembangunan Nasional yang dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025, yang pelaksanaannya dijabarkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahunan, sedangkan upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa: "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban meningkatkan kesejahteraan rakyat". Hal ini secara implisit berarti penanggulangan kemiskinan harus diupayakan demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Hasil pembangunan hendaknya dapat



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

dinikmati secara lebih merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin.

Kemiskinan masih menjadi problem di berbagai negara di dunia, maka “penghilangan kemiskinan dan kelaparan” pada 2030 menjadi “tulang punggung” dari agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Persoalan kemiskinan ditempatkan dalam kerangka multidimensi, yakni melihat kemiskinan dari berbagai dimensi dan memandang penyebab kemiskinan dari berbagai sisi. Dalam *outcome document transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*, tujuan mengakhiri kemiskinan menjadi tujuan “utama” dari 17 tujuan yang disepakati dalam SDGs.

Tujuan pertama dari 17 tujuan SDGs adalah “mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun” (*end poverty in all its forms everywhere*). Tujuan utama tersebut harus menjadi tema pembangunan, agenda utama dan berkelanjutan yang melatari berbagai tujuan pembangunan lainnya seperti infrastruktur, pariwisata, pangan dan energi dan lain-lain. Di dalam RPJPN 2005-2025, masalah kemiskinan dilihat dalam kerangka multidimensi, karenanya kemiskinan bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena menyangkut beberapa hal antara lain: (i) kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin; dan (ii) menyangkut ada/tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan ada/tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Penanganan masalah kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah saja, namun merupakan masalah seluruh pemangku kepentingan yang akan berdayaguna secara efektif jika penanganannya dilakukan lintas sektor dan menjadi tanggung jawab multipihak serta terkoordinasi dengan baik, sehingga ada sinergi dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan.



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan disebutkan bahwa pengertian Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Sedangkan Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Sehingga perlu dilakukan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan baik dengan Pemerintah, dunia usaha/swasta, BUMN/BUMD dan masyarakat.

Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Daerah, maka dibentuklah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelaksanakan tugas dan fungsi TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota dalam melakukan tugas koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah berkoordinasi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebagaimana tertuang dalam pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu : (i) perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial; (ii) peningkatan akses pelayanan dasar; (iii) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan (iv) pembangunan yang inklusif. Mengacu kepada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi : (i) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (ii) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (iii) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil; dan (iv) membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Strategi tersebut dijalankan dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Secara nasional, program penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan menurut basis sasaran (penerima program) dan tujuannya, menjadi :

1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Tujuannya adalah memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin;
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Tujuannya adalah memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

4. Program-program lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Pusat telah menetapkan program perlindungan sosial yang meliputi :

1. Program Simpanan Keluarga Sejahtera, yaitu merupakan kartu keluarga sejahtera untuk penerima program simpanan keluarga sejahtera, penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk bantuan sosial PKH Bantuan Sosial Pangan.
2. Program Indonesia Pintar yaitu Program pemerintah untuk siswa miskin yang melanjutkan sekolah dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah atas, dengan terbitnya Kartu Indonesia Pintar (KIP) pemerintah menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan tunai pendidikan sampai lulus SMA/SMK/MA. KIP juga mencakup anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti anak jalanan, pekerja anak, di panti asuhan, dan difabel. KIP berlaku juga di pesantren, pusat kegiatan belajar masyarakat dan Balai Latihan Kerja (BLK); dan
3. Program Indonesia Sehat yaitu pemerintah menerbitkan Kartu Indonesia Sehat yang di peruntukan bagi masyarakat miskin yang berobat ke puskesmas atau rumah sakit milik pemerintah yang pembayarannya di tanggung oleh pemerintah. Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Penurunan angka kemiskinan tidak lepas dari berbagai program pengentasan kemiskinan baik yang bersifat pusat atau ke-daerahan. Pada periode lalu ada beberapa program yang diaplikasikan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, baik yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Pangan (regular), Bantuan



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Pangan PPKM dan Program PAMSIMAS. Ada juga beberapa program yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui program pemberdayaan ekonomi rakyat dan pemberian bantuan sosial. Bantuan ini disalurkan dalam berbagai bentuk melalui program kegiatan di setiap Perangkat Daerah (PD).

Salah satunya, adalah kegiatan peningkatan kapasitas SDM Program Keluarga Harapan (PKH) dengan alokasi anggaran sebesar Rp132.209.500 yang dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan dalam melaksanakan penanganan kemiskinan di lapangan. Sehingga pelaksanaan PKH dapat tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat.

Pemprov Kaltim juga menambah jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebanyak 109 ribu peserta di 10 kabupaten/kota pada tahun ini. Dana PBI BPJS Kesehatan disalurkan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim.

Program penanganan kemiskinan juga disalurkan dalam berbagai bentuk lain. Di antaranya seperti pemberian beasiswa melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diskdikbud), rehabilitasi rumah tidak layak huni oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera), bantuan usaha ekonomi dari Disperindagkop, dan bantuan latihan kerja dari Dinas Tenaga Kerja.

Selain Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selain tetap meningkatkan sektor pertanian dalam arti luas, kosentrasinya melalui kebijakan kepala daerah yang juga konsen menekan angka kemiskinan di wilayah ini. Salah satunya yakni melalui program Rp 50 juta per-RT. Program yang dijadikan upaya pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Kabupaten Kutim. Salah satu sasarannya adalah peningkatan sumber daya manusia (SDA).

Di Kabupaten Kutai Timur program pengentasan kemiskinan telah berjalan seiring dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah. Upaya



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

yang dilakukan juga tidak terlepas dari prinsip dan strategi penanggulangan kemiskinan nasional yang dipedomani oleh TNP2K. Dalam rangka melaksanakan strategi percepatan penganggulangan kemiskinan, dilaksanakan program penanggulangan kemiskinan bersasaran (targeted program). Program-program penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan menyasarkan langsung kepada mereka yang kelompok masyarakat dan kelompok rentan. Program penanggulangan kemiskinan kepada mereka yang membutuhkan diharapkan akan jauh lebih efektif dalam upaya penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur.

Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 sehingga setiap sektor secara bersama menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas yang dituangkan ke dalam rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah, sehingga berdampak pada alokasi anggaran. Pengukuran keberhasilan RPJMD dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode Tahun 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan akan terus berlangsung dalam proses pembangunan di Kabupaten Kutai Timur 5 (lima) tahun kedepan. Pemerataan pendapatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan diupayakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tersedia sehingga dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Namun dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sudah menunjukkan hasil yang nyata di masyarakat yang ditunjukkan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada sektor sosial dan ekonomi, Kabupaten Kutai Timur turut



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

merasakan dampaknya. Salah satunya adalah meningkatnya angka kemiskinan di Tahun 2021.

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, maka Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 yang menjelaskan perkembangan pelaksanaan dan capaian penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan LP2KD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 dilaksanakan dengan landasan hukum sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara, Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);



- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); k. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
- i. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- j. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- k. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

- l. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
- m. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
- n. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif;
- o. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemuatakhirannya;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

- t. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025;
- v. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021;
- w. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 ini dimaksudkan untuk menjelaskan perkembangan pelaksanaan dan capaian penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan LP2KD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 ini adalah:

- a. Menjelaskan kinerja TKPK Kabupaten Kutai Timur dalam menyelenggarakan tugas koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur.
- b. Menjelaskan pelaksanaan kebijakan (program/kegiatan, anggaran dan regulasi) penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur.



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

- c. Menjelaskan pencapaian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam penanggulangan kemiskinan.
- d. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan dan perencanaan tindak lanjut penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- 2.1. Kelembagaan TKPK
- 2.2. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- 2.3. Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan
 - 2.3.1. Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan
 - 2.3.2. Penanganan Pengaduan Masyarakat

BAB III CAPAIAN KINERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- 3.1. Kondisi Umum Daerah
- 3.2. Capaian Indikator Sasaran Penanggulangan Kemiskinan
- 3.3. Capaian Kinerja Indikator Makro Penanggulangan Kemiskinan
- 3.4. Program Penanggulangan Kemiskinan
- 3.5. Capaian Kinerja Tahunan



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT

4.1. Rencana Tindak Lanjut Penanggulangan Kemiskinan

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.2. Rekomendasi



BAB II

KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2.1. KELEMBAGAAN TKPK

Kebijakan program dan kegiatan yang konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor dengan mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah, sistem hukum dan kelembagaan yang handal serta koordinasi dan kerjasama yang solid antara Kementerian/Lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi berbagai kebijakan. Program dan kegiatan pembangunan sangat diperlukan dalam hal pemecahan masalah kemiskinan di Daerah. Peran pemerintah pusat hingga pemerintah daerah sangat diperlukan dalam penanggulangan kemiskinan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42.

Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Tim koordinasi ini merupakan wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten (TKPK) mempunyai tugas, diantaranya: (1) Melakukan koordinasikan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur; (2) Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur; dan (3) Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kutai Timur.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Kutai Timur berdiri pada tahun 2010 dengan berdasar pada Perpres Nomor 96 Tahun



2015 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Adapun Kelembagaannya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, adapun susunannya adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Wakil Bupati
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
- c. Sekretaris : Kepala Bappeda
- d. Wakil Sekretaris :
 1. Kepala Dinas Sosial
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- e. Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan TKPK Kabupaten diatur dengan SK Bupati dengan memperhatikan Perpres Nomor 96 tahun 2015.

Dengan adanya TKPK dapat bersinergi dalam rangka membantu mengentaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur.

Kemiskinan tidak hanya dilihat dari segi materi, namun juga dapat dilihat dari segi moralitas, yang dapat mempengaruhi perilaku dan karakter warga masyarakat. Hal tersebut yang semakin menambah kompleks masalah kemiskinan, sehingga perlu segera dicarikan solusi terbaik dan penanganan secara optimal oleh semua pihak, mengingat masalah kemiskinan tersebut, bukan merupakan tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi tanggung jawab semua pihak, meliputi pemerintah, swasta dan semua elemen masyarakat.

TKPK Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2015, sebagai salah satu mitra kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat daerah. Sedangkan untuk mengatur mekanisme kerja TKPK daerah, diterbitkan dan diberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun



2010, Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, Kota dan Kabupaten. Adapun maksud dan tujuannya, untuk mengkoordinir seluruh Perangkat Daerah dan lembaga terkait, khususnya yang memiliki program dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan di daerah. Untuk itu, TKPK di daerah harus bisa melaksanakan koordinasi, khususnya dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan, termasuk dalam mengendalikan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten Kutai Timur dibentuk Sekretariat TKPK Kabupaten Kutai Timur yang mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kabupaten Kutai Timur. diantara dukungan tersebut dibentuk berbagai kelompok kerja Pengelola Program yang meliputi:

1. Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga dan Individu :

Kelompok ini mempunyai tugas melaksanakan tugas mengelola data dan program bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga dan Individu dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

2. Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro :

Mempunyai tugas melaksanakan tugas dalam memfasilitasi pengelolaan pemberdayaan masyarakat, pengembangan kemitraan dan penguatan pelaku usaha mikro dalam penanggulangan kemiskinan.

Dengan adanya pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia dan Kabupaten Kutai Timur pada khususnya, sangatlah berdampak sekali terhadap perekonomian masyarakat. Sehingga hal ini salah satu penyebab naiknya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui program dan kegiatan serta bantuan sosial yang menyasar pada masyarakat miskin dan juga termasuk didalamnya adalah kelompok rentan, yang bertujuan membantu meringankan beban ekonomi dan merupakan



upaya untuk memberikan stimulus modal usaha terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Tidak hanya memberikan bantuan sosial saja, melainkan pemerintah Kabupaten Kutai Timur memberikan bantuan lain yang diperlukan masyarakat miskin.

2.2. KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kebijakan penanggulangan kemiskinan pada hakekatnya merupakan kebijakan publik yang berpihak kepada orang miskin (*pro poor policy*). Oleh karena itu kebijakan tersebut harus diterjemahkan dalam pembangunan yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor development*) dan pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada orang miskin (*pro poor growth*). Dalam penanggulangan kemiskinan, pemerintah membuat kelompok-kelompok yang memudahkan memberikan bantuan kepada masyarakat.

Secara operasional arah penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan dalam empat kelompok program yaitu :

- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Dengan adanya pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik;
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, mengembangkan potensi dan kelompok masyarakat miskin yang didasarkan pada pemberdayaan masyarakat; bertujuan untuk memperkuat kapasitas untuk terlibat dalam prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Dengan adanya program ini masyarakat dapat terbantu



dalam mengembangkan usaha bagi pelaku usaha baik mikro maupun kecil; dan

- d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Dalam bentuk program-program dengan pembangunan

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi rumah layak huni, sehingga tidak terlalu membebani masyarakat miskin yang tidak mempunyai biaya untuk membangun tempat tinggal yang layak huni. Selain itu pula pembangunan/perbaikan akses jalan merupakan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan dan menjadikan perekonomian terutama masyarakat miskin menjadi lancar.

2.3. PENGENDALIAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2.3.1. Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan

Tujuan Monitoring dan Evaluasi adalah untuk melihat evaluasi terhadap pencapaian program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Selain itu juga, untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat miskin, pengembangan diversifikasi usaha keluarga miskin, efektivitas program pengembangan ekonomi produktif, perluasan kesempatan kerja bagi warga miskin, serta pola pemanfaatan program pengentasan kemiskinan. Sehingga dapat disusun program strategis dan langkah-langkah pembinaan yang terpadu, berkesinambungan dan bersifat kontekstual.

Berbagai kebijakan dan program pembangunan sosial dan sektor, telah dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat guna menanggulangi atau mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dapat dibuktikan dari berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan untuk mengatasi dampak adanya pandemic covid-19 yang melanda dunia



dan terkhusus Kabupaten Kutai Timur, yang secara langsung mempunyai multi effect bagi masyarakat miskin dan para pelaku usaha mikro dan kecil.

Kebijakan dan program kerja dalam penanggulangan kemiskinan pada prinsipnya bersifat lintas sektor, dan kompleks. Maka upaya penanggulangan kemiskinan terus untuk diupayakan dan akan menjadi bagian dari pembangunan daerah. Salah satu fungsi Tim Koordinasi Penganggulan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan adalah mengendalikan pemantauan penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pemantauan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah diharapkan memperoleh informasi tentang kinerja realisasi pencapaian target, penyerapan anggaran dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan setiap program. Langkah kebijakan yang mungkin dapat diambil agar kemiskinan dapat dikurangi yaitu dengan cara :

1. Menciptakan kesempatan kerja dan peluang kerja bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin yang mempunyai keahlian tertentu;
2. Memberdayakan masyarakat miskin dengan upaya memberikan pelatihan kewirausahaan dan memberikan stimulus bantuan modal; dan
3. Memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dengan memberikan jaminan kesehatan dalam bentuk Jamkesda untuk masyarakat miskin.

2.3.2. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Dalam penanganan pengaduan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur langsung ditujukan ke Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya, pengaduan masyarakat bisa melalui Pokja-Pokja yang dibentuk oleh TKPK kabupaten. Dalam upaya memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat dan menyelenggarakan fungsinya, Pokja pengaduan masyarakat ini bertugas sebagai berikut :



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

1. Merumuskan dan menyiapkan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait penanggulangan kemiskinan; dan
2. Menyiapkan dan merumuskan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Dalam melaksanakan tugasnya TKPK Kabupaten Kutai Timur dibantu kelompok program penanggulangan kemiskinan yang bertanggung jawab pada ketua TKPK, kelompok tersebut dipisah dalam beberapa klaster, dan klaster tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

KLASTER I :

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar masyarakat, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

- Karakteristik :

Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial adalah bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Ciri lain dari kelompok program ini adalah mekanisme pelaksanaan kegiatan yang bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin.

- Cakupan :

Cakupan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial dititikberatkan pada pemenuhan hak dasar utama. Hak dasar utama tersebut memprioritaskan



pada pemenuhan hak atas pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta sanitasi dan air bersih.

- Penerima Manfaat :

Penerima manfaat pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial ditujukan pada kelompok masyarakat sangat miskin. Hal ini disebabkan bukan hanya karena kondisi masyarakat sangat miskin yang bersifat rentan, akan tetapi juga karena mereka belum mampu mengupayakan dan memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

KLASTER II :

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin. Karena kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah tahap lanjut dalam proses penanggulangan kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan sebagai instrumen dari program ini dimaksudkan tidak hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan sumberdaya yang dimiliki, akan tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan di daerah.

- Karakteristik :

Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :
(1) Menggunakan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif tidak hanya tentang keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program,



tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program, meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan pelaksanaan program, bahkan sampai tahapan proses pelestarian dari program tersebut. (2) Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada penguatan aspek kelembagaan masyarakat guna meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, sehingga masyarakat mampu secara mandiri untuk pengembangan pembangunan yang diinginkannya. Penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya pada tahap pengorganisasian masyarakat untuk mendapatkan hak dasarnya, akan tetapi juga memperkuat fungsi kelembagaan sosial masyarakat yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan. (3) Pelaksanaan kelompok kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan kelompok. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat harus menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat miskin untuk selalu membuka kesempatan masyarakat dalam berswakelola dan berkelompok, dengan mengembangkan potensi yang ada pada mereka sendiri guna mendorong potensi mereka untuk berkembang secara mandiri. (4) Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Perencanaan program dilakukan secara terbuka dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat dan hasilnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Proses ini membutuhkan koordinasi dalam melakukan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan program yang jelas antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan tersebut.

- Cakupan :

Cakupan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan:



(1) Wilayah kelompok berbasis dilakukan pada wilayah perdesaan, wilayah perkotaan, serta wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah tertinggal. (2) Sektor Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada penguatan kapasitas masyarakat miskin dengan mengembangkan berbagai skema program berdasarkan sektor tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat disuatu wilayah.

- Penerima manfaat :

Penerima Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin. Kelompok masyarakat miskin tersebut adalah yang masih mempunyai kemampuan untuk menggunakan potensi yang dimilikinya walaupun terdapat keterbatasan.

KLASTER III :

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah memberikan akses seluas- luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya.

- Karakteristik :

Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah: (1). Memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro Kelompok program ini merupakan pengembangan dari kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat yang lebih mandiri, dalam pengertian bahwa pemerintah memberikan kemudahan kepada pengusaha mikro dan kecil untuk mendapatkan kemudahan tambahan modal melalui lembaga keuangan/ perbankan yang dijamin oleh Pemerintah. (2). Memperkuat kemandirian berusaha dan akses padap asar Memberikan akses yang luas



dalam berusaha serta melakukan penetrasi dan perluasan pasar, baik untuk tingkat domestik maupun internasional, terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil. Akses yang dimaksud dalam ciri ini tidak hanya ketersediaan dukungan dan saluran untuk berusaha, akan tetapi juga kemudahan dalam berusaha. (3). Meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha Memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan manajemen berusaha kepada pelaku- pelaku usaha kecil dan mikro.

- **Cakupan :**

Cakupan program kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil dapat dibagi atas 3 (tiga), yaitu: (1) pembiayaan atau bantuan permodalan; (2) pembukaan akses pada permodalan maupun pemasaran produk; dan (3) pendampingan dan peningkatan keterampilan dan manajemen usaha.

- **Penerima Manfaat :**

Penerima manfaat dari kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil. Penerima manfaat pada kelompok program ini juga dapat ditujukan pada masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha atau terlibat dalam kegiatan ekonomi.

BAB III

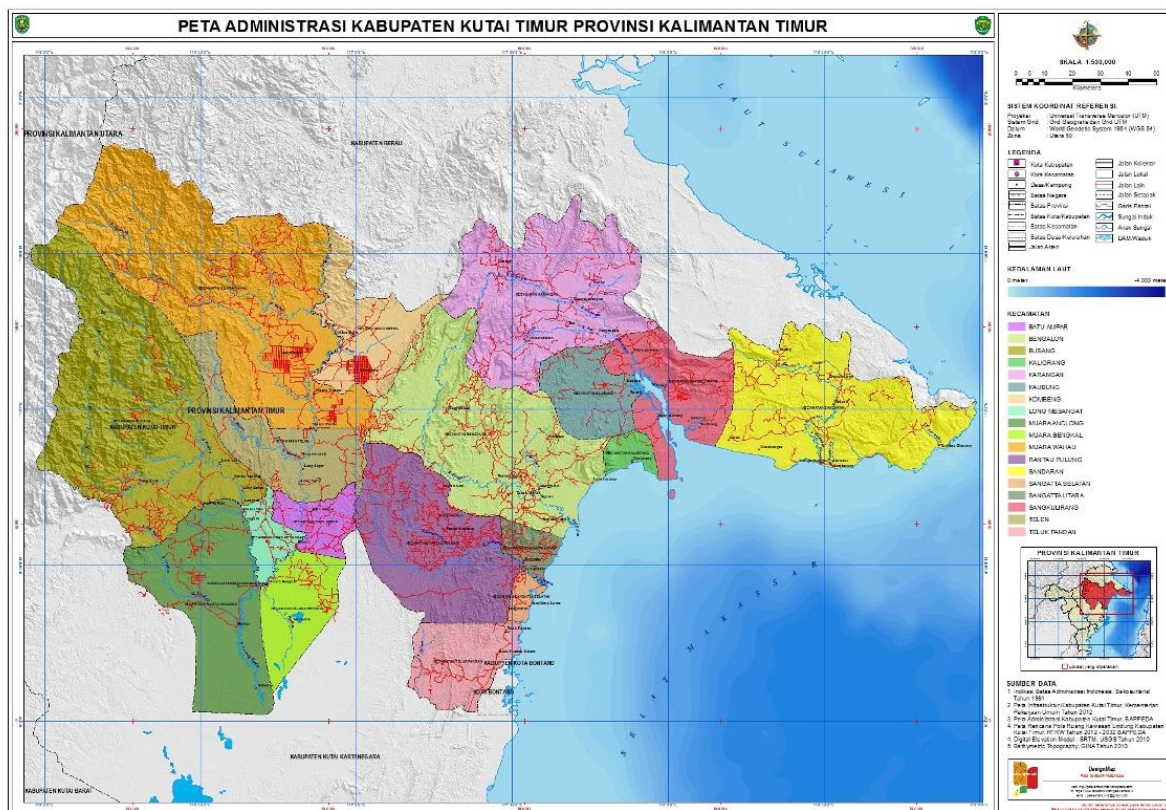
CAPAIAN KINERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3.1. KONDISI UMUM DAERAH

Secara Astronomis, Kabupaten Kutai Timur terletak antara 10 52' 39" Lintang Utara – 00 02' 10" Lintang Selatan dan 1180 58' 19" – 1150 56' 26" Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Kutai Timur memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Berau
- Sebelah Barat : Kabupaten Kutai Kartanegara
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang
- Sebelah Timur : Selat Makasar

Peta Wilayah Administratif Kabupaten Kutai Timur



Gambar 1. Peta Kabupaten Kutai Timur



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Kabupaten Kutai Timur merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai berdasarkan UU Nomor 47 Tahun 1999, Tentang Pemekaran Wilayah Provinsi dan Kabupaten yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 28 Oktober 1999. Saat ini di Kabupaten Kutai Timur terdapat 18 (delapan belas) kecamatan yang sebelumnya hanya terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kutai Timur memiliki batas-batas: Utara - Kabupaten Berau; Selatan - Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang; Barat - Kabupaten Kutai Kartanegara; Timur - Selat Makasar. Wilayah Kutai Timur terdiri dari daratan dan perairan, yang mana untuk wilayah daratan tidak terlepas dari gugusan gunung/ pegunungan yang jumlahnya sekitar 8 (delapan) gunung dan yang tertinggi adalah Gunung Menyapa dengan ketinggian mencapai 2000 m.

Sedangkan wilayah perairan berupa laut/ pantai, sungai dan danau, untuk sungai terdapat diseluruh kecamatan namun yang terpanjang Sungai Kedang Kepala terletak di Kecamatan Muara Wahau dengan panjang 319 km, hal ini berbeda dengan danau yang hanya terdapat di Kecamatan Muara Bengkal yaitu Danau Ngayau dan Danau Karang. Kutai Timur yang beriklim tropis mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah Indonesia pada umumnya, yaitu adanya musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan pada bulan-bulan tertentu.

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Kutai Timur bermata pencaharian di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Peranan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kutai Timur cukup besar dibandingkan sektor-sektor lain. Hal ini terlihat dari penyerapan tenaga kerja di sektor ini mencapai 30,14 persen kemudian disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

sepeda motor yakni sebesar 18,23 persen. Sektor yang memiliki penyerapan tenaga kerja terkecil adalah aktivitas informasi dan komunikasi sebesar 0,08 persen.

Lapangan pekerjaan utama (sektor) dapat dikelompokkan dalam tiga sektor besar, yaitu sektor A (agriculture), merupakan pertanian; kemudian sektor M (manufacture), meliputi sektor-sektor pertambangan, industri, listrik dan bangunan; serta sektor S (service) yang terdiri atas sektor-sektor di luar sektor A dan M. Sektor A mempunyai daya serap sangat tinggi di Kabupaten Kutai Timur, kondisi ini disebabkan sebagian besar wilayah di Kabupaten Kutai Timur merupakan daerah pedesaan yang masih banyak memiliki lahan pertanian maupun perkebunan. Maka sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian/Agriculture.

Masyarakat Kabupaten Kutai Timur masih mengandalkan pengelolaan sektor pertanian secara luas untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pembangunan daerah adalah usaha untuk melakukan Perubahan keadaan daerah menuju perbaikan yang lebih baik, pada dasarnya pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan pambagian pendapatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan diatas maka diperlukan perencanaan yang detail dan teliti serta dilakukannya evaluasi terhadap pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan. Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan secara makro adalah statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Struktur ekonomi Kabupaten Kutai Timur masih dikuasai sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 79,72% dari total PDRB Kabupaten Kutai Timur. Justru sektor yang mempunyai tenaga kerja terbanyak di Kabupaten Kutai Timur yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan hanya berkontribusi sebesar 8,24%.



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

3.2. CAPAIAN INDIKATOR SASARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Data capaian indikator sasaran penanggulangan kemiskinan tahun 2021 disajikan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1. Capaian Indikator Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2021	Kebijakan
1	Mewujudkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin				
-	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Non Formal/Kesetaraan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 2021	64,89	Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kepastian, kapasitas dan mutu Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ sederajat 2021	99,35	Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kepastian, kapasitas dan mutu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Non formal/Kesetaraan
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ sederajat 2021	108,10	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ sederajat 2021	76,17	Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kepastian, kapasitas dan mutu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Non formal/Kesetaraan
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat 2021	100,24	
-	Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	73,46	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan Kesehatan - Masyarakat mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan - Peningkatan Upaya promotif dan preventif
			Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	6 (2020)	
			Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	198,01 (2020)	
			Prevalensi Balita Stunting	16,05 (2020)	



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2021	Kebijakan
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,21 (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan sarana kesehatan - Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan anak - Standarisasi pelayanan Kesehatan - Perluasan Akses Sistem Kegawat darurat melalui "peningkatan akses sistem kegawat darurat"
			Indeks Keluarga Sehat		
-	Meningkatkan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial	Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial dan peningkatan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan yang Berkurang Beban Pengeluarannya		<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi, validasi dan pendataan kemiskinan - Pengusulan Penerima Bantuan/Peserta Program Pengentasan Kemiskinan Nasional - Pembinaan sosial, pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan bagi PPKS - Peningkatan dukungan pemenuhan kebutuhan dasar berupa bantuan sosial berbasis keluarga - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan
			Persentase Penduduk Miskin (Po)	9,81	
			Peningkatan Jumlah	800	
			Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,640	
			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,440	
			Persentase PMKS yang ditangani	66,51	
			Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah Penyandang		



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2021	Kebijakan
2	Memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan				
	- Meningkatkan kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga	Meningkatnya kesadaran pemuda, pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan Kewirausahaan	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan		Peningkatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader sesuai kewenangan kabupaten
	- Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	76,40	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan cakupan layanan terpadu serta sarana berdiskusi bagi perempuan dan anak - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam Pembangunan - Pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukatif (KIE)
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	53,78	
			Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA)		
	- Meningkatkan efektifitas tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya efektivitas dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7119	- Optimalisasi potensi lokal desa melalui pemberdayaan masyarakat, kemitraan dan kerjasama desa



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2021	Kebijakan
3	Meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin				
-	Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur di Bidang Penataan Ruang, Bangunan Gedung, Binamarga, Sumber Daya Air dan Jasa Kontruksi serta Pertanahan	Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap dan jembatan di jalan kabupaten yang berfungsi baik	Indeks Layanan Infrastruktur Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap dan Berkeselamatan	52,57	Peningkatan layanan infrastruktur jalan dan jembatan dari aspek pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan utamanya yang mendukung PSN serta pengembangan kawasan strategis serta penyelesaian aset/ penggunaan lahan kawasan hutan dan pengadaan tanah untuk pembangunan/ peningkatan jalan, jembatan, dan perlengkapan jalan
			Persentase Jembatan yang Berfungsi Baik		



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2021	Kebijakan
		Meningkatnya Jaringan Irigasi, Bangunan Perkuatan Tebing dalam kondisi baik	Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	46,10	Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dari aspek konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak air, data informasi SDA, dan partisipasi masyarakat untuk pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta Percepatan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi
-	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar	Pemenuhan Pelayanan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak	78,00	Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum layak huni
-	Meningkatkan kualitas permukiman yang layak	Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	0,24	Peningkatan hunian layak bagi masyarakat
-	Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Meningkatnya kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,35	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi beserta Uji Sertifikasi kompetensi - Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan kerja dengan sertifikasi akreditasi - Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja - Peningkatan informasi lowongan kerja - Pengembangan Job Center dan memperkuat sistem teknologi informasi
			Persentase penempatan tenaga kerja		
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,97	



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2021	Kebijakan
			Tingkat Kesempatan Kerja	94,65	penempatan serta menjalin kemitraan dengan pengguna
			Persentase Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan pada jabatan formal		- Peningkatan pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan PMI purna - Pengembangan pelatihan wirausaha baru
	- Meningkatkan Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Meningkatnya kualitas dan produktivitas Industri Kecil dan Menengah	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang berdaya saing		- Peningkatan pembinaan dan pelatihan Industri Kecil dan Menengah (IKM) - Pengembangan produk Industri Kecil dan Menengah
	- Meningkatkan produksi, daya saing produk pertanian dan kesejahteraan petani	Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian	PDRB Sektor Pertanian	11.115,95 (Milliar Rupiah)	- Meningkatkan jumlah produksi dan kualitas mutu - Peningkatan kelas kelembagaan petani - Peningkatan SDM petani
			Nilai Tukar Petani (NTP)	109,66	
			Jumlah Produksi Tanaman Pangan(ton) :		
			- Padi	27.461,91	
			- Jagung	12.887,60	
			- Kedelai	13,83	
			- Ubi Kayu	6.909,01	
			Jumlah Produksi Hortikultura 2020 (kwintal) :		
			- Melon	418	
			- Semangka	4.898	
			- Cabai besar	2.025	
			- Cabe keriting	-	
			- Cabe Rawit	6.114	
			- Bawang Merah	-	
			- Tomat	5.845	
			- Kangkung	3.516	
			- Kacang Panjang	5.561	
			Jumlah Produksi Perkebunan (ton) :		
			- Kelapa Sawit	7.060.686,10	
			- Kelapa	1.060,03	



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2021	Kebijakan
			- Karet	1.788,4	
			- Kopi	50,98	
			- Panili	2,78	
			- Kemiri	7,83	
			- Kakau	1.414,09	
			- Aren	35,55	
			- Lada	127,72	
	- Meningkatkan ketersediaan dan penganeekaragaman pangan	Terjaganya ketersediaan dan penganeekaragaman pangan	Ketersediaan Pangan (ton) :		- Penumbuhan wirausaha perempuan dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya local
			- Padi	27.461,91	- Pemanfaatan pekarangan untuk kemandirian pangan
			- Jagung	12.887,60	
			- Kedelai	13,83	
			- Daging	1.285,55	
			- Telur	919,31	
			- Susu		
			- Ikan	7.410,47	
			Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	89,40	
	- Mengembangkan Pariwisata Berbasis Kolaborasi yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelangsungan Hidup Masa Depan (Keberlanjutan)	Meningkatnya daya saing destinasi wisata	Jumlah Kunjungan Wisata (persen)	91,80	- Optimalisasi CBT (Community Base Tourism) and Ecotourism
	- Meningkatkan Daya Saing Produk Perikanan serta Kesejahteraan Nelayan serta Pembudidaya	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	8.085,61	- Pengentasan Keluarga Miskin melalui Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif di Bidang Perikanan Budidaya
			Nilai Tukar Nelayan	99,39	- Pemberian Fasilitas bagi
			Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	99,10	



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2021	Kebijakan
	Ikan		Nilai Tukar Petani Perikanan Tangkap	99,68	pelaku usaha pemasaran hasil perikanan - Pembangunan Pasar Ikan dan Sentra Kuliner Ikan - Peningkatan moda pemasaran ikan
		Meningkatnya Konsumsi Ikan masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	41 kg/kapita/thn	- Peningkatan Kampanye GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan), utamanya pada wilayah stunting - Pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan pada Usaha Pengolahan Ikan
	-	Meningkatkan daya saing produk pertanian dan peternakan serta kesejahteraan petani dan peternak	Meningkatnya produksi dan daya saing produk peternakan	Jumlah Produksi peternakan:	- Pembinaan dan pendampingan serta
				- Daging (Ton)	
				- Telur (Ton)	
				- Susu	
				1.293,55	
				972,41	
				66.219,65	
	-	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran tahunan program pembangunan dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75 %	- Penguatan database perencanaan - Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan - Peningkatan evaluasi pelaksanaan pembangunan koordinasi dan kerjasama, baik antar Perangkat Daerah, stakeholder terkait, lembaga independen/swasta, perguruan tinggi dan pelaku pembangunan lainnya dalam



3.3. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR MAKRO PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kondisi kemiskinan multidimensi berisi gambaran mengenai capaian indikator utama kemiskinan dari beberapa dimensi di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2021. Juga perkembangan capaian dari indikator tersebut dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 2. Capaian Kinerja Indikator Makro Penanggulangan Kemiskinan

No.	Indikator	Capaian Tahun 2021			Analisis (posisi relatif, perkembangan antarwaktu, efektivitas dan analisis relevansi)
		Nasional	Provinsi	Kab. Kutai Timur	
1	Persentase Penduduk Miskin (Po)	10,14	6,54	9,81	Analisis akan dijelaskan sebagaimana berikut:
2	Jumlah Penduduk Miskin	27.542.770	241.770	37.780	
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)	1,71	1,22	1,64	
4	Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)	0,42	0,34	0,44	
5	Garis Kemiskinan (GK)	349.474	689.035	626.492	
6	Rasio Gini	0,384	0,334	0,328	

Sumber : bps.go.id / Kaltim.bps.go.id

3.3.1. Dimensi Ekonomi dan Ketenagakerjaan

A. Dimensi Ekonomi

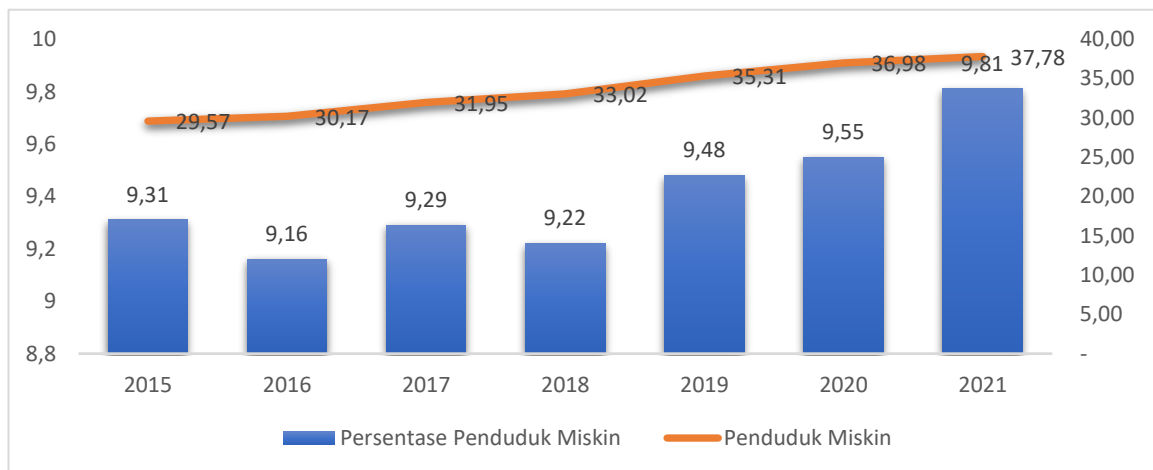
a. Persentase Penduduk Miskin (Po) dan Jumlah Penduduk Miskin

Data Kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur berasal dari Badan Pusat Statistik. Dari proses pendataan tersebut diketahui bahwa jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Kutai Timur dari tahun ketahun cenderung mengalami kenaikan, terutama dengan adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia mempengaruhi pula jumlah penduduk miskin di Tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan seperti grafik berikut :



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Grafik 1. Analisis Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2021



Sumber: BPS Kab. Kutai Timur, 2022

Grafik diatas merupakan gambaran jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Timur tahun 2015-2021. Selama periode Maret 2020 -Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Timur bertambah sebanyak 0,8 ribu jiwa dari 36,98 ribu jiwa pada Maret 2020, yaitu menjadi 37,78 ribu jiwa pada Maret 2021 atau mengalami peningkatan sebesar 2,16 persen. Beberapa faktor yang diduga terkait dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur miskin selama periode Maret 2021 antara lain karena aktifitas perekonomian sudah mulai pulih dari dampak pandemi covid-19. Hal ini dimungkinkan terjadi karena sebagian masyarakat di Kabupaten Kutai Timur perekonomiannya mengandalkan sektor pertanian dan pertambangan. Seperti diketahui, sektor yang paling terdampak pada pandemi covid19 ini adalah penyedia akomodasi, dan makanan dan minuman; perdagangan; transportasi dan pergudangan; konstruksi dan ;

Hal ini secara tidak langsung sangat berkaitan dengan pelaksanaan Program Gertak yang ada di Kabupaten Kutai Timur, karena program ini di nilai sangat banyak membantu masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Kutai Timur untuk dapat menerima bantuan. Untuk jumlah rumah tangga miskin yang ada di Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat dilihat pada tabel berikut :



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Tabel 3. Jumlah Kepala Keluarga yang Terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 – 2021

No	Tahun	Jumlah Kepala Keluarga
1.	2020	
2.	2021	

Sumber : DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kemensos RI, Desember 2021

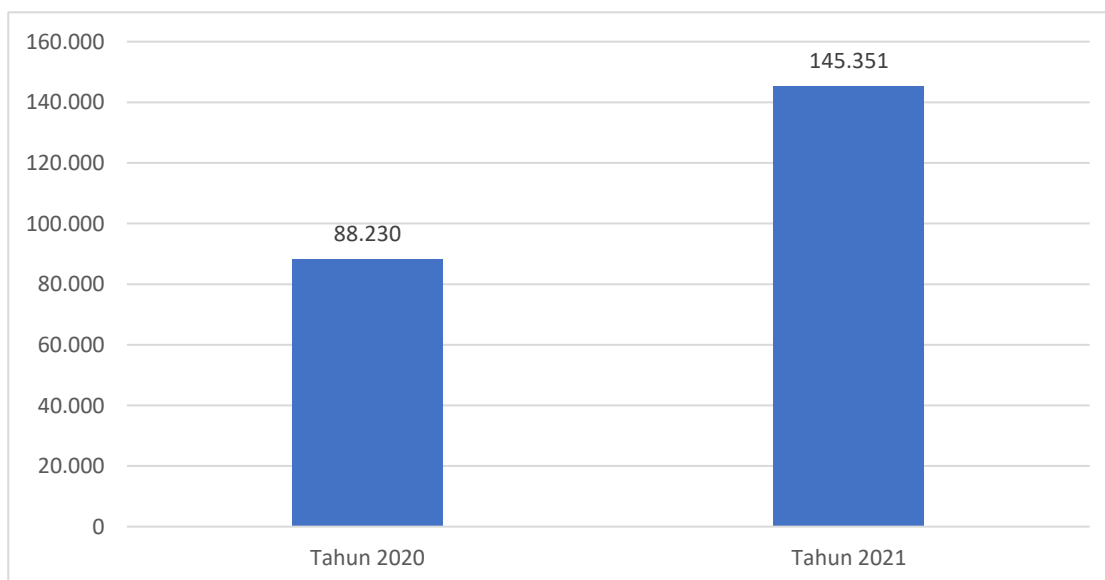
Tabel 4. Jumlah Individu yang Terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

No	Tahun	Jumlah Individu
1.	2020	88.230
2.	2021	145.351

Sumber : DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kemensos RI, Desember 2021

Sedangkan tingkat kemiskinan pada kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan individu dan rumah tangga adalah seperti grafik berikut :

Grafik 2. Analisis Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Jumlah Individu Di Kabupaten Kutai Timur Hasil DTKS Tahun 2021



Sumber : DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kemensos RI, Desember 2021



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Jumlah Individu yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Tahun 2021 meningkat tajam, dibandingkan dengan Tahun 2020 yaitu sebesar 57.121 jiwa atau sebesar 64,74%.

Posisi relatif Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Timur terhadap Kabupaten/Kota lainnya dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2021 telah dirilis oleh BPS digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 5. Analisis Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur

	No Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (2020) (Ribuan Orang)	Persentase Penduduk Miskin (2020)	Jumlah Penduduk Miskin (2021) (Ribuan Orang)	Persentase Penduduk Miskin (2021)
1	Paser	26.77	9.23	27.56	9.73
2	Kutai Barat	13.78	9.29	15.38	10.24
3	Kutai Kartanegara	58.42	7.31	62.36	7.99
4	Kutai Timur	36.98	9.55	37.78	9.81
5	Berau	12.30	5.19	13.62	5.88
6	Penajam Paser Utara	11.93	7.36	12.13	7.61
7	Mahakam Ulu	3.26	11.44	3.18	11.90
8	Balikpapan	17.02	2.57	18.53	2.89
9	Samarinda	41.92	4.76	42.84	4.99
10	Bontang	7.91	4.38	8.41	4.62

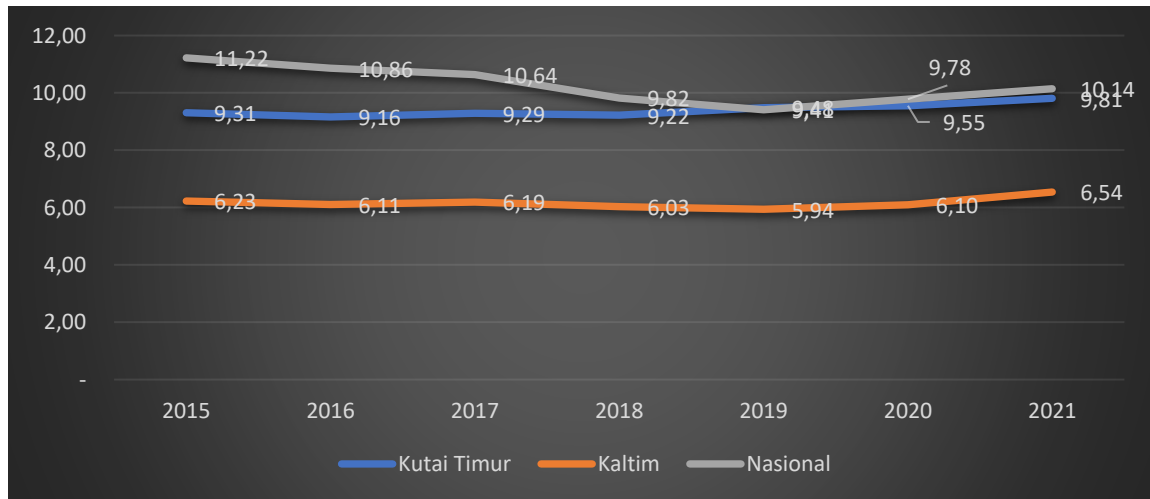
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Dari tabel diatas bahwa pada Tahun 2021 posisi relatif penduduk miskin di Kabupaten Kutai Timur berada pada urutan ke-3 dari 10 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Grafik 3. Analisis Relevansi Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Kutai Timur Terhadap Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2015-2021



Sumber : BPS, 2022

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Kutai Timur lebih tinggi dari pada tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur dan sedikit lebih rendah dibandingkan angka nasional. Pola data persentase kemiskinan Kabupaten Kutai Timur jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2015 sampai dengan 2021 berada pada pola yang sama dari tahun ke tahun. Sementara pola data nasional sedikit berbeda. Dari tahun 2015 sampai 2019 persentase kemiskinan nasional secara terus menerus tiap tahun mengalami penurunan hingga masa pandemi covid19 melanda Indonesia secara keseluruhan, yaitu dengan ditandai naiknya persentase kemiskinan sejak tahun 2020. Peningkatan angka kemiskinan pada tingkat Kabupaten dan Provinsi maupun Nasional hingga tahun 2021 dimungkinkan oleh belum meredanya pandemi covid-19 yang melanda seluruh belahan dunia dari tahun 2019 hingga 2021. Pandemi tersebut menyebabkan kontraksi ekonomi yang membawa resesi di Indonesia. Resesi tersebut menyebabkan banyak korporasi terdampak dan melakukan pemangkas tenaga kerja yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.

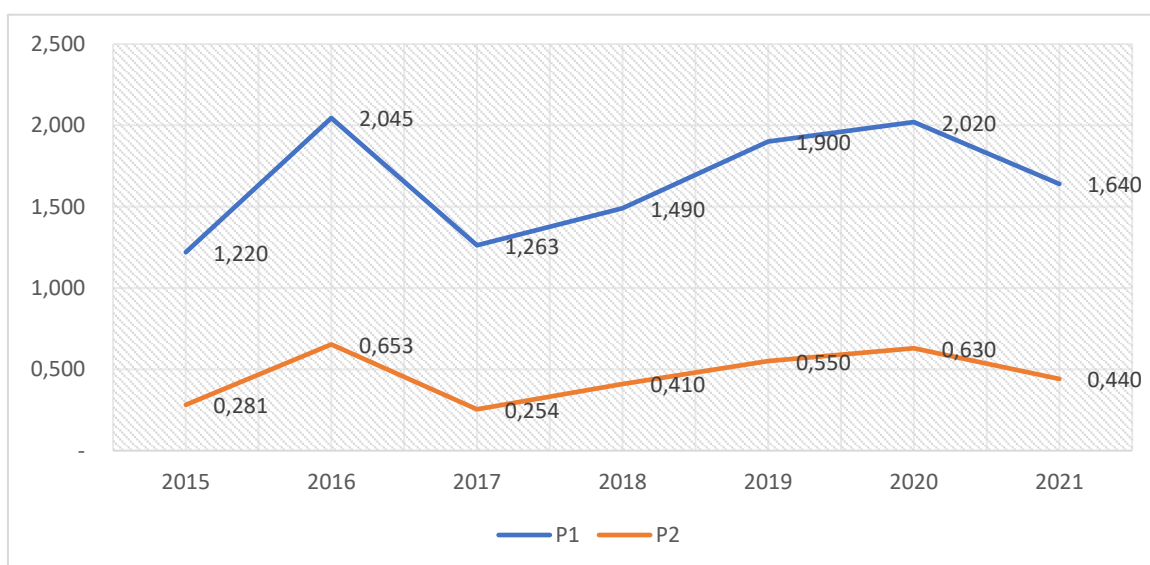
b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Analisis kedalaman kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) dapat digambarkan sebagaimana dalam grafik berikut :

Grafik 4. Analisis Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2021



Sumber : BPS, 2022

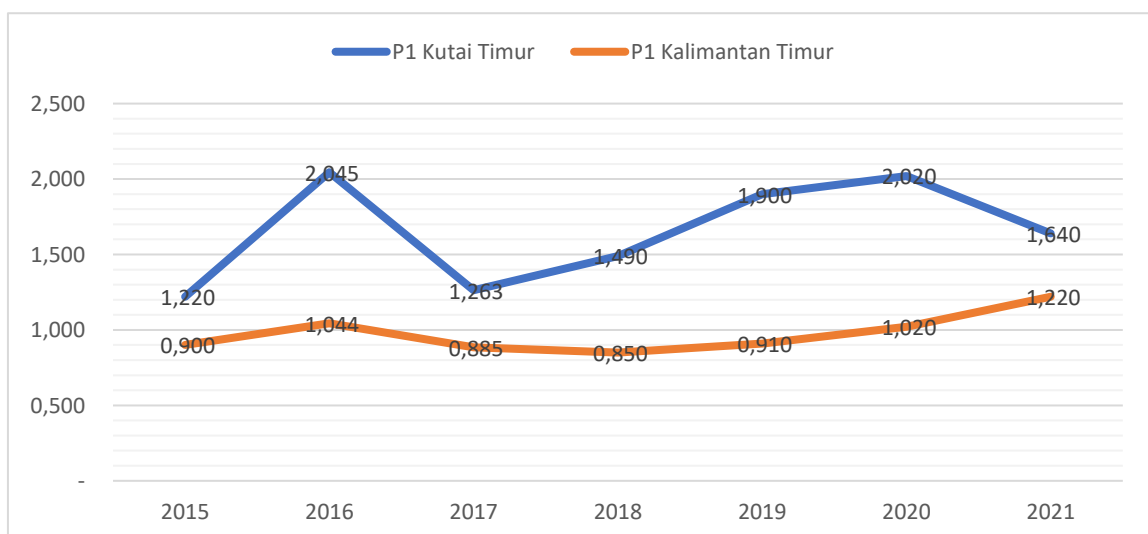
Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa baik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan angka yang fluktuatif dan menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada indeks kedalaman kemiskinan (P1) di tunjukan bahwa dari tahun 2015 dengan 1,220 meningkat menjadi 2,045 pada tahun 2016. Pada periode tahun 2016 sampai dengan 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kutai Timur turun dari 2,045 pada tahun 2016 menjadi 1,263 pada tahun 2017. Selanjutnya, dari 2017 hingga tahun 2020 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kutai Timur secara bertahap mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2021 justru mengalami penurunan menjadi 1,640. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat perekonomian penduduk miskin Kabupaten Kutai Timur sedikit membaik jika dibanding dengan tahun 2020. Hal ini salah satu penyebabnya adalah masih berlangsungnya pandemic covid-19 yang melanda dan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah Pusat, namun pemerintah baik pusat maupun daerah mengeluarkan program-program sosial untuk menyangga efek dari pandemi covid-19.

Grafik 5. Analisis Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kutai Timur Terhadap Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 - 2021



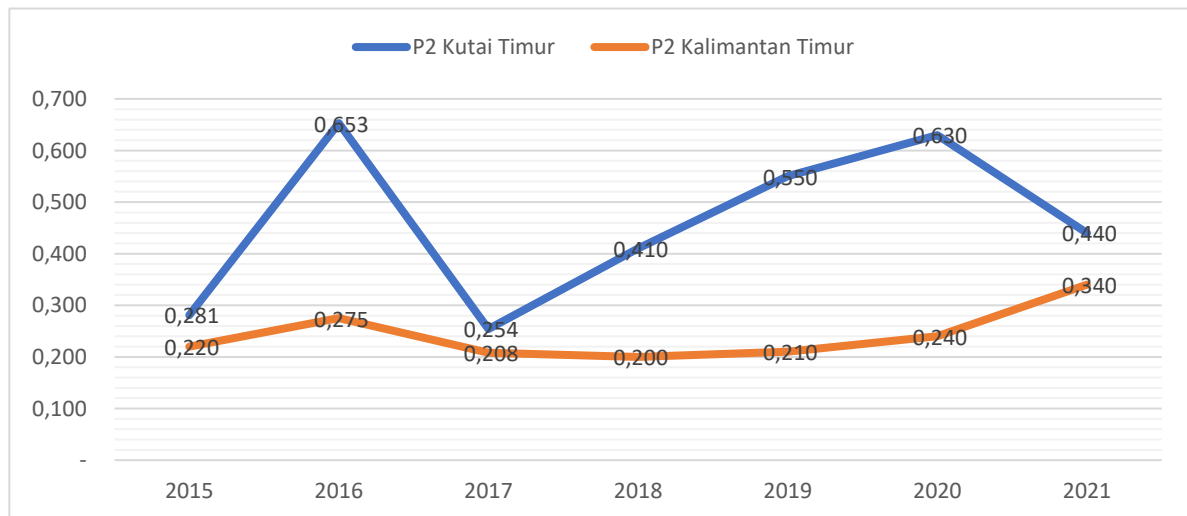
Sumber : BPS, 2022

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Provinsi Kalimantan Timur jauh lebih baik dibandingkan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Kutai Timur. Artinya bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Kutai Timur masih berada diatas rata-rata provinsi Kalimantan Timur. Perlu upaya yang lebih baik dalam melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur.



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Grafik 6. Analisis Posisi Relatif Indeks Keparahen Kemiskinan (P2) Kabupaten Kutai Timur Terhadap Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 - 2021



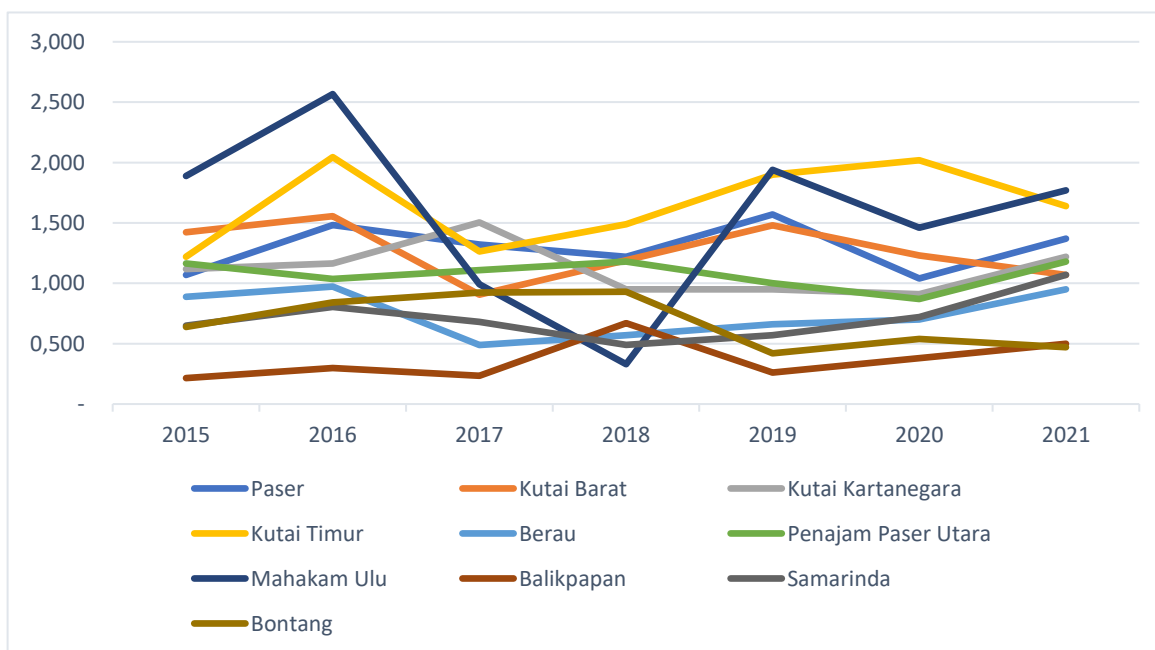
Sumber : BPS, 2022

Untuk Indeks Keparahen Kemiskinan (P2) Kabupaten Kutai Timur tahun 2021 berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur dengan pola data yang lebih fluktuatif. Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa perkembangan Indeks Keparahen Kemiskinan (P2) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 masih menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan masih meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa perlu upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dalam rangka penurunan Indeks Keparahen Kemiskinan (P2) di Kabupaten Kutai Timur. Agar efektif pelaksanaannya, perlu diadakan perubahan dan peningkatan.



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Grafik 7. Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Kutai Timur Terhadap Kabupaten/Kota Lain di Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2015-2021



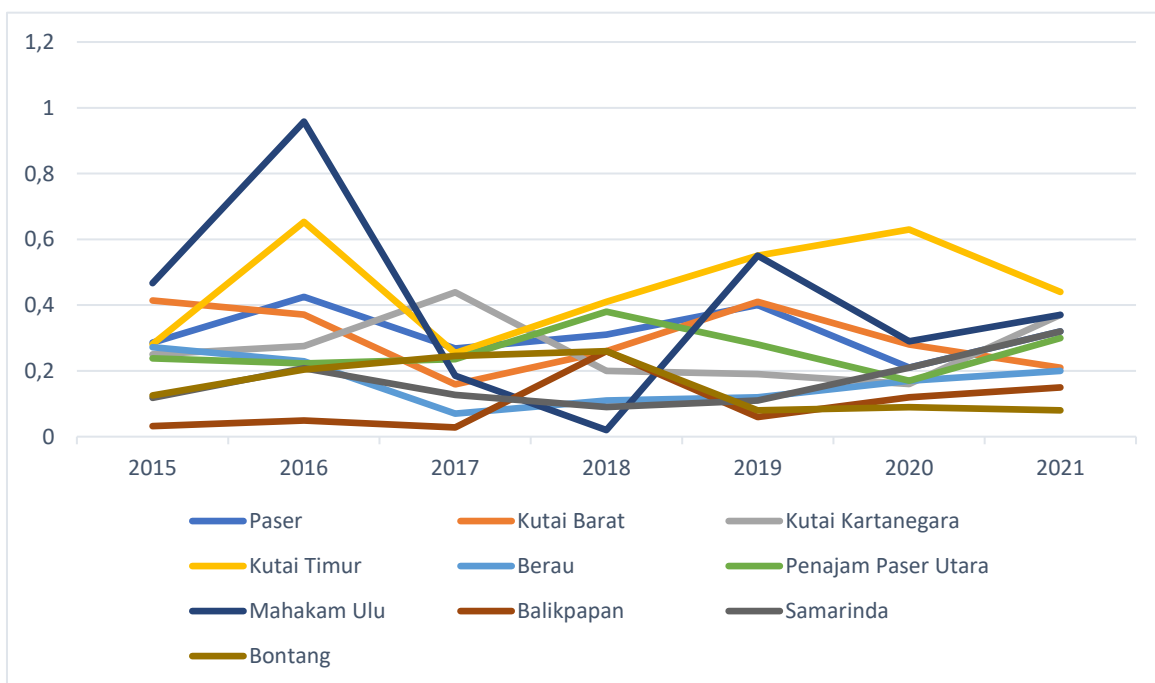
Sumber : BPS, 2022

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kutai Timur yang disandingkan dengan nilai dari Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan nilai yang paling tinggi, namun pada tahun 2021 yang paling tinggi adalah Kabupaten Mahakam Ulu. Hal ini menunjukkan bahwa perlu upaya yang lebih terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dalam rangka penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Kutai Timur.



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Grafik 8. Analisis Relevansi Indeks Keparahane Kemiskinan (P2) Kabupaten Kutai Timur Terhadap Kabupaten/Kota Lain di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2021



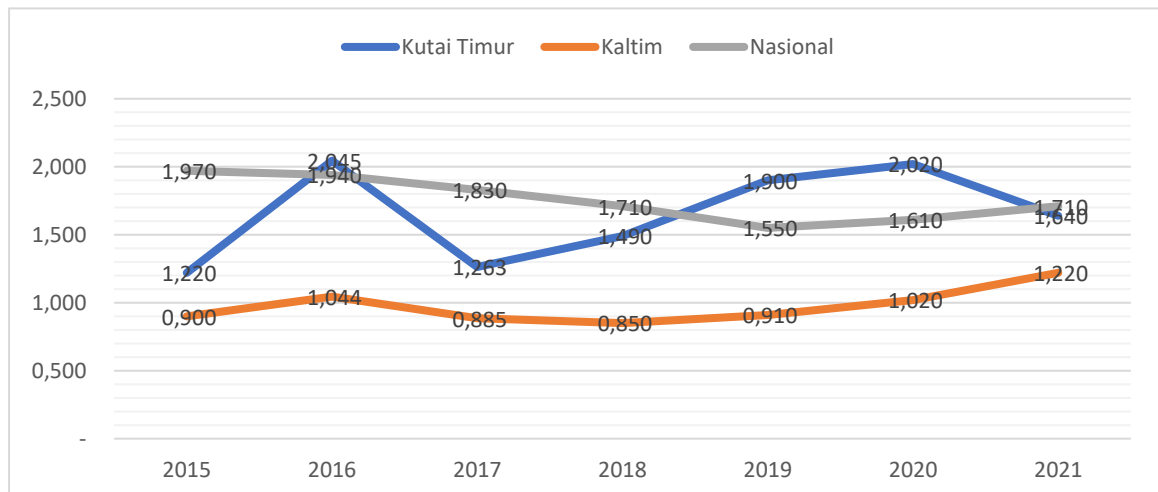
Sumber : BPS, 2022

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa perkembangan Indeks Keparahane Kemiskinan (P2) Kabupaten Kutai Timur yang disandingkan dengan nilai dari Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan nilai yang paling tinggi juga. Hal ini menunjukkan bahwa perlu upaya yang lebih terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dalam rangka penurunan Indeks Keparahane Kemiskinan (P2) di Kabupaten Kutai Timur.



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Grafik 9. Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Kutai Timur Terhadap Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional
Tahun 2015 - 2021



Sumber : BPS, 2022

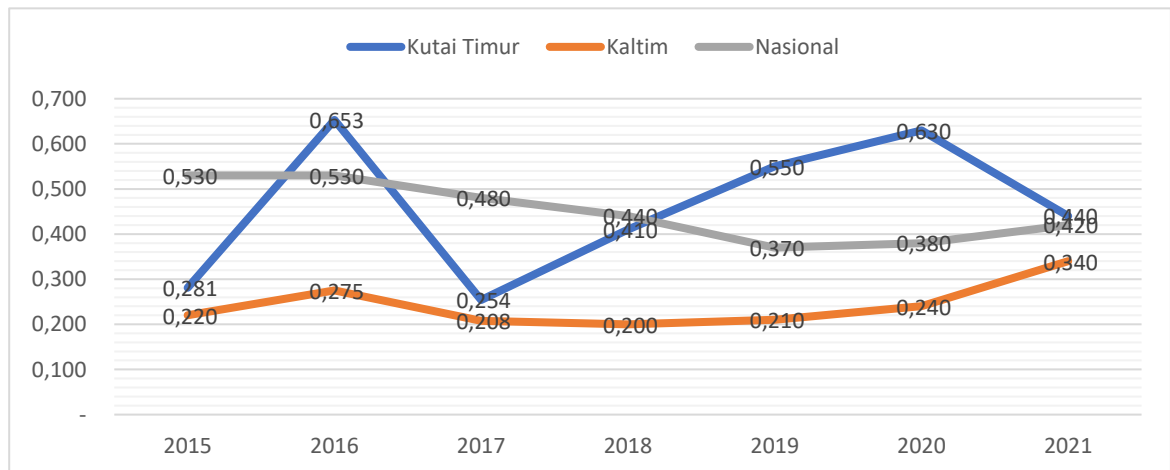
Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kutai Timur yang disandingkan dengan nilai dari rata-rata P1 di Provinsi Kalimantan Timur dan rata-rata P1 secara nasional menunjukkan nilai P1 Kabupaten Kutai Timur masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi maupun rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa perlu upaya yang lebih terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dalam rangka penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Kutai Timur.

Sedangkan Berdasarkan grafik di bawah diketahui bahwa perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kutai Timur yang disandingkan dengan nilai dari rata-rata P2 di Provinsi Kalimantan Timur dan rata-rata P2 secara nasional menunjukkan nilai P2 Kabupaten Kutai Timur masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi maupun rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa perlu upaya yang lebih terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dalam rangka penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Kutai Timur.



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Grafik 10. Analisis Relevansi Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Kutai Timur Terhadap Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional
Tahun 2015-2021



Sumber : BPS, 2022

c. Indeks Gini (Gini Ratio)

Ketimpangan pendapatan dapat dinyatakan dengan Gini Ratio dimana nilai indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks gini nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.



Grafik 11. Analisis Perkembangan Antar Waktu Indeks Gini
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2021



Sumber: BPS. 2022

Indeks Gini Kabupaten Kutai Timur cenderung fluktuatif, tahun 2015 indeks Gini mencapai 0,284 poin, sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 0,314 poin dan di tahun 2017 menurun menjadi 0,288 poin. Adapun pada tahun 2019 angka indeks gini mencapai nilai tertinggi dari rentang waktu 2015 – 2021. Kondisi tersebut menandakan bahwa tingkat kesenjangan di Kabupaten Kutai Timur cenderung kian menipis sejak era pandemi covid-19.

Posisi relatif Indeks Gini Kabupaten Kutai Timur terhadap Kabupaten/Kota lainnya dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021 telah dirilis oleh BPS digambarkan dalam tabel berikut:



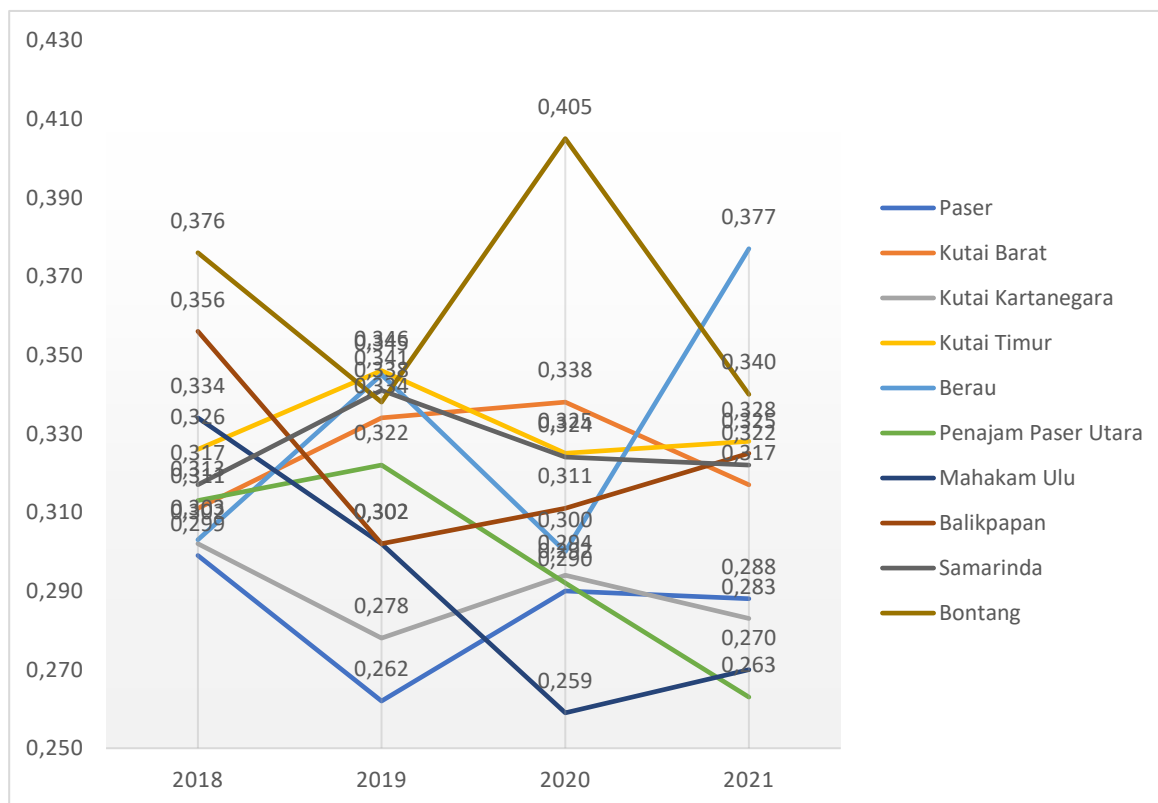
LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Tabel 6. Analisis Posisi Relatif Indeks Gini Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2018-2021

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Paser	0.299	0.262	0.290	0.288
2	Kutai Barat	0.311	0.334	0.338	0.317
3	Kutai Kartanegara	0.302	0.278	0.294	0.283
4	Kutai Timur	0.326	0.346	0.325	0.328
5	Berau	0.303	0.345	0.300	0.377
6	Penajam Paser Utara	0.313	0.322	0.292	0.263
7	Mahakam Ulu	0.334	0.302	0.259	0.270
8	Balikpapan	0.356	0.302	0.311	0.325
9	Samarinda	0.317	0.341	0.324	0.322
10	Bontang	0.376	0.338	0.405	0.340
	Kalimantan Timur	0.389	0.382	0.317	0.384

Sumber : BPS, 2022

Grafik 12. Analisis Relevansi Indeks Gini Kabupaten Kutai Timur Terhadap Kabupaten/Kota lain di Kalimantan Timur Tahun 2018-2021



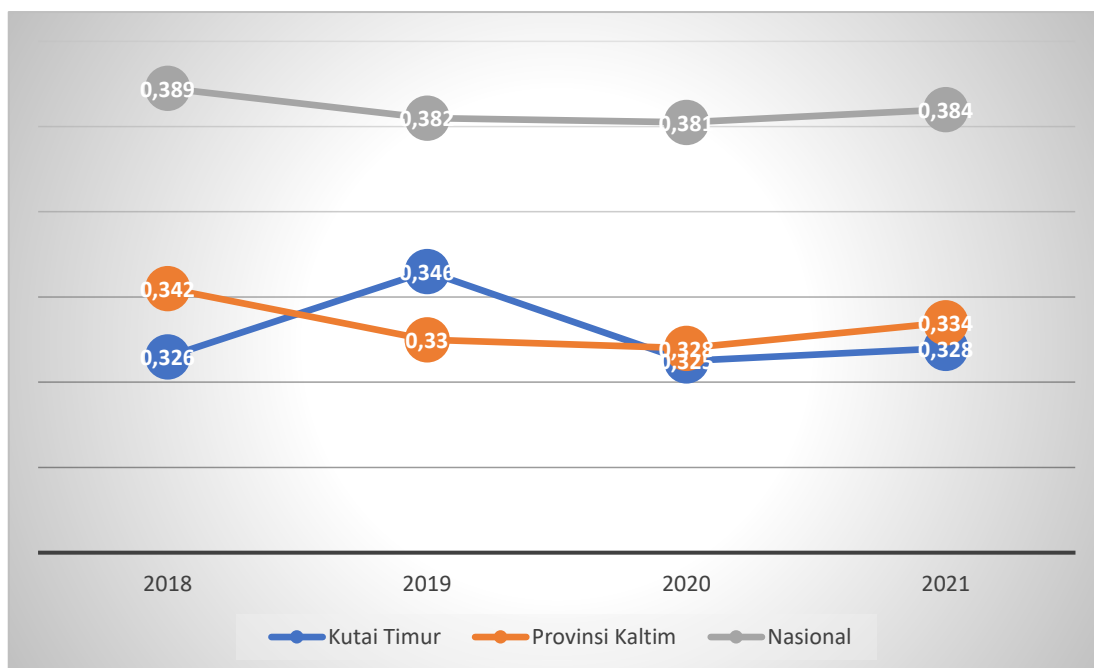
Sumber : BPS, 2022



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Dari tabel dan grafik di atas nampak bahwa pada Tahun 2021 posisi relatif Indeks Gini berada pada urutan ke-6 dari 10 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur. Seperti diketahui, Indeks Gini Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Grafik 13. Analisis Relevansi Indeks Gini Kabupaten Kutai Timur Terhadap Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2018-2021



Sumber : BPS, 2022

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa perkembangan Indeks Gini Kabupaten Kutai Timur yang disandingkan dengan nilai dari Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan Penurunan. Kondisi tersebut menandakan bahwa tingkat kesenjangan di Kabupaten Kutai Timur kian menipis pada era pandemi covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dan



program penanggulangan kemiskinan dalam rangka penurunan Indeks Gini di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2018-2021 cukup relevan antara Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.

d. Garis Kemiskinan

Menurut konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per/kapita per/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

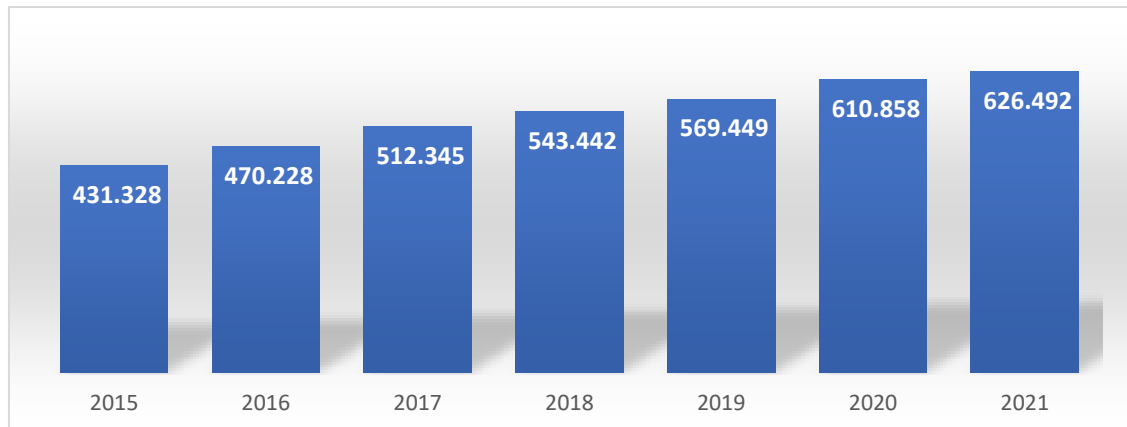
Garis kemiskinan terbagi menjadi 2 yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Berdasarkan data dari BPS tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Timur mengalami kenaikan dari 36.980 jiwa menjadi 37.780 jiwa berada dibawah garis kemiskinan.



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

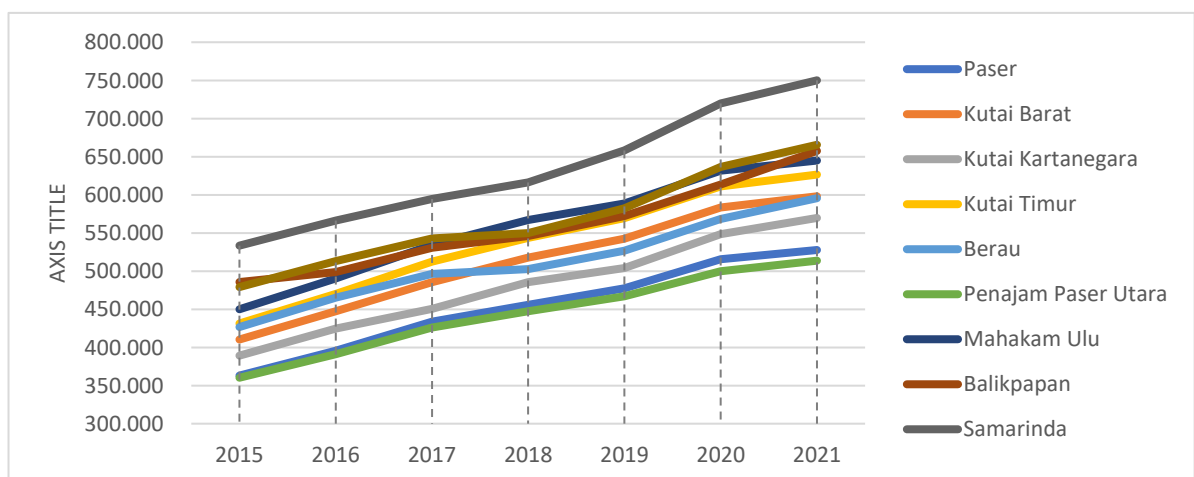
Grafik 14. Analisis Perkembangan Antar Waktu Garis Kemiskinan
(rupiah/kapita/bulan) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2021



Sumber : BPS, 2022

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa Garis Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur kian meningkat dari tahun 2015-2021. Pada tahun 2015 garis kemiskinan pada angka 431.328, naik menjadi 470.228 di tahun 2016, kemudian pada tahun 2021 menjadi 626.492. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus mempunyai kebijakan yang tepat sasaran dan efektif dalam mengentaskan kemiskinan.

Grafik 15. Analisis Relevansi Garis Kemiskinan
(rupiah/kapita/bulan) Kabupaten Kutai Timur Terhadap Kabupaten/Kota Se
Kalimantan Timur Tahun 2015-2021



Sumber : BPS, 2022

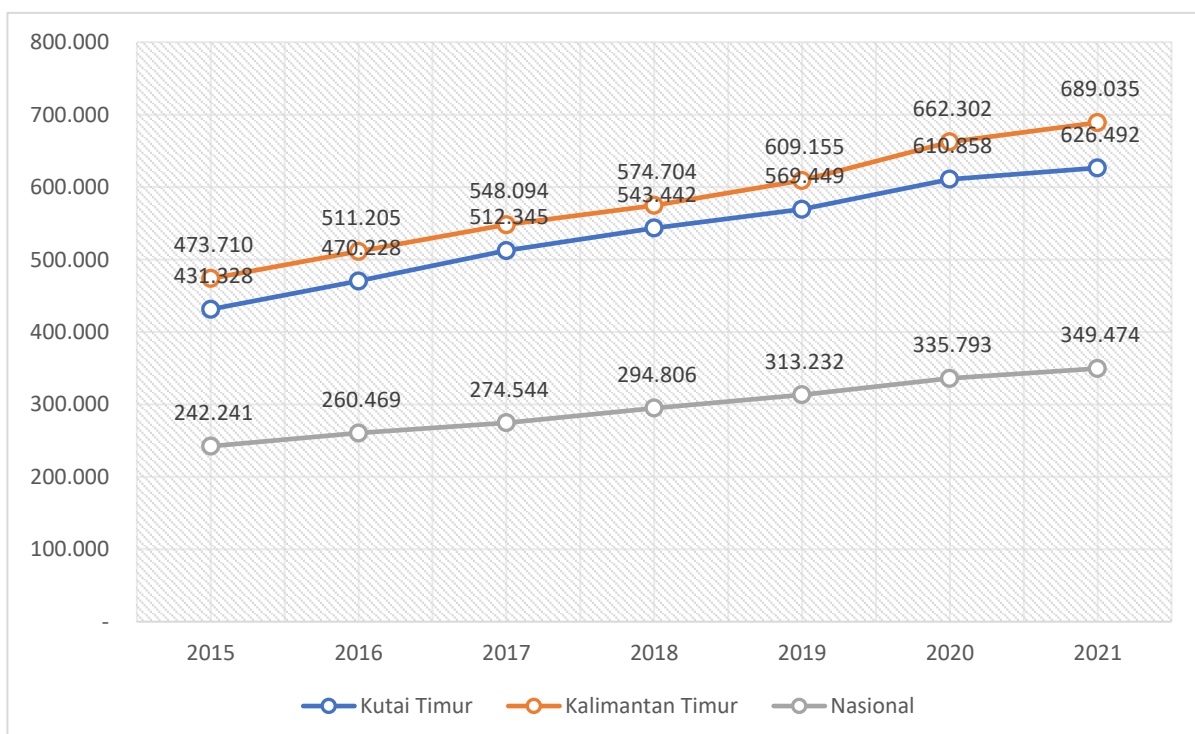


LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Pada tahun 2021, posisi relatif garis kemiskinan Kabupaten Kutai Timur berada pada peringkat 5 tertinggi di Kalimantan Timur dari 10 Kabupaten/Kota. Garis kemiskinan tertinggi adalah Kota Samarinda, kemudian dilanjutkan oleh Kota Bontang, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Berdasarkan Grafik di bawah menunjukkan bahwa perkembangan Garis Kemiskinan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan kecenderungan yang sama yaitu meningkat.

Grafik 16. Analisis Relevansi Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)
Kabupaten Kutai Timur Terhadap Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional
Tahun 2015-2021



Sumber : BPS, 2022

3.3.2 Dimensi Ketenagakerjaan

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tenaga kerja merupakan setiap penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja Bab I pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang

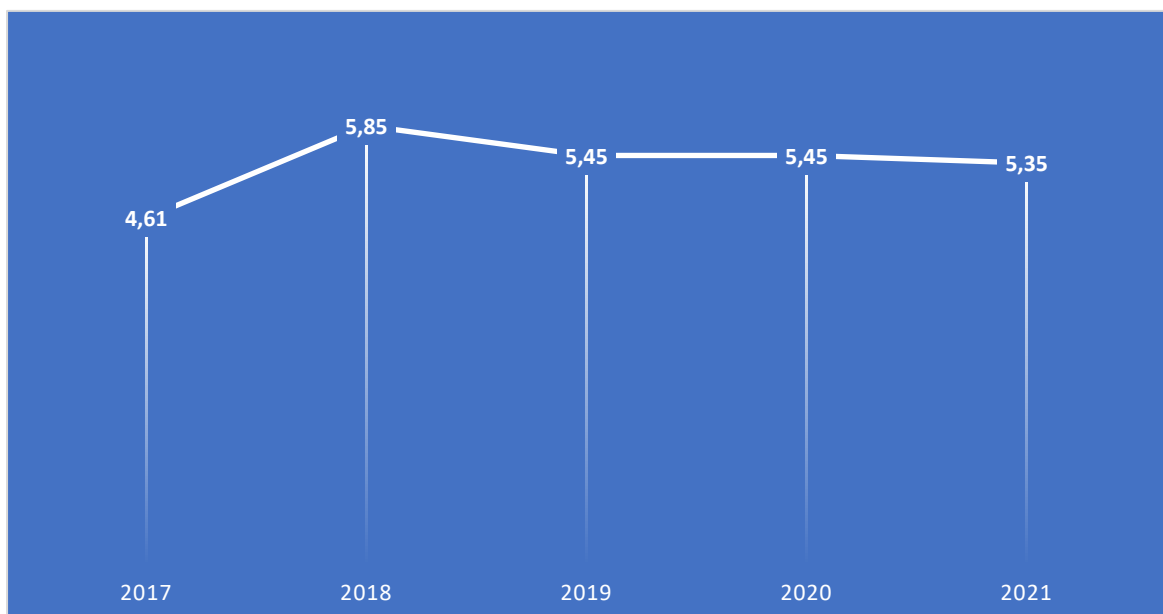


LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Dalam bidang ketenagakerjaan, indikator utamanya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kutai Timur adalah sebagaimana dalam grafik berikut

Grafik 17. Analisis Perkembangan Antar Waktu Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2021



Sumber : BPS, 2022

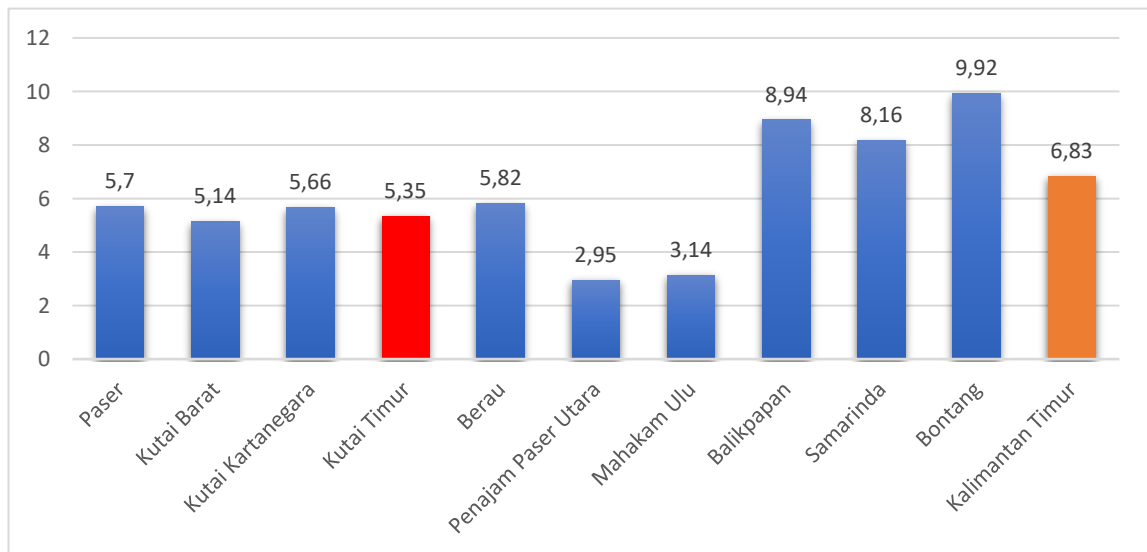
Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa TPT Kabupaten Kutai Timur mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 dengan TPT sebesar 5,35. Hal ini disebabkan karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih sedikit dari pada pencari kerja. Namun perlu diingat bahwa sebagian pencari kerja di Kabupaten Kutai Timur memilih pekerjaan ke luar Kutai Timur, misalkan ke Samarinda, Balikpapan dan kota lainnya, serta ada juga yang merantau ke luar pulau dan/atau luar negeri. Oleh sebab itu perlu peran pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memikirkan hal tersebut, agar di Kabupaten Kutai Timur banyak menyediakan lapangan kerja.



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Sedangkan TPT Kabupaten Kutai Timur tahun 2021 apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, sebagaimana dalam grafik berikut:

Grafik 18. Analisis Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021



Sumber : BPS, 2022

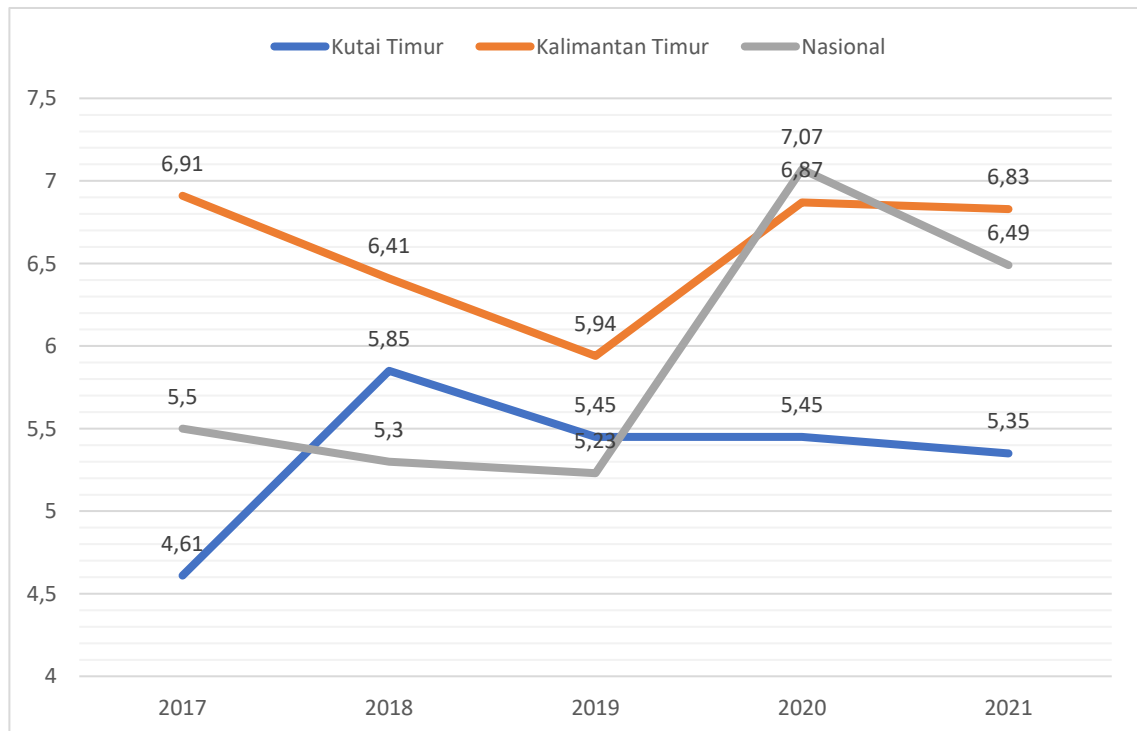
Berdasarkan grafik diatas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kutai Timur berada pada peringkat ke 7 dari 10 Kabupaten/Kota. Di Provinsi Kalimantan Timur, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terendah adalah di Kabupaten Penajam Paser Utara hanya sebesar 2,95% sedangkan TPT tertinggi adalah di Kota Bontang sebesar 9,92%.

Berdasarkan grafik di bawah, diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kutai Timur berada di bawah capaian Provinsi Kalimantan Timur dan di bawah Nasional.



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Grafik 19. Analisis Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kutai Timur terhadap Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : BPS, 2022

Berdasarkan Grafik di atas menunjukkan bahwa perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 fluktuatif dengan menunjukkan kecenderungan menurun. Sedangkan pada Tahun 2020 mengalami peningkatan karena adanya pandemi covid-19 di Indonesia termasuk Provinsi Kalimantan Timur yang berdampak bukan hanya pada masalah kesehatan, melainkan banyak aspek kehidupan lainnya. Salah satunya dalam hal ini berdampak pada aktivitas perekonomian penduduk yang di dalamnya meliputi aktivitas dan dinamika ketenagakerjaan. Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada penambahan penduduk penganggur, melainkan juga pada dinamika aktivitas ketenagakerjaan penduduk usia kerja secara umum. Sementara di provinsi Kalimantan Timur dan Nasional tahun 2021 telah sedikit mengalami penurunan, tetapi justru di Kabupaten Kutai Timur mengalami peningkatan TPTnya. Hal ini



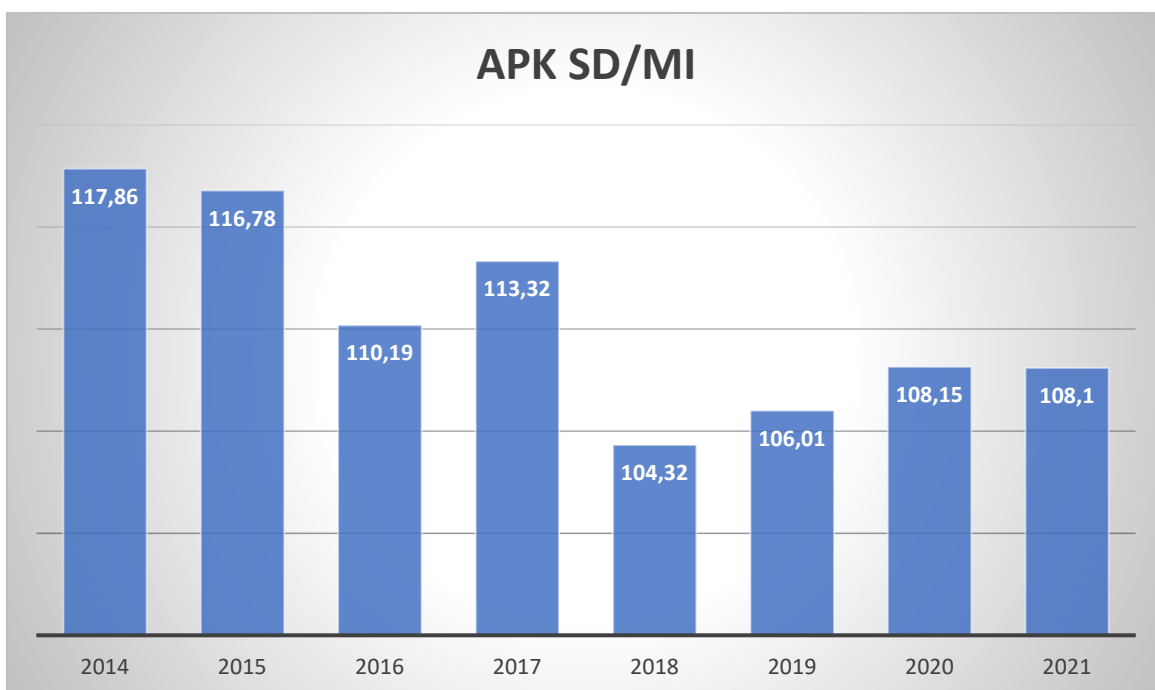
menunjukkan bahwa perekonomian penduduk di wilayah Kutai Timur belum terlalu membaik sehingga berpengaruh terhadap aktivitas dan dinamika ketenagakerjaan.

3.3.3. Dimensi Pendidikan

a. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (APK SD/MI)

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (APK SD/MI) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 sampai dengan 2022 sebagaimana dalam grafik berikut :

Grafik 20. Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017–2021



Sumber : <https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/index.php/>

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2021, APK SD/MI Kabupaten Kutai Timur menunjukkan perkembangan fluktuatif, pada tahun 2014 adalah 117,86 turun menjadi 116,78

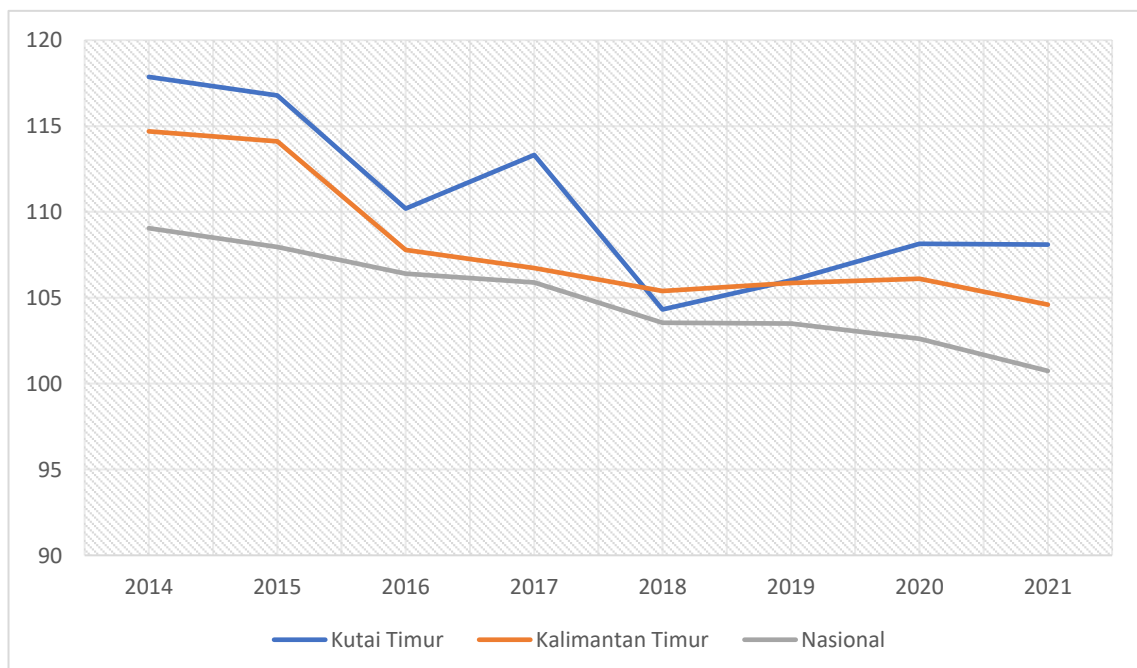


LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

pada tahun 2015. Terendah adalah Tahun 2018 sebesar 104,32. Namun pada Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 108,1. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur yaitu ingin menaikkan APK SD/MI.

Selanjutnya apabila dilihat pada posisi relatif APK SD/MI Kabupaten Kutai Timur yang disandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional adalah sebagai berikut:

Grafik 21. Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Kutai Timur terhadap Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2014-2021



Sumber : <https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>

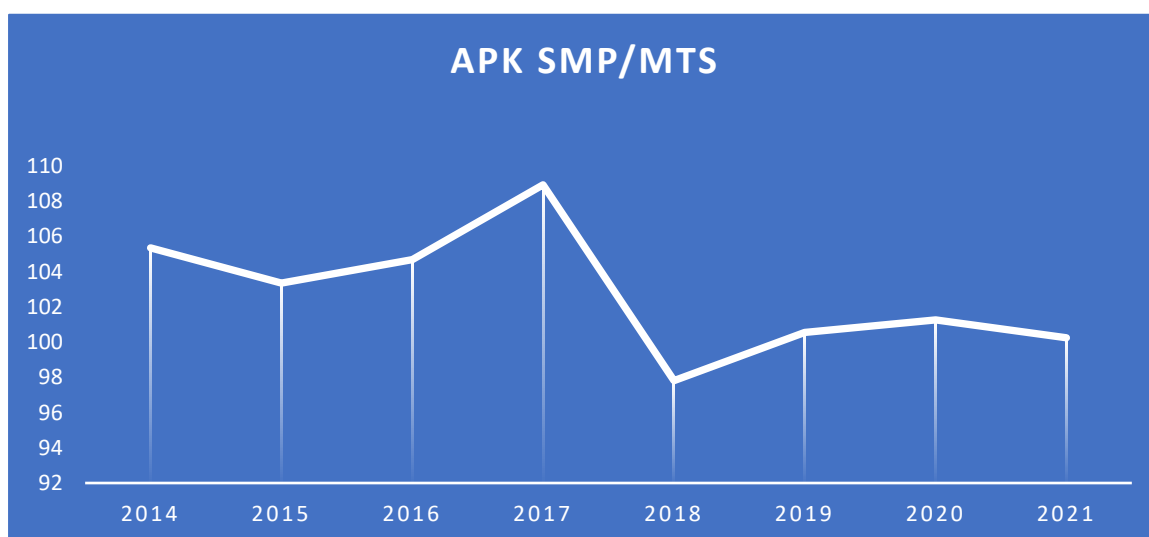
Dari grafik di atas menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam hal pendidikan cukup relevan walaupun perkembangannya fluktuatif dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021, hal ini dapat dilihat dari grafik diatas yang menunjukan APK SD/MI Kabupaten Kutai Timur tahun 2014 sampai dengan 2021 yang menunjukkan tren menurun. Sehingga diperlukan kebijakan yang dapat meningkatkan APK SD/MI di Kabupaten Kutai Timur.



b. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (APK SMP/MTs)

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (APK SMP/MTs) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 sampai dengan 2021 sebagaimana dalam grafik berikut :

Grafik 22. Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014-2021

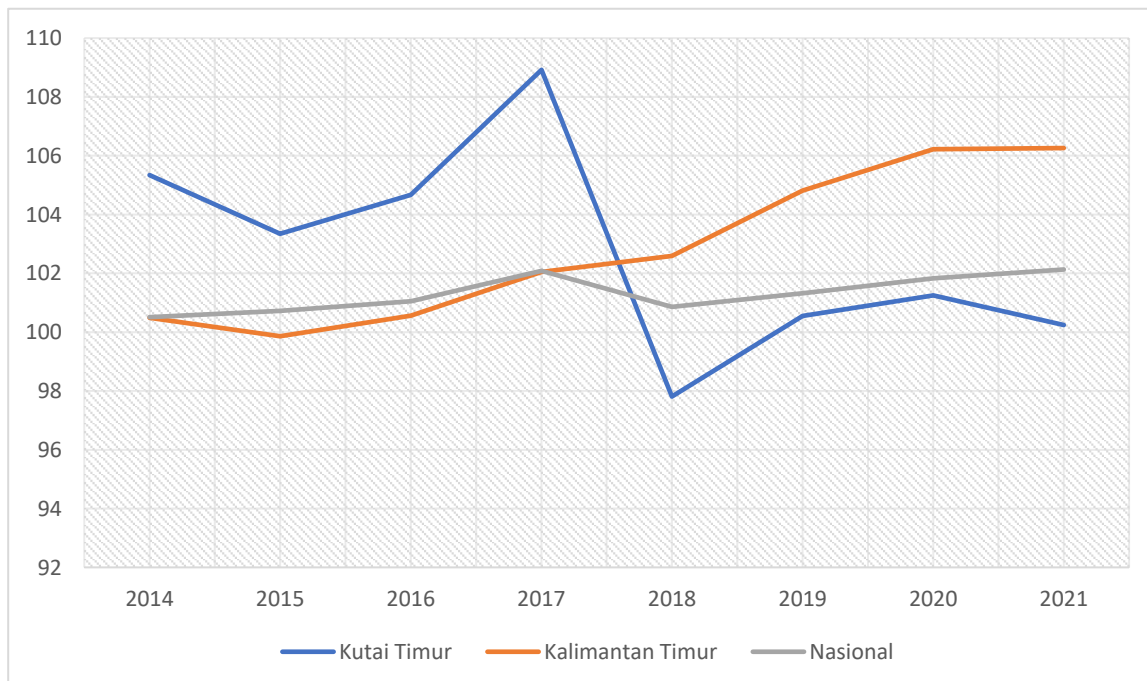


Sumber : <https://apkapm.data.kemdikbud.go.id>

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2021, APK SMP/MTs Kabupaten Kutai Timur menunjukkan kecenderungan turun. Pada tahun 2017 adalah APK tertinggi sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan dan merupakan APK terendah selama kurun waktu 2014-2021.



Grafik 23. Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS Kabupaten Kutai Timur terhadap Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2014-2021



Sumber : <https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>

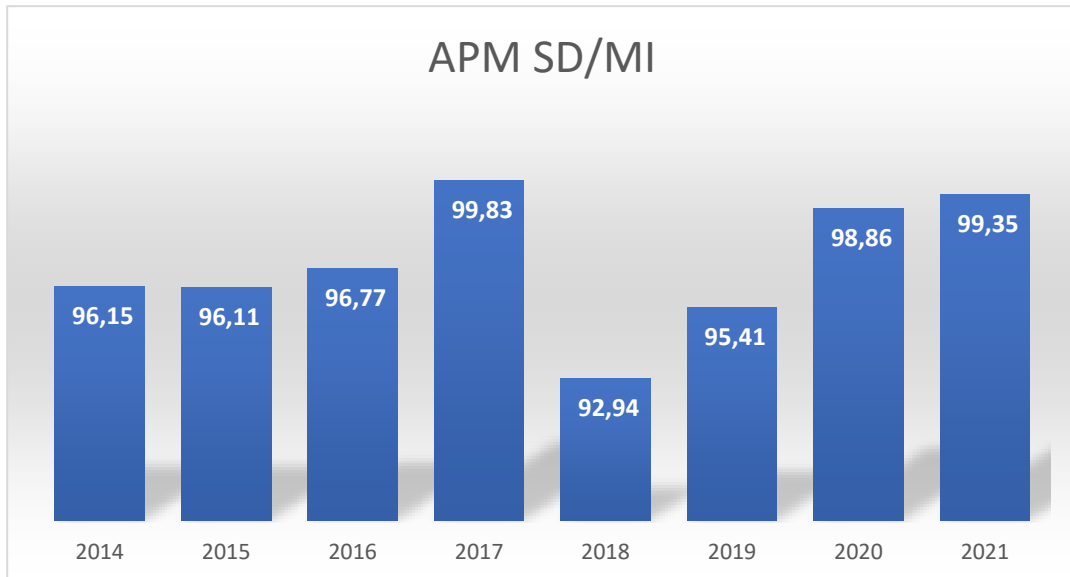
Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa tren perkembangan Angka APK SMP/MTs Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional dari tahun 2014 sampai dengan 2021 menunjukkan kenaikan, sedangkan APK SMP/MTs Kabupaten Kutai Timur menunjukkan penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program peningkatan APK SMP/MTs Kabupaten Kutai Timur belum berjalan sesuai dengan harapan.

c. Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (APM SD/MI)

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Tahun 2014-2021, dapat digambarkan sebagaimana dalam grafik berikut :



Grafik 24. Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014-2021



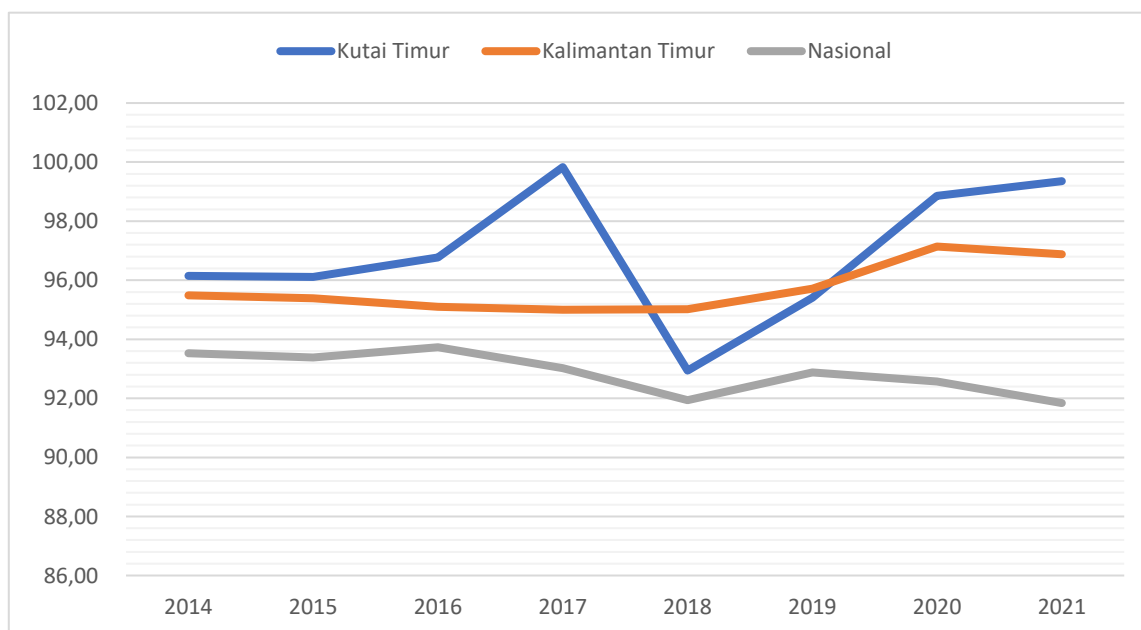
Sumber : <https://apkapm.data.kemdikbud.go.id>

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuatif dan dengan kecenderungan meningkat beberapa tahun ini. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan dengan drastis. APM SD/MI kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 apabila dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional dapat digambarkan sebagaimana dalam grafik berikut :



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Grafik 25. Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
Kabupaten Kutai Timur terhadap Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional
Tahun 2014-2021



Sumber : <https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa perkembangan APM SD/MI Kabupaten Kutai Timur terjadi fluktuatif kenaikan antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 dan sejalan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional tetapi dengan penurunan dan kenaikan yang lebih tajam.

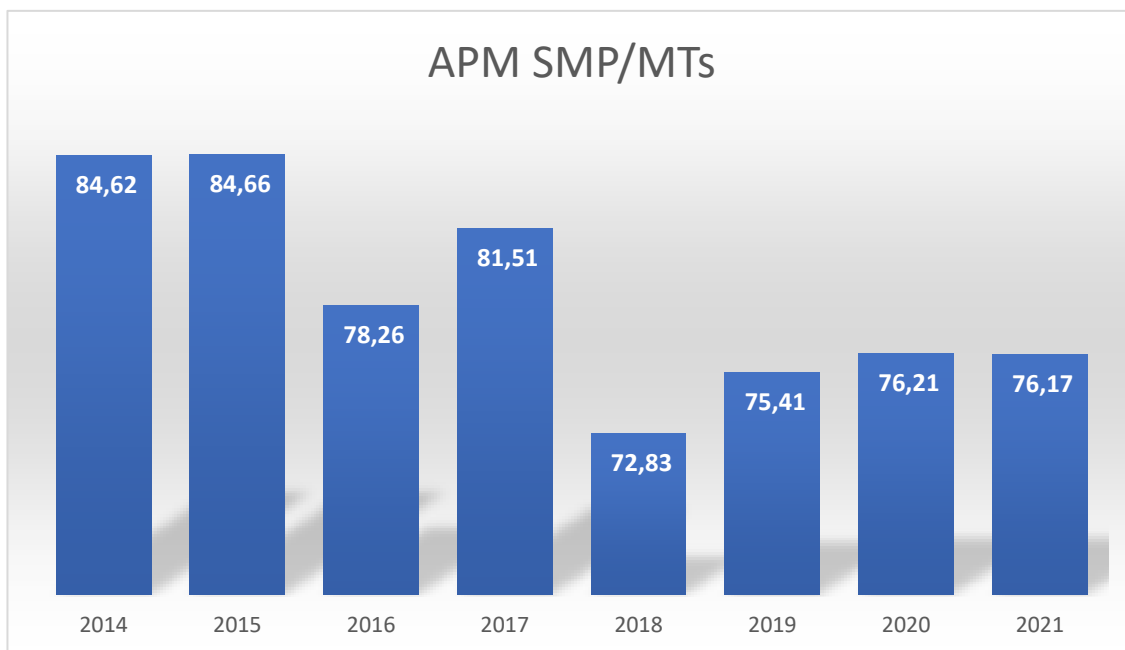
d. Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama/Madarasah Tsanawiyah (APM SMP/MTs)

Perkembangan APM SMP/MTs Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014-2021 sebagaimana dalam grafik berikut :



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Grafik 26. Analisis Perkembangan Antar Waktu Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014-2021



Sumber : <https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>

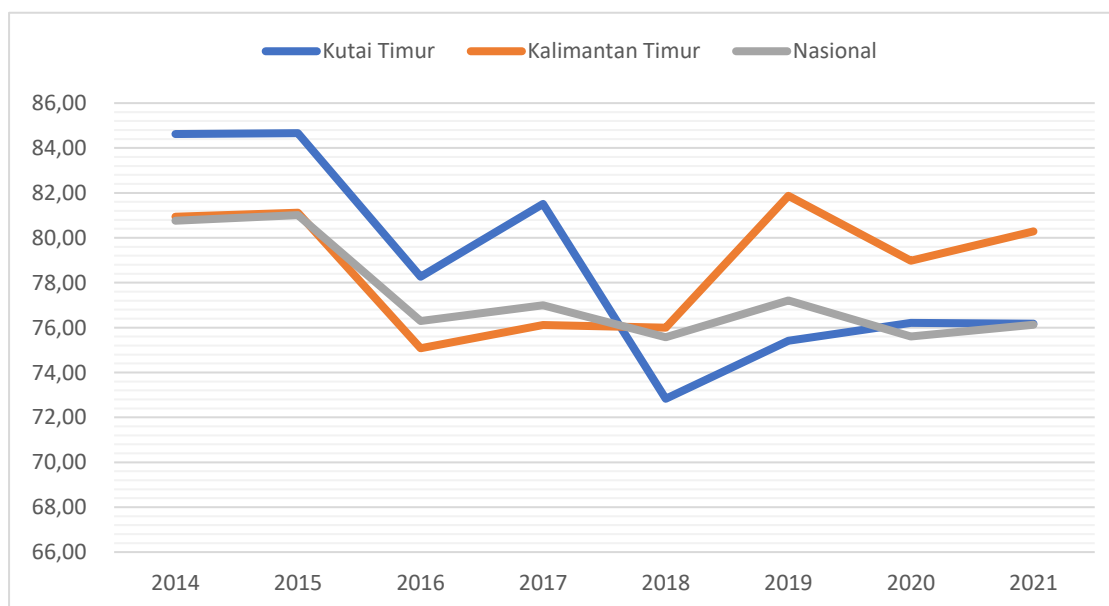
Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa perkembangan APM SMP/MTs Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014-2021 menunjukkan fluktuatif dengan kecenderungan penurunan. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs terendah pada tahun 2018 mencapai hanya 72,83%.

Relevansi pelaksanaan kebijakan dan program peningkatan APM SMP/MTs dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut :



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Grafik 27. Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Kutai Timur terhadap Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2014-2021



Sumber : <https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 cukup fluktuatif naik - turun. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program peningkatan APM SMP/ MTs Kabupaten Kutai Timur berjalan kurang begitu bagus dan harus ditingkatkan lagi.

Tabel 7. Perkembangan nilai APK, APM, dan APtS (SD, SMP) di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	SD sederajat	113.32	104.32	106.01	108.15	108.1
	SMP Sederajat	108.92	97.81	100.55	101.25	100.24
2.	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	SD sederajat	99.83	92.94	95.41	98.86	99.35
	SMP Sederajat	81.51	72.83	75.41	76.21	76.17

Sumber : <https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>



3.3.4 Dimensi Kesehatan

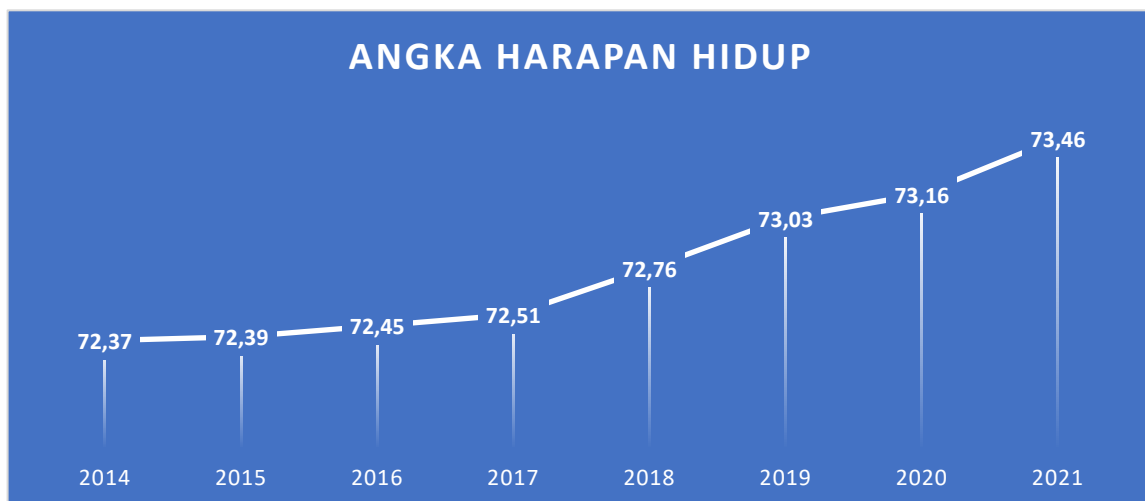
Dalam Bidang kesehatan dapat dijelaskan berdasarkan indikator utamanya adalah sebagai berikut :

a. Umur Harapan Hidup (UHH)

Angka Harapan Hidup ini memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara makro. Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, akan diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup penduduk. Kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Kutai Timur secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata usia harapan hidup yang semakin panjang.

Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2021 sebagaimana dalam grafik berikut :

Grafik 28. Analisis Perkembangan Antar Waktu Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2021



Sumber : BPS, 2022

Berdasarkan grafik di atas, Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kutai Timur naik dari 72,37 pada tahun 2014 menjadi 72,39 di tahun 2015. Selanjutnya



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

terus naik hingga pada tahun 2021 Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Kutai Timur adalah 73,46.

Posisi relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Timur terhadap Kabupaten/Kota lainnya dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2021 telah dirilis oleh BPS digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 8. Analisis Posisi Relatif Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2019-2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Paser	72.05	72.28	72.52	72.62	72.88
Kutai Barat	72.37	72.57	72.79	72.86	73.10
Kutai Kartanegara	71.68	71.93	72.21	72.34	72.64
Kutai Timur	72.51	72.76	73.03	73.16	73.46
Berau	71.44	71.68	71.94	72.06	72.32
Penajam Paser Utara	70.82	71.05	71.30	71.41	71.68
Mahakam Ulu	71.25	71.56	71.90	72.10	72.33
Balikpapan	73.97	74.18	74.41	74.49	74.76
Samarinda	73.71	73.93	74.17	74.27	74.54
Bontang	73.72	73.94	74.18	74.28	74.55
Kalimantan Timur	73.7	73.96	74.22	74.33	74.61

Sumber : BPS, 2022

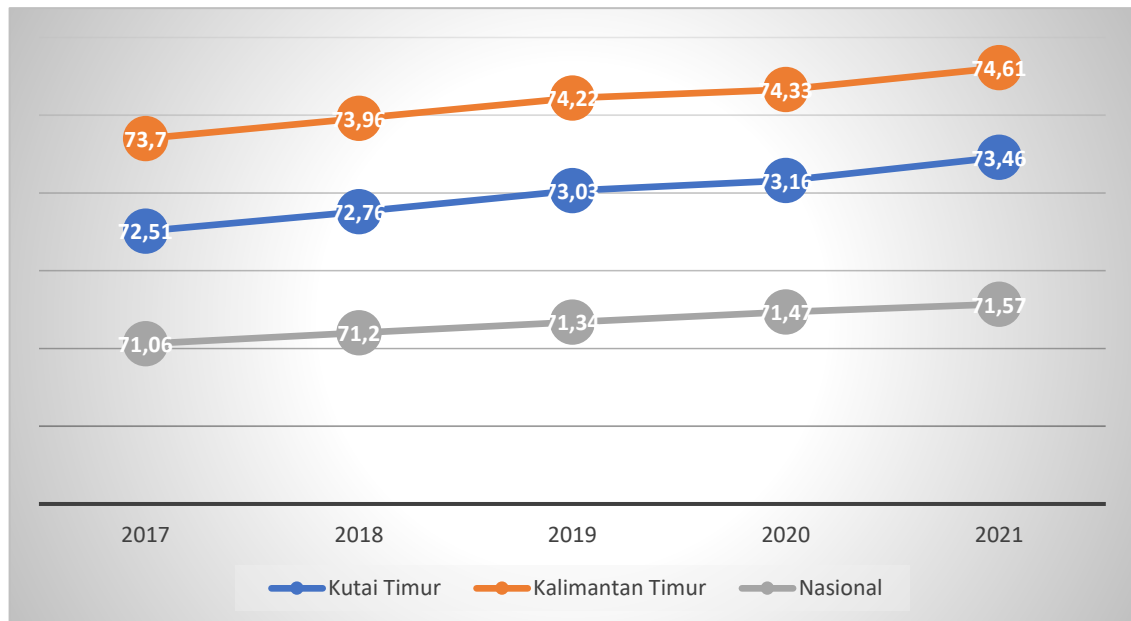
Dari tabel diatas nampak bahwa pada Tahun 2021 posisi relatif Umur Harapan Hidup Kabupaten Kutai Timur berada pada urutan ke-4 dari seluruh wilayah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

Relevansi pelaksanaan kebijakan dan program peningkatan AHH dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut :



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Grafik 29. Analisis Relevansi Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kutai Timur terhadap Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2017-2021



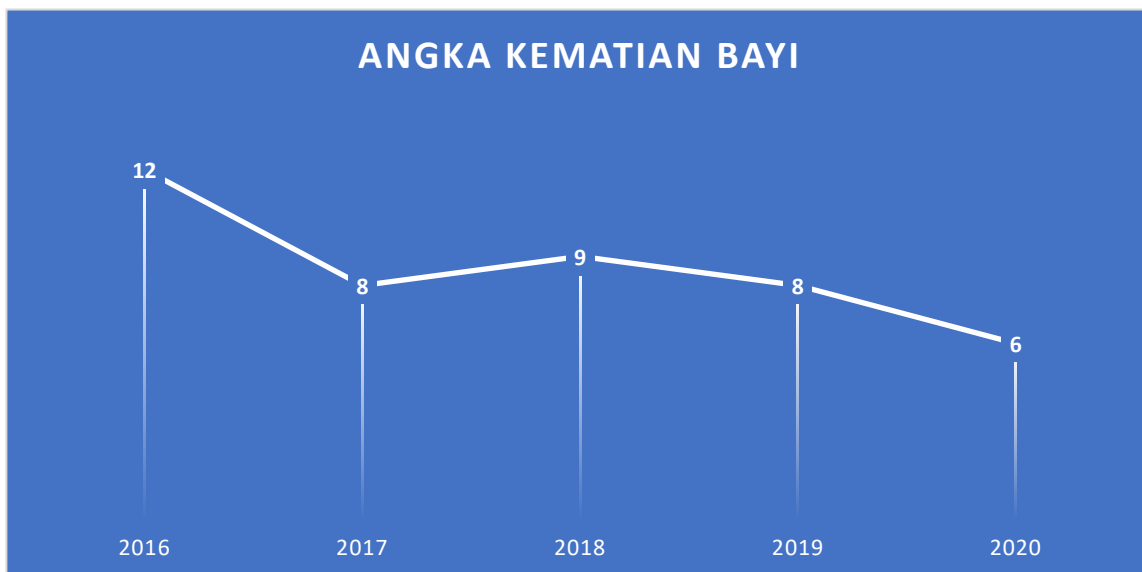
Sumber : BPS, 2022

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa Nilai UHH Kabupaten Kutai Timur tahun 2021 masih berada di atas nilai UHH Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Kenaikan AHH ini menunjukkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu lingkungan, perilaku sehat, pelayanan kesehatan, dan keturunan.

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

Perkembangan AKB di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2017 sampai tahun 2020 terus mengalami penurunan hal ini dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini :

Grafik 30. Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Bayi
(Per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020



Sumber : <https://data.kutaitimurkab.go.id/dataset/angka-kematian-bayi-kabupaten-kutai-timur/resource/ff40a3f6-5e3c-4dcf-9267-b261b285bba9>

Berdasarkan grafik diatas, diketahui bahwa Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2016-2020 cenderung menurun, dimana pada tahun 2016 sebesar 12 per 1.000 kelahiran dan tahun 2020 turun menjadi 6 per 1.000 kelahiran.

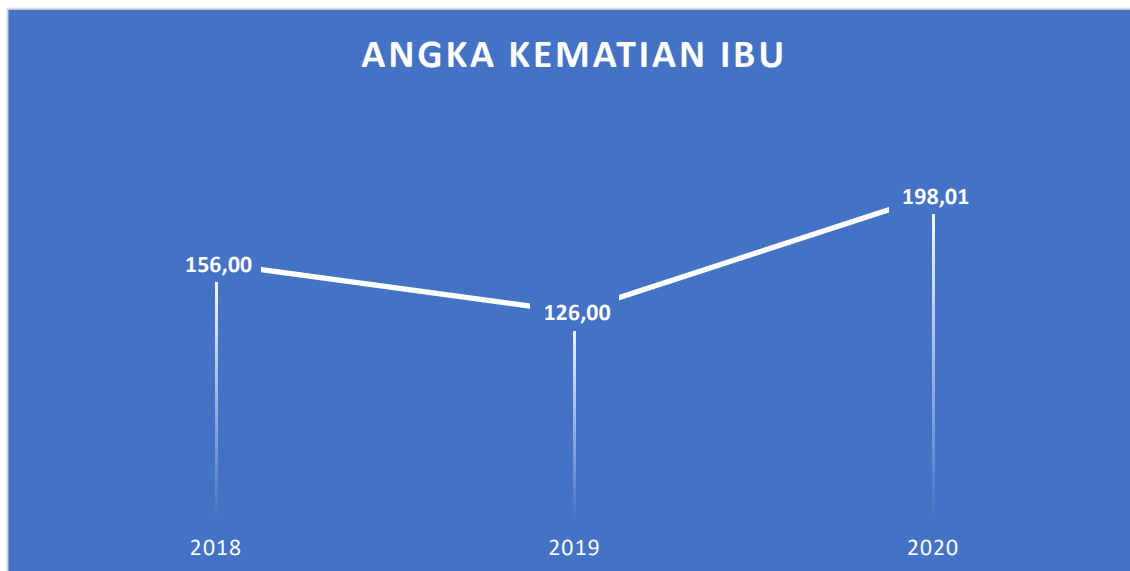
Masih adanya kasus kematian bayi tersebut disebabkan belum semua persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompeten kebidanan, belum semua bayi memperoleh pelayanan neonatal (0-28 hari) secara memadai serta adanya penyakit lain yang dapat menyebabkan kematian pada bayi. Penurunan angka kematian bayi ini tidak terlepas dari pembinaan dan pelatihan petugas, monitoring dan evaluasi, supervisi ke tempat pelayanan serta kesadaran masyarakat yang semakin meningkat tentang pola hidup yang sehat.

c. Angka Kematian Ibu (AKI)

Perkembangan Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2020 menunjukkan trend yang fluktuatif sebagaimana dalam grafik berikut :



Grafik 31. Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2020



Sumber : <https://data.kutaitimurkab.go.id/dataset/angka-kematian-ibu-aki-di-kabupaten-kutai-timur>

Berdasarkan grafik di atas, diketahui Angka Kematian Ibu mengalami kenaikan dari tahun 2018-2020. Pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018 menjadi sebesar 126,0. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2019 menjadi sebesar 198,01. Hal ini disebabkan dengan adanya pandemi covid-19, dimana ibu hamil yang seharusnya melakukan pemeriksaan rutin menjadi tertunda sehubungan dengan upaya untuk mengurangi penyebaran covid-19 dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Level. Selain itu juga bahwa peningkatan angka kematian ibu hamil di tahun 2020 juga disebabkan oleh virus corona yang dan penyakit penyerta yang dimiliki oleh ibu hamil tersebut.

d. Angka Prevalensi Balita Stunting

Perkembangan Angka Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Kutai Timur per puskesmas dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Tabel 8. Analisis Angka Prevalensi Balita Stunting Per Puskesmas di
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020

Kecamatan	Puskesmas	Prevalensi
Batu Ampar	Batu Ampar	12.32
Bengalon	Sepaso	13.19
Bengalon	Tepian Baru	8.39
Busang	Busang	15.21
Kaliorang	Kaliorang	5.54
Karangan	Karangan	3.67
Kaubun	Kaubun	8
Kongbeng	Kongbeng	5.39
Long Mesangat	Long Mesangat	9.07
Muara Ancalong	Muara Ancalong	9.89
Muara Bengkal	Muara Bengkal	16.37
Muara Wahau	Muara Wahau 1	0.62
Muara Wahau	Muara Wahau 2	9.95
Rantau Pulung	Rantau Pulung	4.18
Sandaran	Sandaran	2.53
Sangatta Selatan	Sangatta Selatan	3.16
Sangatta Utara	Sangatta Utara	4.51
Sangatta Utara	Teluk Lingga	1.09
Sangkulirang	Sangkulirang	6.97
Telen	Telen	0.13
Teluk Pandan	Teluk Pandan	17.58

Sumber : <https://data.kutaitimurkab.go.id/dataset/prevalensi-stunting-menurut-wilayah-kerja-puskesmas-di-kabupaten-kutai-timur/resource/77616c10-019d-43d0-9ec1-ec75935819a9>

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa prevalensi balita stunting tertinggi dari puskesmas di kecamatan Teluk Pandan yaitu sebesar 17,58 persen. Sedangkan tertinggi kedua adalah berasal dari Puskesmas Muara Bengkal dan yang ketiga berasal dari Puskesmas dari kecamatan Busang. Sehubungan dengan adanya Pandemi Covid-19 tidak semua balita dapat diukur tinggi badannya di Posyandu pada tahun 2020.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur guna menurunkan angka stunting melalui perbaikan gizi di masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), antara lain dengan semakin gencarnya sosialisasi



ASI-Eksklusif, pendidikan gizi untuk ibu hamil, pemberian TTD untuk ibu hamil, IMD, Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA), pemberian mikro nutrien (taburia), sosialisasi GEMARIKAN, program penyehatan lingkungan, penyediaan, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi. Serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan melakukan sinergi bersama lintas sector dan telah melaksanakan 8 aksi konvergensi penurunan dan pencegahan stunting.

e. Angka Prevalensi Balita Gizi Buruk

Perkembangan prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini

Grafik 32. Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019-2020



Sumber : <https://data.kutaitimurkab.go.id/>

Berdasarkan grafik di atas diketahui prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Kutai Timur terlihat meningkat dari tahun 2019-2020. Pada tahun 2019 nilai pravelensi balita gizi buruk menunjukkan angka 0,12 persen dan pada tahun 2020 menunjukkan angka 0,21 persen. Menurunnya persentase prevalensi balita gizi buruk ini tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

balita. Faktor tersebut antara lain : tingkat pendidikan keluarga, pola makan, ekonomi, kondisi kesehatan keluarga. Sehingga perlu adanya kerja sama lintas sektor agar isu utama penyebab gizi buruk tersebut dapat diatasi.

Tabel 9. Perkembangan Indikator Kesehatan di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2018-2021

No	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	9	8	6	-
2	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	156	126	198,01	-
3	Prevalensi Balita Gizi Buruk		0,12	0,21	-
4	Prevalensi Balita Stunting	-	-	-	-
5	Umur Harapan Hidup (UHH)	72,76	73,03	73,16	73,46

Sumber : data.kutimkab.go.id/bps.go.id

3.3.5 Dimensi Prasarana Dasar

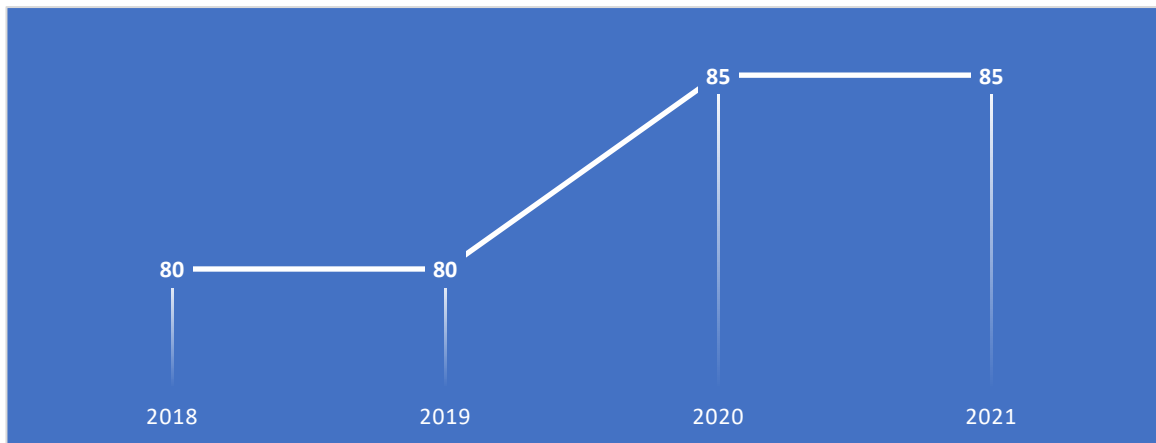
a. Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

Perkembangan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Kutai Timur tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebagaimana grafik berikut :



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Grafik 33. Analisis Perkembangan Antar Waktu Persentase Rumah
Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2018-2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Timur, 2021

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan perkembangan tren naik. Namun pada tahun 2021 mengalami stagnan, yaitu sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa ajakan pemerintah daerah agar melakukan kebiasaan hidup sehat yang di mulai pada lingkungan rumah perlu ditingkatkan lagi.

Posisi relatif persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak Kabupaten Kutai Timur terhadap Kabupaten/Kota lainnya dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2021 telah dirilis oleh BPS digambarkan dalam tabel berikut:



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Tabel 10. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/ Bersama Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Air Layak	Jamban Sendiri/ Bersama
1	Paser	42,88	87,19
2	Kutai Barat	57,53	93,24
3	Kutai Kartanegara	57,30	98,24
4	Kutai Timur	52,12	63,70
5	Berau	79,61	92,19
6	Penajam Paser Utara	58,76	100,00
7	Mahakam Hulu	71,42	92,98
8	Kota Balikpapan	100,00	92,85
9	Kota Samarinda	86,57	100,00
10	Kota Bontang	100,00	100,00
	Kalimantan Timur	65,68	91,08

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota, 2021

Rumah tangga pengguna air layak adalah rumah tangga miskin yang menggunakan sumber utama air minum dari air tidak sustain (air hujan), air terlindung maupun tidak terlindung dengan syarat sumber mandi/cuci/dll yang digunakan berasal dari air terlindung. Rumah tangga pengguna jamban sendiri/bersama adalah rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat pembuangan air besar yang digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu.

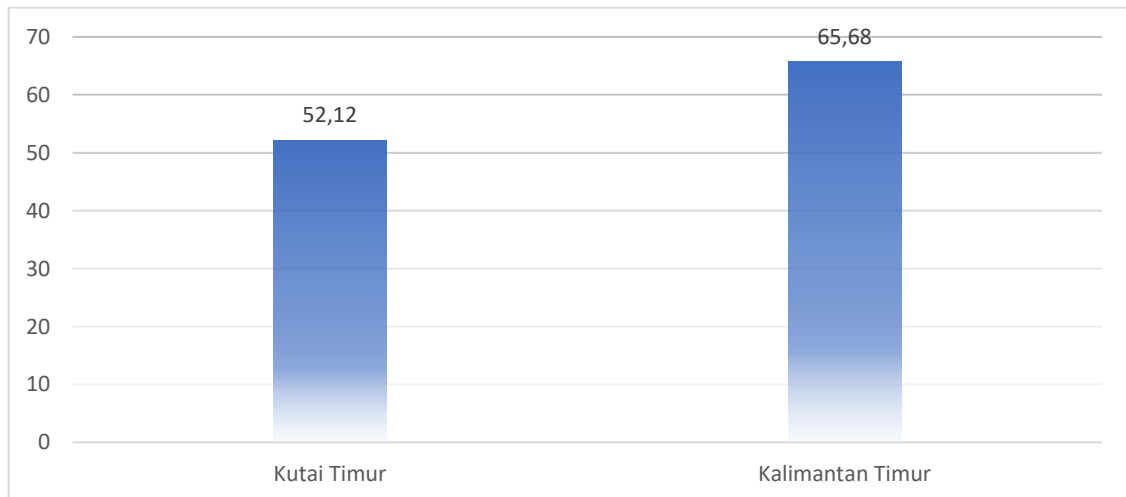
Dari tabel diatas nampak bahwa pada Tahun 2021 posisi relatif Persentase Rumah Tangga Miskin yang menggunakan Air Layak berada pada urutan ke- 9 dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada se-Kalimantan Timur. Sedangkan penggunaan jamban sendiri/bersama oleh rumah tangga miskin di Kabupaten Kutai Timur berada pada urutan ke-10 dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada se-Kalimantan Timur.

Untuk melihat kebijakan pemerintah daerah dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat, berikut ini adalah grafik relevansi Persentase Rumah Tangga Miskin yang menggunakan Air Layak dan penggunaan jamban sendiri/bersama di Kabupaten Kutai Timur yang disandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur.



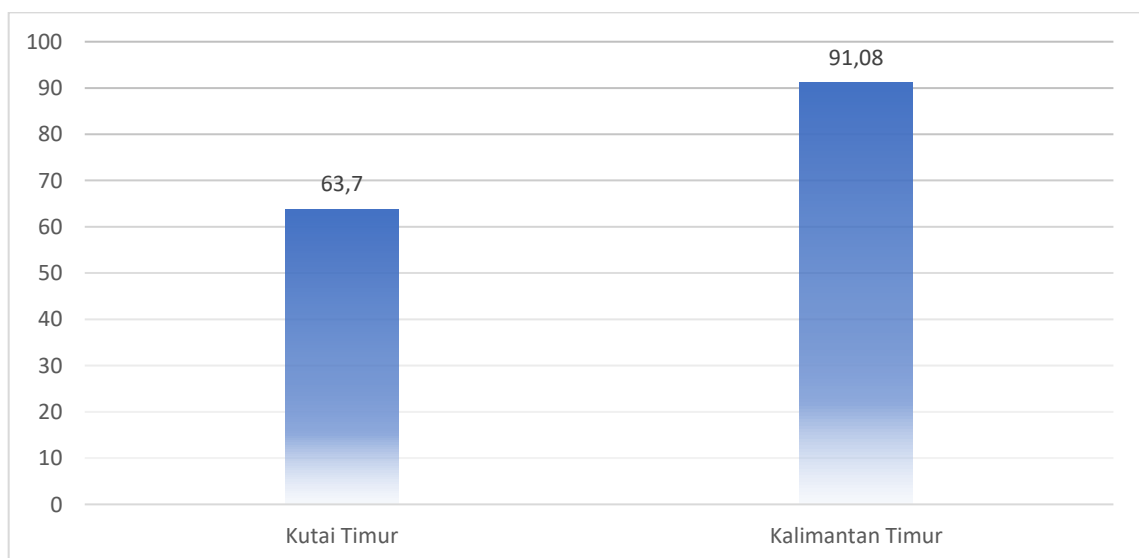
LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Grafik 34. Analisis Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak di Kabupaten Kutai Timur dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021



Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota, 2021

Grafik 35. Analisis Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama di Kabupaten Kutai Timur dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021



Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota, 2021

3.3.6 Dimensi Ketahanan Pangan

a. Beras

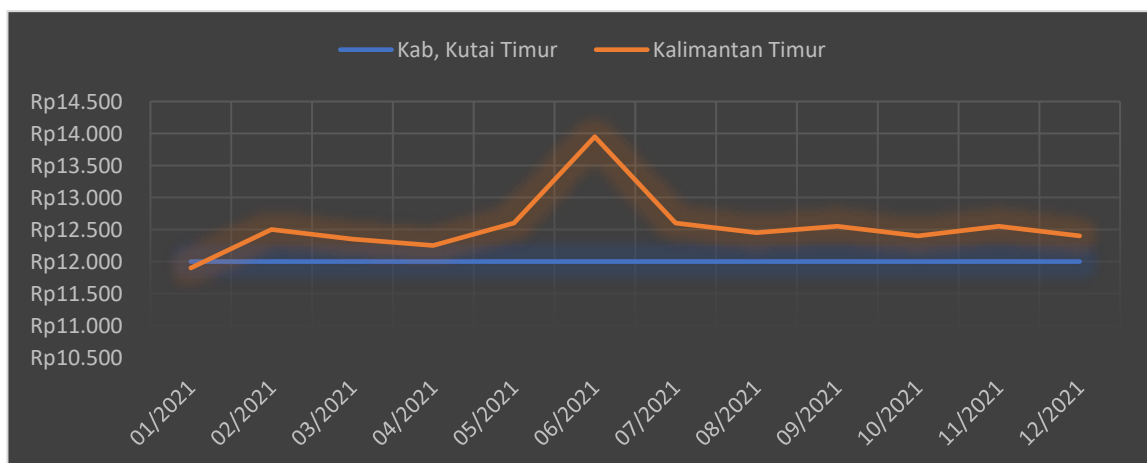
Beras adalah salah satu produk makanan pokok paling penting di Indonesia, di Kabupaten Kutai Timur sendiri beras merupakan komoditi yang



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

sangat penting untuk kelangsungan hidup. Petani di Kutai Timur setiap tahunnya selalu menanam komoditas padi. Harga beras di Kabupaten Kutai Timur sangatlah bervariasi di setiap tahunnya walaupun sudah dilakukan operasi pasar. Adapun Perkembangan harga beras di Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2021 periode bulanan adalah sebagaimana dalam grafik berikut :

Grafik 36. Perkembangan Harga Beras (Rp/Kg) Bulanan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021



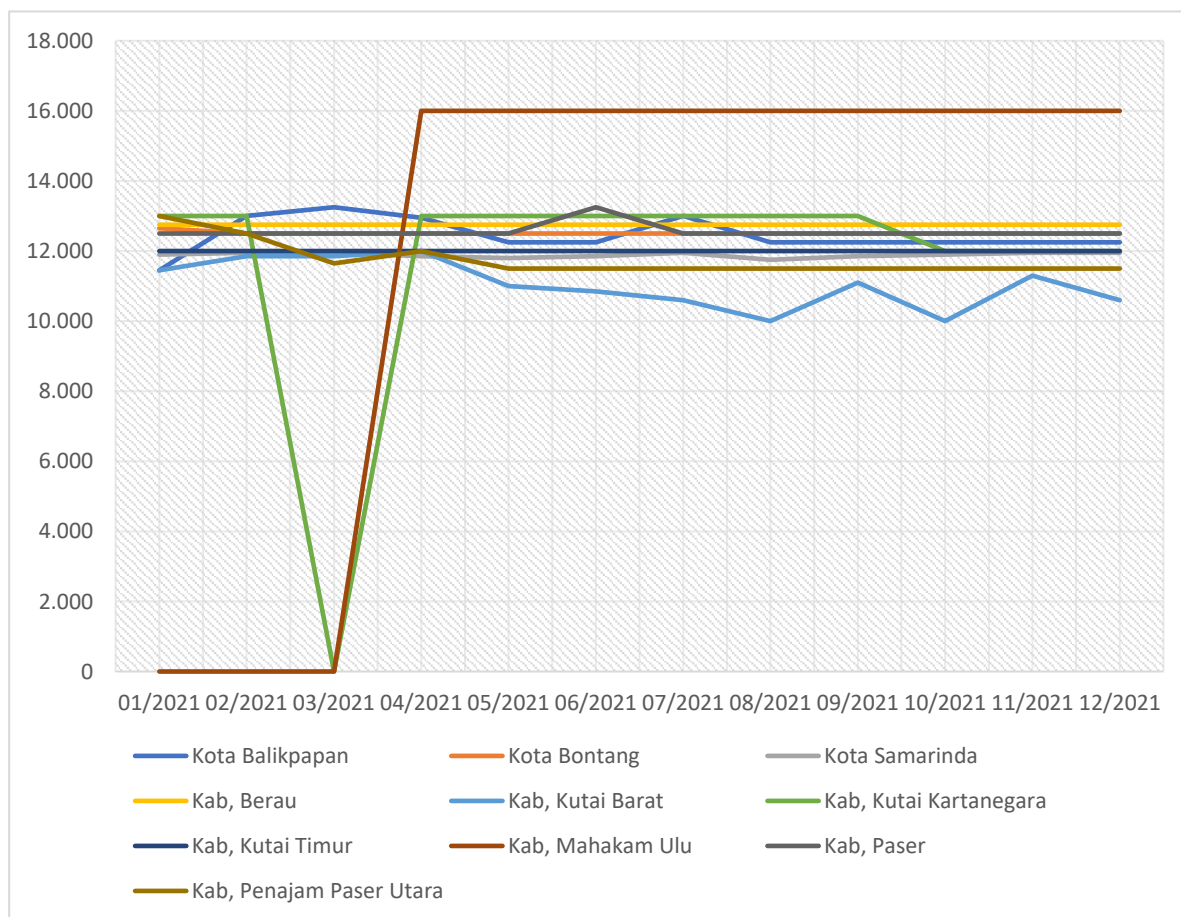
Sumber : <https://hargapangan.laminetam.id/tabel-harga/komoditas>

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa perkembangan harga beras di Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2021 menunjukkan relatif stabil dibawah harga beras Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa program beras murah yang digalakkan oleh pemerintah pusat sudah berjalan sesuai dengan harapan. Namun perlu diingat juga bahwa petani yang menanam padi juga perlu perhatian serius, mengingat petani yang menanam padi jumlahnya menurun. Hal ini disebabkan harga jual gabah yang tidak sesuai harga pasar, dan harga pupuk serta pestisida yang semakin melejit. Sehingga banyak petani yang beralih menanam tanaman lainnya yang dinilai sangat menjanjikan.



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Grafik 37. Perkembangan Harga Beras (Rp/Kg) Bulanan di Kabupaten
se Kalimantan Timur Tahun 2021



Sumber : <https://hargapangan.laminetam.id>

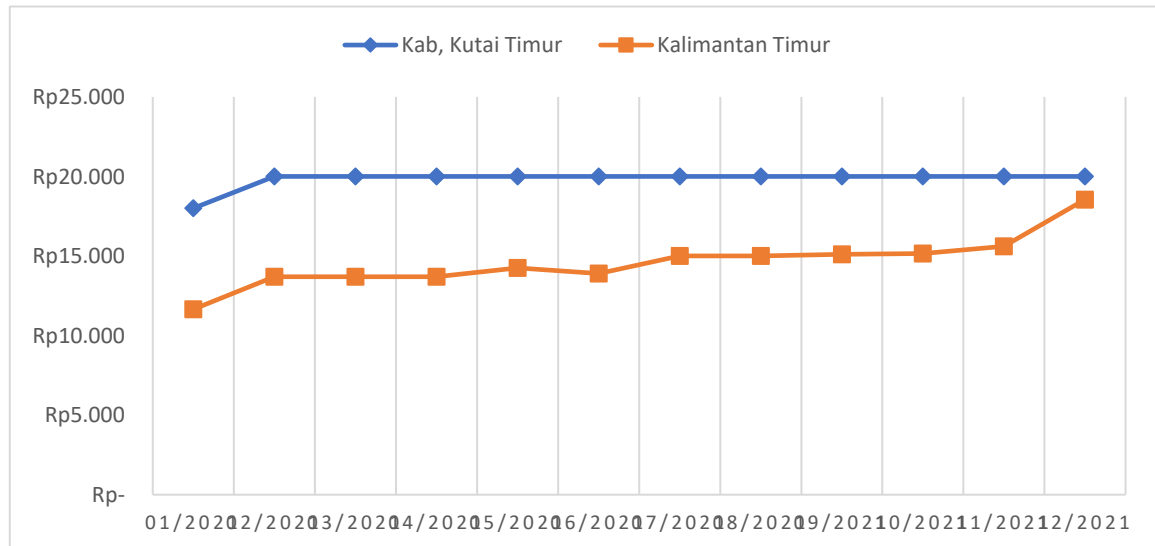
b. Minyak Goreng Kemasan

Perkembangan harga minyak goreng kemasan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 sampai dengan 2021, sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut :



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Grafik 38. Perkembangan Harga Minyak Goreng Kemasan (Rp/liter)
Bulanan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021



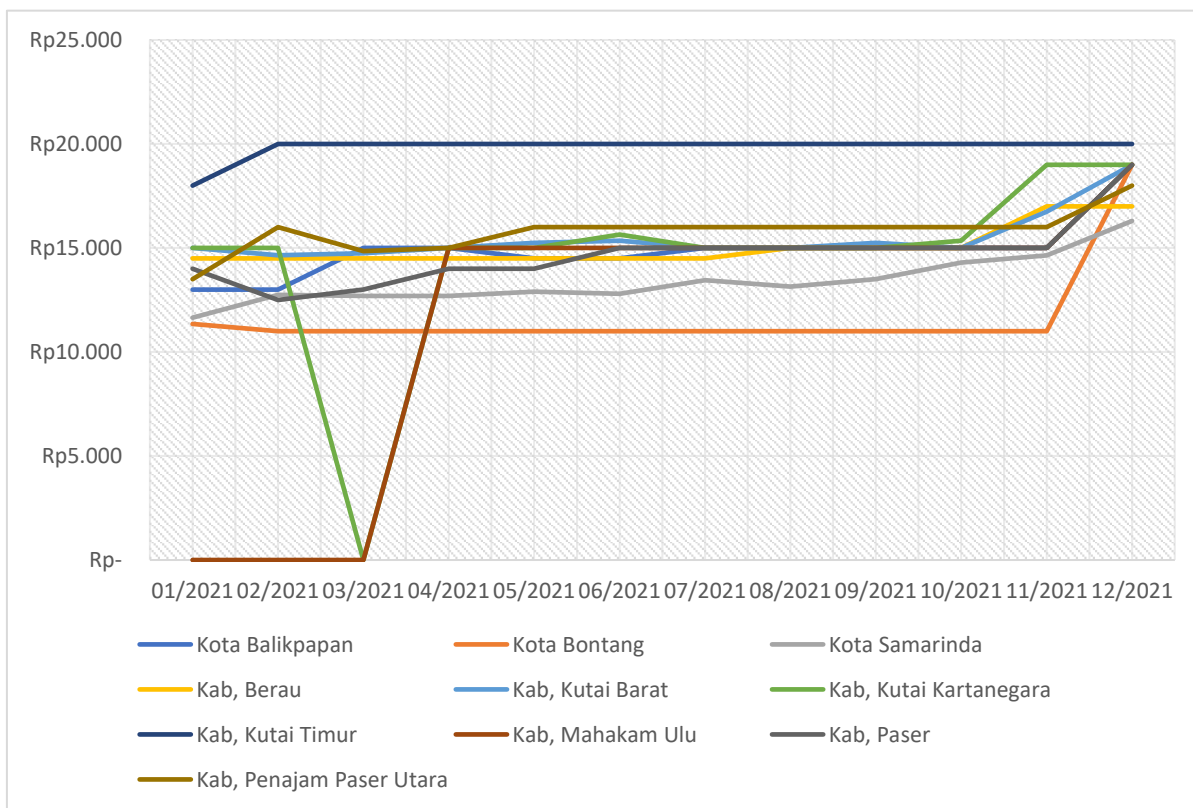
Sumber : <https://hargapangan.laminetam.id>

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa harga minyak goreng kemasan di Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2021 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, dimulai dari harga yang terendah yaitu pada bulan Januari tahun 2021 minyak kemasan berkisar pada harga Rp. 18.000,- / liter, di bulan-bulan berikutnya harganya stabil pada harga Rp. 20.000,- per liter. Dengan adanya hal tersebut pemerintah berupaya untuk menurunkan dan menekan harga minyak goreng tersebut dengan cara melaksanakan operasi pasar, sehingga dengan adanya operasi pasar tersebut sangat berdampak bagi masyarakat terutama mereka yang berada di ekonomi menengah kebawah dan para pelaku UMKM.



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Grafik 39. Perkembangan Harga Minyak Goreng Kemasan (Rp/liter) Bulanan di Kabupaten se Kalimantan Timur Tahun 2021



Sumber : <https://hargapangan.laminetam.id>

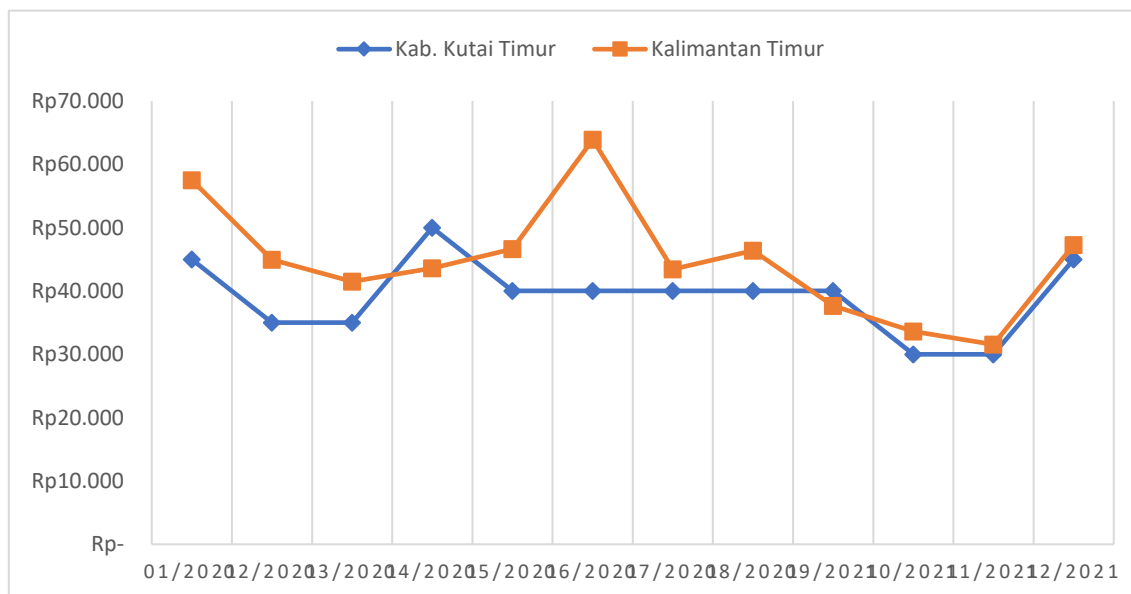
c. Cabe Merah Besar

Perkembangan harga cabe besar di Kabupaten Kutai Timur, tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebagaimana dalam grafik berikut :



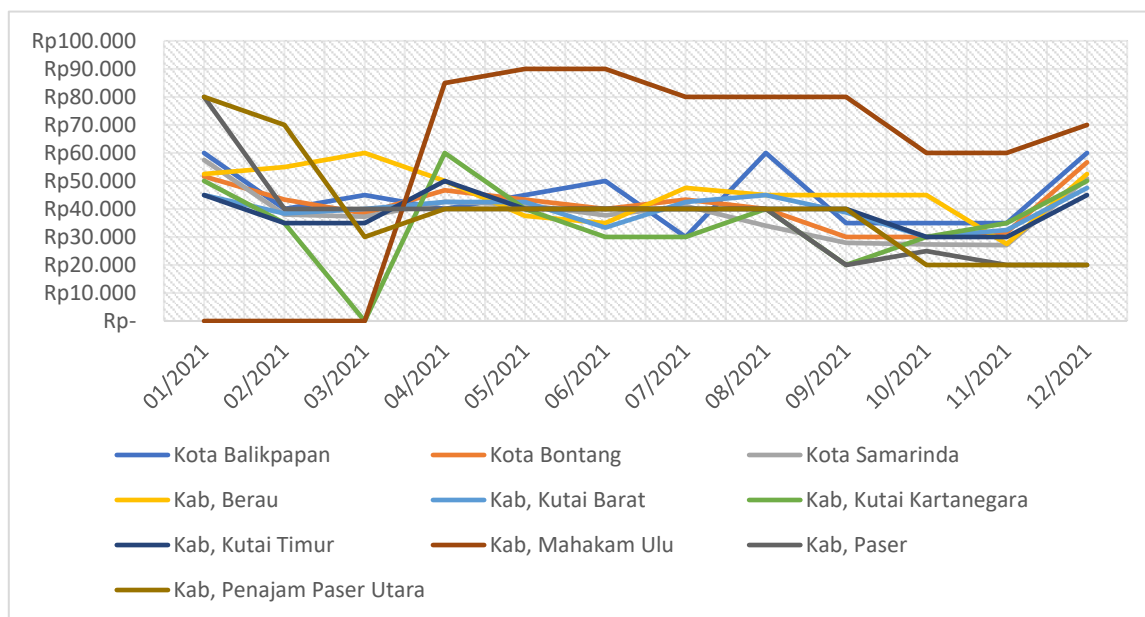
LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Grafik 40. Perkembangan Harga Cabe Merah Besar (Rp/kg) Bulanan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021



Sumber : <https://hargapangan.laminetam.id>

Grafik 41. Perkembangan Harga Cabe Merah Besar (Rp/kg) Bulanan di Kabupaten se Kalimantan Timur Tahun 2021



Sumber : <https://hargapangan.laminetam.id>



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa perkembangan harga cabe merah besar di Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2021 terjadi fluktuatif dengan kecenderungan turun. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program stabilitasi harga cabe merah besar di Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2021 berjalan cukup efektif. Kenaikan harga cabe terjadi karena siklus musiman dan tergantung dari masa panen. Namun bila harga cabe merah besar tersebut terus naik dikhawatirkan akan berdampak pada harga bahan pokok lainnya seperti beras, minyak goreng, dan komoditi lainnya. Tercatat pada tahun 2021 Harga cabai merah besar mengalami kenaikan pada bulan April 2021 dan Desember 2021, yaitu pada saat hari raya idul fitri dan natal.

3.4. PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3.4.1 PROGRAM PEMERINTAH

Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur, pada tahun 2021 diprioritaskan pada bidang ketenagakerjaan, bidang pendidikan, bidang Kesehatan, infrastruktur dasar, dan bidang ketahanan pangan.

Tabel 11. Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

SASARAN JANGKA MENENGAH	PROGRAM	Indikator	Satuan	Target	Kondisi	
					2020	2021
Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketenagakerjaan						
MENINGKATKAN DAYA SAING DAN KOMPETENSI TENAGA KERJA	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Memiliki Keterampilan/ Kompetensi	%	70	65	69



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

SASARAN JANGKA MENENGAH	PROGRAM	Indikator	Satuan	Target	Kondisi	
					2020	2021
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja	%	35.45	30.62	30.62
	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Layak (PP/PKB, LKS Bipartis, Struktur Upah Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	75.99	75.99
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah UMKM		7,242	6,105	9,627
	Program Pengembangan UMKM	Jumlah UMKM yang Difasilitasi		50	15	114
Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan						
Meningkatnya Akses Anak Usia Sekolah ke Layanan Pendidikan Terdekat	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)		12.9	12.89	12.89
		Rata - Rata Lama Sekolah		9.2	9.19	9.19
Meningkatnya Layanan Pendidikan Anak Usia Dini		Rasio ketersediaan SD/ MI per penduduk		53.16	56.46	56.46
		Rasio ketersediaan SMP/ MTS per penduduk		53.16	53.06	53.06
Meningkatnya Literasi Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Koleksi Judul Agama, Budaya, Sosial Diperpustakaan	%	73	70	70
Meningkatnya Akses Anak Usia Sekolah ke Layanan Pendidikan Terdekat		Jumlah Rata Rata Pengunjung		720	18	19
		Perpustakaan /Tahun				
Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan						



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

SASARAN JANGKA MENENGAH	PROGRAM	Indikator	Satuan	Target	Kondisi	
					2020	2021
Meningkatnya Layanan Kesehatan Dasar Bagi Bayi dan Balita	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Kelahiran Total (Total Fertilitaty Rate/TRF)		2.11	2	2
Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana						
Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana						
Meningkatnya Layanan Kesehatan Dasar Bagi Ibu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	100	56	95
		Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		0.51	0.51	0.51
Meningkatnya Pengendalian dan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk		0.02	0.02	0.02
Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar						
Meningkatnya Akses Sanitasi Berbasis Rumah Tangga	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	62.28	45.03	45.03
		Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum)	%	20.55	0.13	0.15
		Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kabupaten Yang Ditangani	%	30.67	30.67	30.67
Meningkatnya Akses Air Minum Berbasis Rumah Tangga	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Capaian Akses Air Minum Layak	%	53.81	43.43	48.7
Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan						
Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan	Ketersediaan Pangan Utama		44.16	43.66	43.66
		Nilai Tukar Petani (NTP)		108.6	111.9	109.7



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

SASARAN JANGKA MENENGAH	PROGRAM	Indikator	Satuan	Target	Kondisi	
					2020	2021
Masyarakat	Pangan Masyarakat	Penguatan Cadangan Pangan		72	70	70
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		90.6	89.4	89.4
	Pengawasan Keamanan Pangan		%	95	95	95
Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Sosial						
Meningkatnya Layanan Kesehatan Dasar Bagi Bayi dan Balita	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	%	14.09	15.09	15.09
Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana						

1. Program Penanggulangan Stunting

Program penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dengan program yang harus dilakukan dalam upaya menghilangkan kasus stunting. Dengan demikian, kegiatan penghilangan kasus stunting harus bersinergi dengan program dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Adapun upaya pemerintah daerah dalam menurunkan stunting pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS)
2. Pemberian Tablet Tambah Darah Bagi Remaja Putri dan Ibu Hamil
3. Pemberian Bimbingan bagi Calon Pengantin
4. Pemberian Bimbingan bagi Ibu Hamil
5. Pemberian Vitamin A bagi Balita di Bulan Timbang (Februari dan Agustus)
6. Peningkatan akses terhadap sanitasi dan air bersih (Pemberian Septitank, Spamdes dan Pamsimas)
7. Audit Kasus Stunting



8. Memperkuat intervensi gizi spesifik (sektor kesehatan) dan intervensi gizi Sensitive (non sector kesehatan)
9. Monev oleh petugas kesehatan saat pelaksanaan kegiatan di posyandu terutama pada saat operasi timbang
10. Monev oleh TPPS Kabupaten pelaksanaan kegiatan penurunan stunting di tingkat kecamatan dan desa
11. Pembentukan Kelembagaan di tingkat Kecamatan dan Desa
 - Kecamatan : Jumlah Kecamatan 18, TPPS terbentuk 18(100%)
 - Desa : Jumlah Desa 139 TPPS terbentuk 139 (100%)
12. Pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) 3 orang/desa (PKK, Nakes (Bidan/TPG), Kader KB/Posyandu) di 139 desa untuk Mendampingi keluarga dengan balita stunting dan keluarga beresiko stunting
13. Alokasi dana desa untuk pemberian makanan tambahan bagi bayi dan balita

PENANGANAN KEMISKINAN

1. Menurunkan Beban Pengeluaran melalui:
 - Program sembako/BPNT
 - Program Keluarga Harapan
 - Program Bantuan Inflasi
 - BLTBBM
 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat(PBI)
 - Program Beasiswa Kutim Tuntas
 - Kegiatan pasar Murah
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui:
 - Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM
 - Pelatihan kewirausahaan bekerjasama dengan BLKI
 - Pemberian bantuan hibah bagi pemberdayaan petani dan nelayan
 - Pemberian bantuan peralatan bagi IKM
 - Pemberian pelatihan kewirausahaan bagi IKM
 - Pemberian bibit ternak



3. Pengurangan Kantong-kantong Kemiskinan melalui:

- Peningkatan konektivitas antar wilayah
- Peningkatan akses terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi
- Perbaikan rumah tidak layak huni
- Program 50 Juta/RT

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan tunai bersyarat atau secara internasional dikenal dengan nama Conditional Cash Transfer Program. Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target “zero poor” pada Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu tepatnya pada tujuan ke-1 Anti Kemiskinan (*No Poverty*).

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH)

Adapun sasaran PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Dikatakan bersyarat karena penerima manfaat PKH akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan bagi ibu hamil dan balita dan/atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil.

Program Keluarga Harapan yang ada di Kabupaten Kutai Timur tahun 2021 sudah mencakup keluarga yang tercakup di 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat di tahun



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

2021 adalah sebesar 9.609 KPM. Adapun data disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 12. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Per Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur , Tahun 2021

Kecamatan	KPM	Jumlah Bantuan
BATU AMPAR	618	349.775.000
BENGALON	825	462.650.000
BUSANG	373	222.550.000
KALIORANG	374	243.200.000
KARANGAN	79	49.550.000
KAUBUN	299	162.975.000
KONGBENG	493	335.725.000
LONG MESANGAT	528	299.450.000
MUARA ANCALONG	1101	601.575.000
MUARA BENGKAL	724	337.850.000
MUARA WAHAU	367	219.800.000
RANTAU PULUNG	559	339.125.000
SANDARAN	341	211.250.000
SANGATTA SELATAN	786	518.175.000
SANGATTA UTARA	909	536.575.000
SANGKULIRANG	255	155.175.000
TELEN	322	203.950.000
TELUK PANDAN	656	358.100.000
Grand Total	9.609	5.607.450.000



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Tabel 13. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Per Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016 - 2021

KECAMATAN	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BATU AMPAR	57	203	481	468	588	618
BENGALON	295	451	948	886	967	825
BUSANG	139	258	440	381	447	373
KALIORANG	73	210	288	260	234	374
KARANGAN	85	85	94	91	75	79
KAUBUN	117	263	409	348	315	299
KONGBENG	93	222	329	315	331	493
LONG MESANGAT	151	268	489	386	508	528
MUARA ANCALONG	332	534	1.144	1.085	1.291	1.101
MUARA BENGKAL	190	283	619	598	659	724
MUARA WAHAU	60	163	297	274	311	367
RANTAU PULUNG	119	244	535	516	552	559
SANDARAN	26	222	474	453	326	341
SANGATTA SELATAN	346	492	741	682	738	786
SANGATTA UTARA	301	139	745	643	751	909
SANGKULIRANG	85	373	186	177	205	255
TELEN	223	262	311	299	329	322
TELUK PANDAN	51	219	714	638	595	656
Total	2.743	4.891	9.244	8.500	9.222	9.609

Sumber: Dinas Sosial, 2021

2. Program Hibah Air Minum Bagi Penerima Manfaat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Program Hibah Air Minum dan Sanitasi adalah suatu upaya percepatan penambahan jumlah sambungan rumah (SR) baru melalui penerapan output based atau berdasarkan kinerja yang terukur.

Program Hibah Air Minum merupakan program hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang berbasis kinerja dan telah dilaksanakan sejak tahun 2009 dan menghasilkan lebih dari 500.000 Sambungan Rumah Baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selama ini telah dilaksanakan untuk menangani wilayah perkotaan melalui peran aktif Pemda dan PDAM.



Untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan khususnya masyarakat di desa tertinggal dan masyarakat di pinggiran kota (peri-urban). Secara lebih rinci program Pamsimas bertujuan untuk:

1. Meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat;
2. Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan;
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal (pemerintah daerah maupun masyarakat) dalam penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;
4. Meningkatkan efektifitas dan kesinambungan jangka panjang pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;

Komponen Air Minum Perdesaan

1. Tim Teknis melakukan sosialisasi rencana program hibah kepada kab/kota;
2. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang berminat mengikuti Program Hibah Air Limbah mengajukan surat minat dan kesanggupan untuk memenuhi kriteria dan syarat penerima hibah kepada Direktur Jenderal Cipta Karya, dengan lampiran surat kesiapan dari PDPAL/PDAM;
3. CPMU menilai dokumen usulan dan kesiapan kegiatan dari masing-masing Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana tahunan pelaksanaan hibah air minum yang diajukan;
4. CPMU dibantu konsultan baseline melakukan baseline survey terhadap masyarakat calon penerima manfaat;
5. DJCK merekomendasikan daftar calon penerima hibah kepada Kementerian Keuangan c.q. DJPK;
6. Kementerian Keuangan cq. DJPK menerbitkan Surat Persetujuan Penerusan Hibah Luar Negeri, dokumen PPH dan kemudian Menteri Keuangan/kuasanya dan Kepala Daerah penerima hibah melakukan penandatanganan PPH.



7. Penerima Hibah akan memberikan Penyertaan Modal kepada PDAM, yang akan digunakan oleh PDPAL/PDAM untuk membiayai pelaksanaan pemasangan SR yang diajukan untuk mendapatkan hibah.
8. PDPAL/PDAM segera melaksanakan kegiatan pembangunan, yang dapat juga dilakukan oleh pihak ketiga;
9. Setiap tahapan pekerjaan selesai dan sambungan baru berfungsi baik paling sedikit 500 SR, kab/kota penerima hibah dapat mengajukan permintaan penilaian kepada PPMU untuk diteruskan kepada CPMU dengan ketentuan jumlah dana hibah yang dibayarkan maksimal sebesar dana APBD yang dialokasikan untuk program hibah dan jumlah SR sesuai dengan PPH.
10. Selanjutnya CPMU menugaskan Tim Konsultan Verifikasi untuk memeriksa kelayakan yaitu:
 - a. Pemasangan SR untuk MBR telah dilaksanakan dan telah berfungsi baik;
 - b. Pemenuhan terhadap standar teknis sambungan rumah;
 - c. Kepuasan pelanggan penerima SR Program Hibah Air Limbah.
 - Bilamana Tim Konsultan Verifikasi melaporkan bahwa kondisi (a) dan (b) di atas telah sesuai dengan yang diharapkan;
 - Bilamana Konsultan Verifikasi melaporkan bahwa kondisi (a) dan (b) tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka CPMU dan PPMU akan merekomendasikan kepada PIU untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dan pelayanan agar dapat memenuhi persyaratan dan dapat diajukan bersamaan pada periode tahapan verifikasi berikutnya.
11. CPMU atas nama DJCK akan menerbitkan surat kepada DJPK yang menyampaikan rekomendasi pencairan dana hibah kepada kab/kota berdasarkan surat rekomendasi dari PPMU;
12. Kementerian Keuangan melakukan penilaian dokumen administrasi persyaratan pencairan hibah dan melakukan pencairan dana hibah.

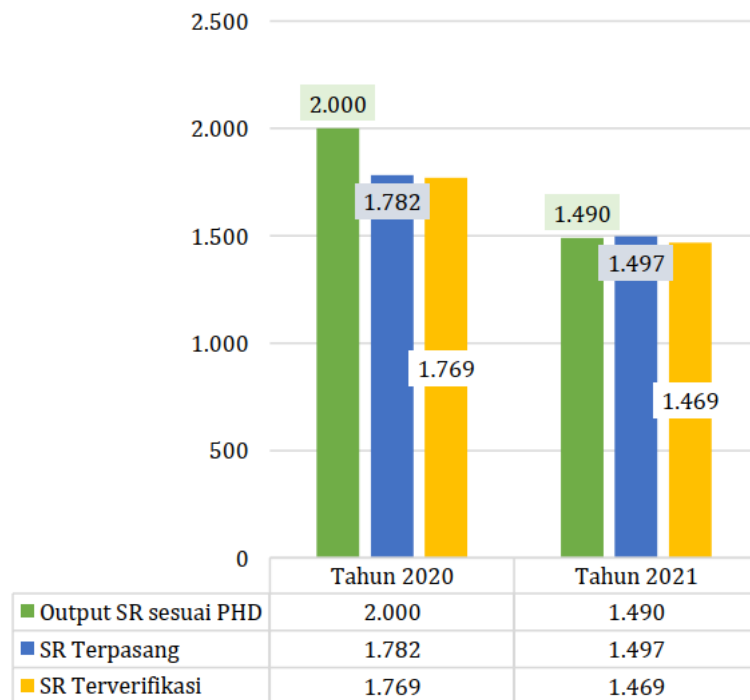


LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Cakupan Hibah Air Minum Perdesaan

Dalam rangka pelaksanaan Program Hibah Air Minum, pemerintah daerah penerima hibah wajib mengalokasikan dana modal APBD kepada PDAM untuk pembangunan sistem penyediaan air minum perpipaan, yang meliputi perencanaan, pembangunan, dan pengawasan sampai penerima manfaat memperoleh pelayanan air minum dengan melaksanakan pemasangan sambungan baru yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Grafik 42. Rekapitulasi Output Sambungan Rumah Penerima Manfaat Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 - 2021





LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Tabel 14. Rekapitulasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Kabupaten Kutai Timur Bagi Penerima Manfaat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2020 – 2021

NO	URAIAN	SAT.	TAHUN		KET.
			2020	2021	
1	Pengajuan Daftar Calon Penerima Manfaat oleh PDAM	SR	2.100	1.565	Usulan Calon MBR termasuk SR cadangan 5%
2	Nilai Penyertaan Modal kepada PDAM	Rp.	5.000.000.000	5.000.000.000	
3	Penerbitan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kemenkeu kepada Kabupaten Kutai Timur	SR	2.000	1.490	
4	Penerbitan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kemenkeu kepada Kabupaten Kutai Timur	Rp.	5.000.000.000	4.470.000.000	Nilai SPPH tidak melebihi dari Nilai PMP yang diberikan kepada PDAM
5	Penerbitan Dokumen Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Kemenkeu dan Pemda	SR	2.000	1.490	
6	Penerbitan Dokumen Perjanjian Hibah Daerah (PHD)	Rp.	5.000.000.000	4.470.000.000	
7	Pelaksanaan Survey Baseline berdasarkan SR yang di ajukan	SR	2.100	1.565	termasuk SR cadangan 5%
8	Hasil Baseline Survey berdasarkan Berita Acara	SR (Eligible)	1.792	1.500	
	SR yang memenuhi kriteria dan diterima berdasarkan BA Baseline Survey	SR (Eligible)	1.792	1.500	
	SR yang tidak memenuhi kriteria dan tidak diterima berdasarkan BA Baseline Survey	SR (In-Eligible)	308	65	
9	Pemasangan SR oleh PERUMDAM	SR	1.782	1.497	
10	SR yang tidak terpasang oleh PERUMDAM	SR	10	3	
11	Pengajuan SR terpasang untuk di verifikasi ke Pusat	SR	1.782	1.497	
12	Pelaksanaan Survey Verifikasi oleh Konsultan Pusat	SR	1.782	1.497	
13	Hasil Survey Verifikasi berdasarkan Berita Acara	SR	1.769	1.469	
	SR yang memenuhi kriteria dan diterima berdasarkan BA Survey Verifikasi	SR	1.769	1.469	
	SR yang tidak memenuhi kriteria dan tidak diterima berdasarkan BA Survey Verifikasi	SR	13	28	
14	Pengajuan SR terverifikasi untuk di Reviu oleh BPKP	SR	1.769	1.469	
	SR yang diterima berdasarkan Reviu BPKP	SR	1.769	1.469	
	SR yang tidak diterima berdasarkan Reviu BPKP	SR	0	0	
15	Nilai Permintaan Penyaluran Dana Hibah kepada Kemenkeu dan di salurkan oleh Kemenkeu kepada PEMDA berdasarkan Surat Rekomendasi Teknis CPMU	Rp.	2.000.000.000 2.307.000.000 4.307.000.000	4.407.000.000	Ketentuan Pengajuan Besaran Dana Hibah : Tahap I = SR 1 s.d 1.000 x Rp. 2 Juta, SR> 1.001 x Rp. 3 Juta Tahap II = 1 SR x Rp. 3 Juta
16	Progress SR diterima dari nilai SPPH	%	86,14	98,59	



3.4.2 PROGRAM NON PEMERINTAH

1. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat PT KALTIMPRIMA COAL 2021

Profil Perusahaan

PT Kaltim Prima Coal (KPC) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan dan pemasaran batubara untuk pelanggan industri baik pasar ekspor maupun domestik. Kantor pusat PT KPC berada di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur dan kantor perwakilan di Jakarta, Samarinda, dan Balikpapan, KPC mengelola area konsesi pertambangan dengan luas mencapai 84,938 hektar. Dengan didukung oleh lebih dari 4.499 orang karyawan dan 21.000 personel dari kontraktor dan perusahaan terkait, kapasitas produksi batubara KPC mencapai 70 juta ton per tahun.

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat disekitar lokasi kerja perusahaan itu sendiri. Tujuan dari program ini salah satunya diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar perusahaan merasakan dampak positif dari perusahaan itu sendiri.

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dilandaskan berdasarkan isu paska tambang, baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan. Pendekatan pengembangan masyarakat difokuskan untuk mendukung kemandirian wilayah, khususnya desa-desa di sekitar wilayah tambang. Program tersebut meliputi 7 (tujuh) bidang, yaitu:

a. Program Pemberdayaan Pengembangan Agribisnis,

1) Pemanfaatan Lahan Pascatambang

- Peternakan Sapi Terpadu (Pesat)
- Jupiter Farm
- TBA (Telaga Batu Arang)

Berbagai kegiatan di tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

- Budidaya ternak sapi potong sebanyak 12 eko
- Budidaya ikan model Keramba Siring Apung (KSA) di 19 KJA

- Budidaya tanaman buah2an (salak, jambu, alpukat, durian, pisang) di lahan seluas 5,2 ha dan tanaman pangan (singkong dan jagung) seluas 3 h
- Produksi kompos sebanyak 60 ton/tahun dengan distribusi digunakan 60% ke reklamasi tambang KP
- Penangkaran Rusa sebanyak 5 ekor

2) Pengembangan Budidaya Tanaman Pangan dan Tanaman Semusim



Pendampingan budidaya tanaman pangan Bengalon



Panen semangka Kelompok Tani Maju Bersama, Desa Sepaso Timur



Serah terima bantuan saprotan (sarana produksi pertanian) Desa Muara Bengalon



Panen melon di Desa Sepaso Barat

Gambar 2. Kegiatan Pengembangan Tanaman Pangan dan Tanaman Pemusim
PT. KPC di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Sumber: Laporan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat PT KPC 2021

b. Pengembangan Ekonomi Lokal dan UKM

1) Sahabat Tangguh

Sahabat Tangguh adalah program kewirausahaan yang berbasis pendampingan lokal. Sahabat Tangguh merupakan pendampingan UMK khususnya bagi mereka yang menjadi mitra/binaan KPC yang telah mengikuti program kewirausahaan melalui program UKM Tangguh dan



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Kutimpreneur serta bergabung sebagai anggota Koperasi Insan Tangguh Sejahtera (KITS).

Kegiatan program yang dilakukan selama tahun 2021 antara lain adalah:

- Monitoring dan pendampingan 30 peserta Program Sahabat Tangguh yang berada di Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, dan Rantau Pulung
- Pelatihan penggunaan aplikasi Point of Sale (POS)
- Pemberian stimulan bantuan berupa alat penunjang produksi usaha sebagai kompensasi terhadap tercapainya

target profit

2) Olsabara

Olsabara menyediakan pelayanan peningkatan kualitas pengemasan berupa pengemasan langsung, penyediaan berbagai kebutuhan untuk pengemasan yang masih sulit didapatkan di seputaran Kutai Timur sampai dengan pelayanan desain kemasan, serta penyediaan klinik bisnis.



Pada tanggal 2 – 4 Juni 2021 Olsabara di undang oleh Dinas Pariwisata Kutai Timur untuk mengisi mini bazaar dalam rangka Rakornis Pariwisata se-Kaltim bertempat di gedung Meranti kantor Bupati Kutai Timur.



Pada tanggal 30 Agustus 2021, Olsabara diundang sebagai narasumber dalam kegiatan "Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Binaan Taman Nasional Kutai" di Balai Pertemuan Taman Nasional Kutai.

Gambar 3. Kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal dan UMKM PT. KPC di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Sumber: Laporan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat PT KPC 2021



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

3) Pengembangan Komunitas Pembatik Kutai Timur



Pertemuan dengan Bupati Kutai Timur dalam rangka pengajuan HAKI kelompok pembatik



Kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan limbah batik bekerjasama dengan Departemen Environment KPC

Gambar 4. Kegiatan Pengembangan Komunitas Pembatik PT. KPC di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Sumber: Laporan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat PT KPC 2021

4) Pengembangan UMKM Pangan dan Non Pangan



Pendampingan UMKM Sepaso Selatan 2021



Pelatihan Mentalitas Dasar dan Kewirausahaan untuk UMKM Bengalon

Gambar 5. Kegiatan Pengembangan UMKM Pangan dan Non Pangan PT. KPC di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Sumber: Laporan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat 2021

5) Pengembangan Kapasitas Vendor Lokal



Pendampingan Follow Up Audit FPE PT MKB



Monitoring dan pendampingan ke PT BNM terkait kerjasama tenaga kerja dengan Supplier Primalindo

Gambar 6. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Vendor Lokal PT. KPC di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Sumber: Laporan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat PT KPC 2021



c. Kesehatan dan Sanitasi

1) Penanggulangan Penyakit Menular

➤ Pengendalian Tuberkulosis (TB)

Bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan Kutai Timur, Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI), Puskesmas, dan kader PMO, KPC berpartisipasi dalam usaha pengendalian tuberkulosis (TB). Hal ini sekaligus mendukung agenda nasional dalam Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan TB yang bertujuan mempercepat pengendalian TB dengan membangun kemitraan multipihak.

Pandemi yang masih berjalan di tahun 2021 menyebabkan kegiatan program sangat terbatas. Kegiatan yang dilakukan di tahun 2021 antara lain adalah:

- Pemantauan pasien TB yang berkunjung ke Puskesmas
- Investigasi kontak kerjasama antara PPTI, Dinas Kesehatan Kutai Timur, KPC, dan LSM Pena Bulu di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan
- 8 kali penyuluhan dan sosialisasi TB di akhir tahun yang dilakukan di 4 wilayah. Sebanyak 80 kader dan 237 peserta penyuluhan terlibat dalam kegiatan ini.

➤ Pengendalian HIV AIDS

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program ini antara lain adalah:

- Sosialisasi dan mobile VCT bagi kelompok berisiko.
- Pendampingan ODHA yang terdiri dari ibu rumah tangga, mahasiswa, tenaga kerja honorer, WPS, tenaga kerja honorer, dan lainnya.
- Penyuluhan kesehatan melalui talkshow di radio pemerintah dan swasta.



- Pembagian masker, brosur, dan hand sanitizer.

➤ Program Pemberantasan Sarang Nyamuk

2) Bantuan Pengobatan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Setetes Cahaya
Melukis Harapan/Operasi Katarak

Dukungan kesehatan masyarakat desa terpencil.

Kegiatan yang dilakukan antara lain:

- Dukungan insentif tenaga kesehatan di desa-desa terpencil
- Program pendampingan di posyandu terpencil. Pendampingan termasuk pada program kesehatan ibu anak dan gizi balita. Total peserta atau penerima pendampingan selama tahun 2021 sebanyak 600 orang
- Kegiatan Puskesmas Keliling setiap bulan selama 2021 ke Desa Keraitan, Desa Tebangan Lembak dengan agenda kegiatan antara lain: konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan masyarakat. Total penerima manfaat selama 2021 untuk kegiatan puskesmas keliling ada sebanyak 483 orang.
- Kegiatan seminar/penyuluhan tenaga kesehatan.
- Pelaksanaan kegiatan Posyandu Lansia yang bertujuan untuk memudahkan warga yang termasuk dalam kategori lanjut usia (lansia) mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Kegiatan Posyandu Lansia saat ini sudah berjalan di Desa Keraitan, Desa Sepaso, dan Desa Sepaso Selatan dengan total penerima manfaat 347 orang.

3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Di tahun 2021, KPC kembali memberikan dukungan peningkatan sarana prasarana kesehatan sebagai berikut ini:

- Posyandu Prodesa yang pembangunannya merupakan kolaborasi dari KPC, PT Pama Persada, dan dana desa.



Posyandu ini terletak di Kecamatan Sangatta Utara, Desa Swarga Bara

- Posyandu Bersinar Ceria, pembangunannya baru terlaksana 50,78% dan akan dilanjutkan ke tahun 2022. Posyandu ini terletak di Kecamatan Sangatta Utara, Desa Swarga Bara.
- Posyandu Mekar Raya, pembangunannya baru terlaksana 62,14% dan akan dilanjutkan ke tahun 2022. Posyandu ini terletak di Kecamatan Rantau Pulung, Desa Masalap Raya.

d. Pendidikan dan Pelatihan,

1) Beasiswa -Meretas Warna Meraih Asa-

Di tahun 2021, KPC memberikan beasiswa umum kepada 77 orang yang terdiri dari 51 beasiswa tingkat D3/S1, 22 beasiswa tingkat S2, dan 4 beasiswa tingkat S3. Selain itu, beasiswa umum lanjutan juga kembali diberikan kepada penerima beasiswa di tahun sebelumnya yang memenuhi persyaratan. Sebanyak 77 orang menerima beasiswa umum lanjutan di tahun 2020 yang terdiri dari 66 beasiswa tingkat D3/S1, 8 beasiswa tingkat S2, dan 2 mahasiswa tingkat S3. Beasiswa khusus lanjutan juga diberikan kepada 9 orang pelajar dari Kutai Timur. 4 orang di Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta, 2 orang di STP (Sekolah Tinggi Pariwisata) Bandung, 2 orang di Politeknik Kesehatan Surabaya, dan 1 orang di Politeknik Kesehatan Samarinda.

2) Uji Kompetensi Keahlian Siswa SMK

3) Program Pemagangan Mekanik

4) Pengembangan SMKN 2 Perikanan dan Kelautan Sangatta Utara

5) Program Beasiswa Segading

6) Pelatihan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) untuk SMK Muhammadiyah Sangatta Utara

7) Bantuan Pendidikan untuk Daerah Terpencil

Beberapa bantuan diberikan oleh KPC antara lain adalah:



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

- Bantuan insentif kepada guru di daerah terpencil yaitu SDN 018 Bengalon, SDN 015 Bengalon, SD Filial 013 Desa Keraitan, SD Filial 018 Desa Keraitan, SD Filial Dusun Segading Desa Keraitan, SDN 003 Bengalon, dan SMPN 4 Filial Tebangan Lembak.
- Bantuan pendidikan dan seragam sekolah warga Segading.
- Bantuan pembelian buku untuk peserta didik SMPN 4 Filial Tebangan Lembak

8) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Beberapa bantuan yang diberikan pada tahun 2021 antara lain:

- Pembangunan Gedung Aula SD Alam Sangatta
- Pembangunan Kantin SDN 006 Sangatta Utara
- Bantuan sarana dan prasarana SDN 019 Bengalon
- Bantuan dana pematangan lahan SMPN 4 Bengalon
- Pembangunan ruang kelas SDN 011 Sangatta Selata
- Dukungan Pembangunan TPQ Ulil Albab Singa Gembara
- Penurapan Halaman TK Asisi Swargabara

e. Peningkatan Infrastruktur

Berbagai kerjasama di bidang infrastruktur di tahun 2021 yang telah dilakukan antara lain:



Bantuan penanganan longsor di Jalan Sangatta – Rantau Pulung



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021



Betonisasi Gg. Mulia Swargabara



Betonisasi Gg. Cendrawasih Swargabara



Betonisasi Gg. Hikmah II Teluk Lingga



Betonisasi Gg. Nusantara Teluk Lingga



Klinik kesehatan di kawasan Bukit Pelangi seluas 12 x 20 m



Dukungan pembangunan Musholla Al Mubarak Teluk lingga

Gambar 7. Kegiatan Peningkatan Infrastruktur PT. KPC di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Sumber: Laporan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat PT KPC 2021



f. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Masyarakat

1) Desa Mandiri

Program Desa Mandiri adalah sebuah program untuk mendukung pembangunan desa dengan ukuran Indeks Pembangunan Desa (IPD) khususnya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan publik, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, dan penyelenggaraan pemerintahan. Selaras dengan kapasitas, kewenangan dan berbagai isu dalam pencapaian Desa Mandiri, KPC mengambil peran dalam penguatan lembaga ekonomi desa yaitu BUMDesa.

Di tahun 2021, beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program ini antara lain adalah:

- Pelatihan legalitas BUMDesa, penyusunan AD/ART dan penyusunan Program Kerja guna penerbitan sertifikat BUMDesa
- Sosialisasi peran PKK dalam permodalan BUMDes
- Stimulan unit usaha Bumdes Mart Desa Sangata Utara berupa 1 unit mobil bak terbuka L300
- Stimulan unit usaha layanan air bersih (Spamdes) di BUMDesa Tepian Makmur berupa pipanisasi, travo, penghijauan, embung air, dan meteran air.
- Kegiatan monitoring dan evaluasi



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021



Sekolah Bumdes bagi direktur dan sekretaris oleh
Fakultas Ekonomi Bisnis-Unmul



Unit usaha Pelayanan Air Bersih (PAMSIMAS)
Bumdes Tepian Makmur Sejatera

Gambar 8. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Masyarakat
PT. KPC di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Sumber: Laporan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat PT KPC 2021

g. Konservasi Alam dan Budaya difokuskan

- 1) Composting Training Cente (CTC)
- 2) Gerakan Penghijauan
- 3) Proklim(Program Kampung Iklim)

Secara ringkas, penerima manfaat dan mitra kerja dari 3 program di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 15. Jumlah Penerima Manfaat Program Konversi Alam dan Budaya dari PT. KPC Tahun 2021

Sub Program	Penerima manfaat		Mitra kerja
	Lembaga	Perorangan	
Composing training centre (CTC)	13	736	13 lembaga
Proklim	7	85	7 Lembaga
Penghijauan	18	0	18 Lembaga

Sumber: Laporan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat PT KPC 2021



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Tabel 16. Besaran Anggaran Program Konversi Alam dan Budaya dari PT. KPC Tahun 2021

No.	Program	Rencana (IDR)	Realisasi (IDR)
1	PENDIDIKAN	5.812.730.463	4.135.702.046
	a. Beasiswa	3.832.215.172	2.103.333.853
	b. Pendidikan, Pelatihan Keterampilan, dan Keahlian Dasar	79.230.000	-
	c. Bantuan Tenaga Pendidik	323.901.470	279.820.000
	d. Bantuan Sarana dan/atau Prasarana Pendidikan	1.577.383.821	1.752.548.193
2	KESEHATAN	10.223.545.083	13.694.838.135
	a. Kesehatan Masyarakat Sekitar Tambang	1.019.956.312	242.600.700
	b. Tenaga Kesehatan	309.000.000	36.000.000
	c. Sarana dan/atau Prasarana Kesehatan	8.894.588.771	13.416.237.435
3	TINGKAT PENDAPATAN RIIL ATAU PEKERJAAN	6.358.403.485	5.616.285.281
	a. Kegiatan ekonomi menurut profesi yang dimiliki, seperti:		
	- Perkebunan	634.000.000	3.715.000
	- Peternakan & Perikanan	3.190.599.599	4.877.318.345
	b. Penguatamaan penggunaan tenaga kerja Masyarakat Sekitar Tambang sesuai dengan Kompetensi	2.533.803.886	735.251.936
4	KEMANDIRIAN EKONOMI	2.406.268.000	290.840.940
	a. Peningkatan kapasitas dan akses Masyarakat Setempat dalam usaha kecil dan menengah	2.406.268.000	290.840.940
5	SOSIAL DAN BUDAYA	8.233.680.887	57.062.527.686
	a. Bantuan bencana alam	2.265.000.000	54.535.996.083
	b. Partisipasi dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal setempat	5.968.680.887	2.526.531.602
6	PEMBERIAN KESEMPATAN KEPADA MASYARAKAT SETEMPAT UNTUK IKUT BERPARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN KEHIDUPAN MASYARAKAT SEKITAR TAMBANG YANG BERKELANJUTAN	3.925.000.000	17.538.238.457
7	PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN KOMUNITAS MASYARAKAT DALAM MENUNJANG KEMANDIRIAN PPM	23.356.539.216	929.617.705
8	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MENUNJANG PPM	13.183.832.866	24.421.403.373
TOTAL		73.500.000.000	123.689.453.623

Sumber: Laporan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat PT. KPC 2021

2. Corporate Social Responsibility PT SANTAN BORNEO ABADI

Profil Perusahaan

Perusahaan PT. SANTAN BORNEO ABADI berdiri berdasarkan SK PBPH-HT dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan SK.313/Menhut-II/2011 tanggal 15 Juni 2011. Luas Areal yang dikuasai adalah 37.825 Ha dengan status Permodalan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Alamat Kantor Estate berada di Desa Pengadan Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur. Letak Geografis berada pada 116° 50' 10" – 117° 03' 28" BT dan 0° 36' 05" – 0° 50' 27" LU

CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat disekitar lokasi kerja perusahaan itu sendiri. Tujuan dari program CD/CSR suatu perusahaan salah satunya diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar perusahaan merasakan dampak positif dari perusahaan itu sendiri.



Adapun sasaran CSR PT Mahakam Persada Sakti adalah :

1. Tumbuhnya usaha-usaha masyarakat yang dapat dijadikan sebagai tumpuan keluarga.
2. Meningkatnya kualitas SDM dilihat dari tingkat pendidikan dan mutu pendidikannya.
3. Masyarakat memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya dalam bidang keagamaan, olah raga, kesenian dan kebudayaan.
4. Tersedianya sarana prasarana untuk mempercepat berkembangnya perekonomian, pendidikan, kesehatan dan sosial keagamaan.
5. Melembagannya program CSR dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat berkesinambungan (*sustainability*)

PT SBA, merupakan perusahaan di bidang Hutan Tanaman Industri yang berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip pengelolaan Hutan Tanaman Industri yang baik dan benar, serta menjadi mitra yang baik bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional hutan tanaman Industri **PT SBA**, berdasarkan prinsip saling menghormati dan saling menghargai, akan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan, ketentuan hukum yang berlaku, dan integrasi organisasi secara menyeluruh.

PT SBA, mewujudkan komitmen dan prinsip tersebut melalui penetapan kebijakan operasional dan diantaranya dengan menetapkan kebijakan **CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**.

Dalam melaksanakan realisasi pemberdayaan masyarakat ini, PT SBA telah merancang program pembinaan yaitu Pengembangan Sosial (Social Developmet), Pengembang Ekonomi (Economic Development), Program Lingkungan Hidup (Environment Protection), dan Hubungan Masyarakat (Community Relation). Berdasarkan 4 pilar tersebut, dikembangkan menjadi 5 program pemberdayaan masyarakat, yaitu :

1. Program Usaha Produktif dan Pemberdayaan.
2. Program Pendidikan.



3. Program Bantuan Sosial, Keagamaan dan Sosial Budaya
4. Program Kesehatan
5. Program Infrastruktur.

3. Corporate Social Responsibility PT Indexim

Dalam upaya penanggulangan pandemi covid-19, PT Indexim Coalido menyerahkan bantuan untuk penanggulangan Covid-19 berupa dana sebesar 1 miliar dan 10 unit oxygen concenerator, serta bantuan anggaran untuk meningkatkan capaian pelaksanaan vaksin dengan pergerakan vaksinator kabupaten (melakukan vaksin) ke kecamatan-kecamatan.

3.5. CAPAIAN KINERJA TAHUNAN

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memiliki beberapa capaian terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, khususnya organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan dasar untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur.

3.5.1 Pendidikan

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia karena pada dasarnya manusia dalam melaksanakan kehidupannya tidak lepas dari pendidikan. Implementasi dan pengembangan kajian pendidikan juga harus disesuaikan dengan kondisi serta situasi sosial yang ada di masyarakat. Sebab, pendidikan laksana eksperimen yang tidak pernah selesai sampai kapan pun, sepanjang ada kehidupan manusia di dunia ini. Dikatakan demikian karena pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang terus berkembang.

Hal ini sejalan dengan pembawaan manusia yang memiliki potensi kreatif dan inovatif. Berdasarkan hal diatas, tujuan pendidikan pun akan menjadi tumpuan upaya pemerintah untuk mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan dalam era Sustainable Development Goals (SDGs) hingga 2030 berdasarkan arahan dari Forum PBB yang telah



disepakati pada tanggal 2 Agustus 2015. Peningkatan pendidikan bagi masyarakat Indonesia akan memacu pencapaian terhadap tujuan dan sasaran lainnya dalam 17 poin SDGs, terutama untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tetap memberikan perhatian pada pendidikan, baik Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama. Perhatian tersebut diwujudkan dalam 2 (dua) program di tahun anggaran 2021. Pembangunan bidang pendidikan sebagai wujud nyata komitmen yang besar untuk mendukung tercapainya indikator SDGs terutama demi mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan dan Pendidikan Untuk Semua (PUS).

Capaian Kinerja Program

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, pada tahun 2021 memiliki tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 85,96%.

Dinas Pendidikan memiliki 2 (dua) program yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 46,36%.
- b. Program Pengelolaan Pendidikan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 53,64%.

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangyanan urusan kesehatan mencapai realisasi sebesar 100%.

Kegiatan yang ada pada Program Pengelolaan Pendidikan, diperoleh capaian-capaian sebagai berikut:

- a. Angka Partispasi Sekolah SD/MI 7-12 tahun sebesar 94,05%
- b. Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs 13-15 tahun sebesar 62,92%
- c. Angka Kelulusan SD/MI sebesar 100%
- d. Angka Kelulusan SMP/MTs sebesar 100%
- e. Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs sebesar 84,62%



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Untuk capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pendidikan pada tahun 2021 adalah:

Tabel 17. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar Pendidikan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program	
		2020	2021
1.	Pendidikan		
	Dinas Pendidikan		
1.1.	Program Pengelolaan Pendidikan		
1.1.1.	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,89	12,9
1.1.2.	Rata - Rata Lama Sekolah	9,19	9,43
1.1.3.	Rasio ketersediaan SD/ MI per penduduk	56,48	44,48
1.1.4.	Rasio ketersediaan SMP/ MTS per penduduk	53,16	41,96

Sumber : Dinas Pendidikan pada LKPJ TA 2021

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan adalah program untuk menjamin terciptanya pendidikan yang merata, relevan, dan akuntabel, meningkatnya citra positif pendidikan, serta tercapainya mutu pendidikan. Kegiatan yang ada pada program Manajemen Pelayanan Pendidikan memiliki capaian antara lain:

- a) Rasio ketersediaan SD/MI per penduduk sebesar 44,48
- b) Rasio ketersediaan SMP/MTs per penduduk sebesar 41,96.
- d) Rasio Guru dan Murid SD/MI sebesar 17,51
- e) Rasio Guru dan Murid SMP/MTs sebesar 14,60
- f) Guru yang memenuhi kualifikasi S1 dan D-IV sebesar 96,10%



3.5.2 Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2021 melaksanakan pembangunan kesehatan berdasarkan prinsip dan standar pelayanan minimum (SPM) untuk mencapai derajat kesehatan optimum masyarakat sebagai komitmen dalam mencapai indikator Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya tujuan ketiga: "Kehidupan sehat dan sejahtera".

Capaian Kinerja Program

Urusan Kesehatan dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Kudungga.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur memiliki sebanyak 5 (lima) program, dimana telah mencapai realisasi kinerja sebesar 88,53% dan serapan anggaran sebesar 78,33%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran. Adapun 5 (lima) program tersebut, meliputi:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan
- c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Dan Minuman
- d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Sementara program yang dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kudungga sebanyak 3 (tiga) program, yaitu:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- c) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Capaian kinerja RSUD Kudungga secara keseluruhan adalah 84,17%.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat memiliki 24 kegiatan diantaranya adalah memiliki capaian persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak pada tahun 2021 adalah sebesar 97,30% atau naik dari



sebesar 89,90% dari tahun 2020. Penurunan ini juga terjadi pada capaian cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC-BTA yaitu sebesar 56,26% pada tahun 2020 menjadi 37,50% pada tahun 2021. Angka Harapan Hidup (AHH) mengalami peningkatan dari 73,16 tahun pada tahun 2020 menjadi 73,46 tahun di tahun 2021. Namun belum memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 yaitu sebesar 74,33 tahun, Adapun cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD telah memiliki capaian 100 persen, baik pada tahun 2020 maupun tahun 2021.

Program dari Dinas Kesehatan selanjutnya yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat memiliki 4 (empat) kegiatan pendukung antara lain:

- a) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- b) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- c) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- d) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan pada Program tersebut di tahun 2021 memiliki capaian sebagai berikut

- 1) Rasio Posyandu Persatuan Balita sebesar 8,0
- 2) Rasio Puskernas, Poliklinik dan Pustu per satuan penduduk sebesar 0,51
- 3) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk sebesar 0,02

Pada Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tersebut, terdapat sub-sub kegiatan yang mendukung keselamatan ibu melahirkan dan anak, diantaranya adalah:

- 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- 2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

- 3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- 5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangyanan urusan kesehatan dalam melaksanakan program-program kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2021

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program	
		2020	2021
1.	Kesehatan		
	Dinas Kesehatan		
1.1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
1.1.1.	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	56%	95%
1.1.2.	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,51	0,51
1.1.3.	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,02	0,02
1.2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		
1.2.1.	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	61,38%	67,38%
1.2.2.	Angka Harapan Hidup	73,16	74,33
1.3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Dan Minuman		
1.3.1.	Pesentase Apotik dan Toko Obat serta ORTP (Indutsri Rumah Tangga Pangan) yang memenuhi syarat	66,20%	70,25%
1.4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		
1.4.1.	Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	5,40%	11,00%
	RSUD Kudungga		
1.6.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
1.6.1.	Akreditasi RSUD	Utama	Utama

Sumber : Dinas Kesehatan



Berdasarkan 6 (enam) sub kegiatan yang telah terlaksana, didapatkan hasil capaian berupa Angka kelahiran Total per Bayi dan Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup. Tabel 19 (a) menunjukkan bahwa dari tahun 2020 terdapat 8.082 kelahiran per bayi yang menurun pada tahun 2021 sebesar 7.398 kelahiran per bayi. Sedangkan angka kematian balita tahun 2021 yang mengalami penurunan sebanyak 2 kematian dari tahun 2020, dari 6 menjadi 4 kematian per 1000 kelahiran hidup.

Tabel 19. Capaian Kinerja Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program	
		2020	2021
1.	Angka Kelahiran Total (per Bayi)	8.082	7.398
2.	Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	6	4
3.	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)	73,16	73,46

Sumber : Dinas Kesehatan pada LKPJ TA 2021

3.5.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan pembangunan fisik sarana dan prasarana, dengan harapan sarana dan prasarana tersebut menjadi salah satu daya ungkit pembangunan bagi sektor lainnya. Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini diselenggarakan oleh dua dinas terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanahan & Penataan Ruang, dengan tetap mempertimbangkan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) yang ada.

Capaian Kinerja Program

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

2021-2026 dengan program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 13,50%
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- d. Program Pengembangan Permukiman
- e. Program Penataan Bangunan Gedung
- f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- g. Program Penyelenggaraan Jalan dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 52,92%
- h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- j. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- k. Program Penyelesaian Sengketa Tanah garapan
- l. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
- m. Program Penetapan Tanah Ulayat

Adapun realisasi kinerja, proporsi kedua program tersebut tetap memiliki porsi yang sama dengan proporsi anggaran.

Capaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam bidang transportasi, proporsi panjang jalan dalam kondisi baik meningkat. Di sisi lain, rasio tempat ibadah bagi penduduk, rasio turap, dan persentase luas irigasi dalam kondisi baik masih mengalami trend penurunan. Hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk perencanaan pembangunan pada lima tahun kedepan, mengingat pentingnya pembangunan agribisnis dan agroindustri yang membutuhkan adanya peningkatan kontribusi di sektor pertanian.

Kegiatan yang ada pada Program Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang yang mendukung terjapainya aspek pelayanan umum yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021-2026 terdiri 9 (sembilan) kegiatan, yaitu:



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

- a. Pengelolaan SD dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota/
- e. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Pemukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Strategis Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- h. Penyelenggaraan Penataan bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.
- i. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan dalam melaksanakan program-programnya dapat dilihat pada tabel berikut:



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Tabel 20. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program	
		2020	2021
1.	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang		
	Dinas Pekerjaan Umum		
1.1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		
1.1.1	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	45,03%	45,03%
1.2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		
1.2.1	Capaian Akses Air Minum Layak	43,43%	48,70%
1.3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		
1.3.1	Cakupan wilayah saluran drainase rawan genangan air /Banjir (Perkotaan)		94,00%
1.4.	Program Pengembangan Permukiman		
1.4.1	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	2	2
1.5.	Program Penataan Bangunan Gedung		
1.5.1	Persentase Bangunan Gedung Perkantoran Kondisi Baik	52,19%	52,19%
1.6.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya		
1.6.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0,306	0
1.7.	Program Penyelenggaraan Jalan		
1.7.1	Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap	52,00%	52,00%
1.8.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		
1.8.1	Cakupan Penerbitan IUJK	30	43,12
1.8.2	Rasio tenaga terampil yang memiliki sertifikat kompetensi	3,94	6,42
	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		
1.9.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		
1.9.1	Ketaatan Terhadap RTRW	100%	100%
1.9.2	Jumlah Perkada RDTR	1 dok.	1 dok.

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanahan & Penataan Ruang



Berdasarkan 9 (sembilan) kegiatan yang telah dilaksanakan, diperoleh capaian-capaian pada tahun 2021 sebagai berikut:

- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik/mantap sebesar 52,57%
- Rasio tempat ibadah per satuan penduduk sebesar 2.648
- Presentase Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik sebesar 46,10%.

Capaian Indikator Program pekerjaan umum dan penataan ruang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, antara lain:

Tabel 21. Indikator Kinerja Program Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program	
		2020	2021
1.	Persentase Jalan kabupaten Kondisi Mantap	51,48	52,57
2.	Persentase Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	45,03	46,10
3.	Rasio Tempat Ibadah (per satuan penduduk)	2.440	2.648
4.	Ketaatan terhadap RTRW	99,91	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada LKPJ TA 2021

3.5.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2021 telah berupaya untuk dapat terus meningkatkan kualitas pembangunan perumahan dan permukiman, sanitasi dan penyediaan air minum serta air bersih, guna terciptanya kenyamanan dalam bermukim. Kualitas permukiman merupakan prasyarat untuk menunjang indikator kesehatan masyarakat. Kondisi rumah harus memenuhi kondisi layak huni, mempunyai akses sanitasi yang baik (mempunyai toilet sendiri di dalam rumah, mempunyai akses air bersih, dan kondisi sanitasi lainnya).



Capaian Kinerja Program

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dimana program tahun 2021 ada sebanyak 4 (empat) program dimana telah mencapai realisasi kinerja sebesar 96,11% dan serapan anggaran sebesar 89,85%. Adapun 4 (empat) program tersebut meliputi:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%
- Program Pengembangan Perumahan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 65%
- Program Kawasan Permukiman dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

Adapun capaian kinerja dalam program prioritas urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program	
		2020	2021
1.	Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman		
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1.1.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)		
1.1.1.	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum)	0,13%	0,15%
1.2.	Program Pengembangan Perumahan		



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	
		2020	2021
1.2.1.	Persentase Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	0	0
1.3.	Program Kawasan Permukiman		
1.3.1.	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kabupaten Yang Ditangani	30,67% (3 Lokasi SK 2016)	30,67 % (3 Lokasi SK 2016)
1.4.	Program Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Regristrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1.4.1.	Cakupan penerbitan ijin pengembangan	57,14	62,85
1.5.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		
1.5.1.	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH	0,25	0,25

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022

Untuk capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman pada tahun 2021 adalah:

- Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum) sebesar 15,07%, meningkat dari tahun 2020 sebesar 13,70%.
- Persentase Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana sebesar 0,24%.
- Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kawasan Pemukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 Ha yang mencapai capaian kinerja sebesar 30,67 dengan realisasi anggaran sebesar 98,92%.
- Rasio tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk sebesar 0,31.



Tabel 23. Indikator Kinerja Program Berkaitan Pelayanan Dasar Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program	
		2020	2021
1.	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha	30,67	30,67
2.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	NA	NA
3.	Rasio Tempat Pemakaman Umum (per satuan penduduk)	0,31	0,31
4.	Rasio Rumah Layak Huni	0,30	0,24

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 pada LKPJ TA 2021

3.5.6.Sosial

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Sosial sebagai pelaksana Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Sosial memastikan bahwa pemerintah telah merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program/kegiatan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam implementasinya, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur masih memiliki permasalahan terkait kesejahteraan sosial yang perlu ditangani secara tepat. Permasalahan sosial tersebut berkaitan dengan beberapa hal berikut:

- 1 Belum memadainya data base Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 2 Kuantitas dan kualitas panti sosial belum memadai.
- 3 Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait penanganan PMKS.
- 4 Belum optimalnya pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pelayanan PMKS.
- 5 Belum optimalnya Program-program pemberdayaan PMKS.

Capaian Kinerja Program

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, dimana program tahun 2021 ada sebanyak 5 (lima) program dengan total tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 80,77%. 5 (lima) program tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

- b) Program Pemberdayaan Sosial dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 90,43%
- c) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- d) Program Rehabilitasi Sosial
- e) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan Urusan Sosial di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan dalam melaksanakan program-programnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar Sosial

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program	
		2020	2021
1.	Sosial		
	Dinas Sosial		
1.1.	Program Pemberdayaan Sosial		
1.1.1.	Persentase Panti Sosial atau Lembaga Pelatihan yang Menerima program pemberdayaan sosial baik melalui kelompok maupun perorangan	69,84%	66,15%
1.2.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		
1.2.1.	Persentase Warga Negara Migran Yang Ditangani	45,00%	50,00%
1.3.	Program Pemberdayaan Sosial		
1.3.1.	Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial kelompok maupun perorangan	69,84%	66,15%
1.4.	Program Rehabilitasi Sosial		
1.4.1.	Persentase PMKS Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	34,41%	34,41%
1.5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
1.5.1.	Nilai SAKIP	73,81	73,81

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022



Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan Urusan Sosial di Kabupaten Kutai Timur mendukung tercapainya target indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 25. Capaian Kinerja Sosial di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program	
		2020	2021
1.	Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial kelompok maupun perorangan	60,84	69,84
2.	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	32,41	34,41
3.	Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial	66,21	66,51

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 pada LKPJ TA 2021

3.5.6. Tenaga Kerja

Penduduk usia kerja di Kabupaten Kutai Timur bekerja di berbagai lapangan usaha. Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sector pertanian. Sektor pertanian, meskipun memiliki nilai tambah yang kecil, namun sector ini relatif paling stabil dalam masa-masa krisis ekonomi atau kondisi gangguan ekonomi lainnya. Surplus tenaga kerja dari sector formal yang tidak terserap juga dapat diserap oleh sector pertanian, minimal pada usaha industri agro dan hortikultura.

Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur, pada tahun 2021 sebanyak 53.905 jiwa atau 29,47% tenaga kerja bekerja di Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan. Sektor kedua yang mendominasi distribusi tenaga kerja di Kabupaten Kutai Timur adalah Sektor Jasa Kemasyarakatan



sebanyak 32.134 jiwa atau 17,57%, dan sektor ketiga adalah Sektor Pertambangan dan Penggalan sebanyak 20.159 jiwa atau 11,01% tenaga kerja.

Capaian Kinerja Program

Urusan Tenaga Kerja dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi, dimana program tahun 2021 ada sebanyak 8 (delapan) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

- a) Program Penunjangn Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi kerangka pendanaan sebesar 19,30%
- b) Program Perencanaan Tenaga Kerja
- c) Program Pelatihan Kerja Dan Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- d) Program Penempatan Tenaga Kerja
- e) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- f) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi dengan realisasi kerangka pendanaan sebesar 15,73%
- g) Program Hubungan Industrial
- h) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- i) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan realisasi kerangka pendanaan sebesar 48,51%

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan dalam melaksanakan program-programnya dapat dilihat pada tabel berikut:



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Tabel 26. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program	
		2020	2021
1.	Tenaga Kerja		
	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi		
1.1.	Program Pelatihan Kerja Dan Dan Produktivitas Tenaga Kerja		
1.1.1.	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Memiliki Keterampilan/ Kompetensi	65,00%	69,00%
1.2.	Program Penempatan Tenaga Kerja		
1.2.1.	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja	30,62%	30,62%
1.3.	Program Hubungan Industrial		
1.3.1.	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Layak (PP/PKB, LKS Bipartis, Struktur Upah Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	75,99%	75,99%
1.4.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi		
1.4.1.	Indeks Tahapan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	45,00	45,00
1.5.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		
1.5.1.	Indeks Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi	45,00	45,00
1.6.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi		
1.6.1.	Indeks Perkembangan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	45,00	45,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur mendukung tercapainya target indikator kinerja yang ditetapkan Dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun



2021-2026. Indikator capaian tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), rasio ketergantungan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tabel 23 menunjukkan bahwa a) Angkatan Kerja mengalami peningkatan dari 188.148 jiwa di tahun 2020 menjadi 193.452 jiwa di tahun 2021; b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dari 56,62% pada tahun 2020 menjadi 61,99% di tahun 2021; c) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunann dari 5,45% di tahun 2020 menjadi 5,35% di tahun 2021.

Tabel 27. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program	
		2020	2021
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	59,62	61,99
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,45	5,35
3.	Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)	188.148	193.452

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022

3.5.7. Pangan

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menetapkan kebijakan urusan pangan dengan berlandaskan Misi 2 (dua) RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian”. Pangan sendiri merupakan kebutuhan utama dan pertama yang harus terpenuhi dalam masyarakat. Masalah ketahanan pangan akan berkaitan dengan permasalahan pada Sektor Pertanian, Peternakan. Kehutanan, Perburuan dan Perikanan karena sektor tersebut merupakan sektor penyedia pangan. Sehingga, jika terjadi kendala pada tersebut, maka akan berdampak pula pada ketahanan pangan.

Capaian Kinerja Program

Dinas Ketahanan Pangan yang bertanggung jawab mengenai Pangan dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Tahun 2021-2026, dimana program tahun 2021 ada sebanyak 5 (lima) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 49,08%
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat tingkat capaian kerangka pendanaan 17,76%.
- Program Penanganan Kerawanan Pangan
- Program Pengawasan Keamanan Pangan

Capaian kinerja berdasarkan bidang Pangan yang di kelola oleh Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan dalam melaksanakan programprogramnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 28. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pangan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program	
		2020	2021
1.	Pangan		
	Dinas Ketahanan Pangan		
1.1.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		
1.1.1.	Ketersediaan Pangan Utama	43,66%	43,66%
1.1.2.	Nilai Tukar Petani (NTP)	111,9%	109,66%
1.1.3.	Penguatan Cadangan Pangan	70%	70%
1.1.4.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89,40%	89,40%
1.2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		
1.2.1.	Persentase Desa Yang Memiliki Lumbung Pangan	3,54%	4,29%
1.3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan		



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program	
		2020	2021
1.3.1.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	19,51%	19,51%
1.4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan		
1.4.1.	Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	95,00%	95,00%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022

Capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan Pangan pada tahun 2021 adalah Ketersediaan Pangan Utama pada tahun 2021 yang dicapai dalam aspek Pelayanan Umum sebesar 43,66%. Disamping itu Persentase Penguatan Cadangan Pangan pada tahun 2021 adalah sebesar 70%.

Tabel 29. Capaian Kegiatan Program Pangan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program	
		2020	2021
1.	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	43,66	43,66
2.	Persentase Penguatan Cadangan Pangan	70	70
3.	Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)	188.148	193.452

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022

3.5.8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan suatu upaya terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dimana desa merupakan satuan wilayah terkecil dalam struktur wilayah pemerintahan di Indonesia. Membangun desa dan masyarakat desa diupayakan untuk memanfaatkan dan



mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat kemungkinan besar akan terhambat oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang relatif masih rendah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menetapkan program-program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan penerapan dari RPJMD Kabupaten Kutai Tahun 2021-2026, khususnya pada misi ke-1 yaitu "Mewujudkan Masyarakat Yang Berahlak Mulia, Berbudaya dan Bersatu".

Capaian Kinerja Program

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang bertanggung jawab mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana program tahun 2022 ada sebanyak 5 (lima) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 66,31%.
3. Program Penataan Desa
4. Program Peningkatan Kerjasama Desa
5. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bertanggung jawab oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan dalam melaksanakan program-programnya dapat dilihat pada table berikut:



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Tabel 30. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program	
		2020	2021
1.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1.1.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		
1.1.1.	Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	0	0
1.2.	Program Penataan Desa		
1.2.1.	Cakupan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	66,93%	76,80%
1.3.	Program Peningkatan Kerjasama Desa		
1.3.1.	Persentase Pertambahan Kerjasama Desa Dan Antar Desa	62,26%	62,26%
1.4.	Program Administrasi Pemerintahan Desa		
1.4.1.	Persentase Bumdes Yang Berjalan Dengan Baik,	0,00%	66,00%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022

Berdasarkan program-program tersebut, diperoleh Skor Indeks Pembangunan Desa (IPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar 64,12%, meningkat menjadi 66,50% pada tahun 2021.



Tabel 31. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan
Dengan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

No	Uraian	Capaian Kinerja Program	
		2020	2021
1.	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	64,12%	66,50%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

3.5.9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat yang diharapkan dapat menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyak jumlah koperasi yang aktif, diharapkan semakin berdaya ekonomi kerakyatan. Lebih jauh hal ini akan menurunkan jumlah kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran.

Capaian Kinerja Program

Dinas Koperasi dan UMKM yang bertanggung jawab mengenai Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana program tahun 2021 ada sebanyak 7 (tujuh) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 57,04%.
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
7. Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan mengenai Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang bertanggung jawab



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan dalam melaksanakan program-programnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 32. Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program	
		2020	2021
1.	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah		
	Dinas Koperasi, dan UMKM		
1.1.	Program Pengembangan UMKM		
1.1.1.	Jumlah UMKM Yang Difasilitasi	15	114
1.2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		
1.2.1.	Persentase Koperasi Yang Aktif	57,21%	57,21%
1.3.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		
1.3.1.	Jumlah KSP/USP Yang Mendapat Penilaian Kesehatan		
1.4.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		
1.4.1.	Jumlah Kopreasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		10
1.5.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		
1.5.1.	Jumlah Koperasi Yang Difasilitasi Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen Dan Restrukturisasi Usaha		
1.6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		
1.6.1.	Jumlah UMKM	6.105	9.627

Sumber: Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022



Tabel 33. Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja Program	
		2020	2021
1.	Jumlah UKM (Unit)	6.942	9.627
2.	Persentase Koperasi Aktif (%)	57,21	55,85

Sumber: Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 pada LKPJ TA 2021.

Berdasarkan kegiatan dari program yang dilaksanakan, diperoleh indikator capaian yaitu Persentase Koperasi Yang Aktif sebanyak 55,85% pada tahun 2021 menurun dari tahun 2020 yang sebesar 57,21%. Sedangkan indikator lainnya adalah Jumlah UMKM sebanyak 9.627 Unit meningkat dari 6.942 unit pada tahun 2020.

3.5.10. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kutai Timur dikelilingi oleh laut sehingga sebagian wilayah perdesaan merupakan desa pesisir. Sebagai wilayah pesisir, hasil komoditas ikan baik yang berasal dari Daerah Aliran Sungai (DAS) maupun perairan laut cukup memiliki peran yang penting. Dengan wilayah laut dan pantai yang cukup luas, wilayah laut Kutai Timur mencapai 0-4 mil atau 2.641 km². Oleh karena itu Kabupaten Kutai Timur memiliki sumber daya potensial laut yang memiliki nilai ekonomis bila dimanfaatkan secara tepat. Potensi-potensi hasil laut, seperti ikan dan rumput laut, dalam kenyataannya masih belum banyak dimanfaatkan karena terjadi pergeseran kewenangan dari Kabupaten Kutai Timur. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk lebih fokus meningkatkan potensi perikanan darat guna mendukung visi Kabupaten Kutai Timur: "Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua".

Capaian Kinerja Program

Dinas Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab mengenai Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

program tahun 2021 ada sebanyak 5 (lima) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 67,39%
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Tabel 34. Pelaksanaan Urusan Pilihan – Kelautan dan Perikanan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program	
		2020	2021
1.	Kelautan Dan Perikanan		
	Dinas Kelautan Dan Perikanan		
1.1.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		
1.1.1.	Konsumsi Perikanan	40,86%	39,15%
1.2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		
1.2.1.	Produksi Perikanan	8.085, 1 ton	8.085,61 ton
1.3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		
1.3.1.	Jumlah/ Jenis Bibit/ Benih Unggul/ Komuditi Utama	5 jenis bibit	5 jenis bibit
1.4.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		
1.4.1.	Jumlah Kelompok Pengawasan Masyarakat (Powakmas)	3	4

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022



Tabel 35. Indikator Kinerja Urusan Pilihan – Kelautan dan Perikanan di
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2021

No	Uraian	Capaian Kinerja Program	
		2020	2021
1.	Produksi Perikanan (Ton)	8.085,61	8.085,61
2.	Konsumsi Ikan	40,86	41

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan Lingkungan yang ada di Kutai Timur pada tahun 2021 adalah Konsumsi Perikanan sebesar 41% dan Produksi Perikanan sebesar 8.085,61 Ton.

3.5.11. Pertanian

Kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Kutai Timur dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu tanaman pangan lahan basah dan tanaman pangan lahan kering. Kawasan budidaya tanaman pangan lahan kering difokuskan di wilayah wilayah yang mempunyai karakteristik tanah seperti derajat kemiringan lahan, jenis tanah, kedalaman solum, tekstur tanah, dan tingkat erosi. Kegiatan pertanian lahan kering banyak diaplikasikan di sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Timur dan tersebar merata di 18 (delapan belas) kecamatan yang ada. Lahan budidaya tanaman pangan lahan basah ada di sebagian kecil wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus berupaya untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat, juga untuk mendukung kebutuhan bahan baku dalam pengembangan agribisnis dan agroindustri. Penentuan komoditas unggulan Kabupaten Kutai Timur dengan mempertimbangkan kesesuaian agroekologi, pasar komoditi, ketersediaan sumberdaya dan dampak pengembangannya terhadap perekonomian daerah.



Capaian Kinerja Program

Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan yang bertanggung jawab mengenai Pertanian di Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana program tahun 2021 Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur memiliki ada sebanyak 7 (tujuh) program dengan tingkat capaian kerangka pendanaan sebesar 87,55% dan capaian realisasi kinerja sebesar 77,79%. Adapun 7 (tujuh) program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
6. Program Perizinan Usaha Pertanian
7. Program Penyuluhan Pertanian

Sementara Dinas Perkebunan memiliki 6 (enam) program yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Per
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian

Capaian kinerja berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan mengenai bidang Petanian yang bertanggung jawab oleh Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan dalam melaksanakan program-programnya dapat dilihat pada tabel berikut:



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Tabel 36. Pelaksanaan Urusan Pilihan – Pertanian

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program	
		2020	2021
1.	Pertanian		
	Dinas Pertanian		
1.1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		
1.1.1.	Produksi Sektor Pertanian (ton)	37.187	37.187
1.1.2.	Jumlah/ Jenis Bibit/ Benih Unggul/ Komoditi Utama	5	5
1.1.3.	Produktivitas Padi	3,55	3,79
1.1.4.	Produksi Sektor Peternakan	3.218	3.218
1.1.5.	Peningkatan Alat Mesin Pertanian/ Peternakan		1541
1.2.	Program Penyuluhan Pertanian		
1.2.1.	Cakupan Bina Kelompok Tani	21,25%	21,25%
1.3.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		
1.3.1.	Meningkatnya Panjang Jalan Pertanian Yang Dibangun		136
1.3.2.	Pembangunan Prasarana Pertanian Lainnya		1
1.4.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
1.4.1.	Meningkatnya Jumlah Kelahiran Ternak Hasil Inseminasi Buatan (IB)		400
	Dinas Perkebunan		
1.5.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		
1.5.1.	Produksi Sektor Perkebunan	6.456.662	6.456.662
1.5.2.	Produktivitas Perkebunan	19,00%	19,00%
1.6.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		
1.6.1.	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Disediakan	0	0



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program	
		2020	2021
1.7.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		
1.7.1.	Terkendalinya Dan Tertanggulangnya Bencana Pertanian	0	10.200 Ha
1.8.	Program Perizinan Usaha Pertanian		
1.8.1.	Jumlah PBS/Koperasi Yang Dimonitor Dan Di Evaluasi Izinnya.	0	20 PBS/Kop
1.9.	Program Penyuluhan Pertanian		
1.9.1.	Jumlah SDM Petanian Yang Ditingkatkan	0	100 orang
1.10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
1.10.1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Dinas Perkebunan	0	70,00%

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022

Capaian kinerja kegiatan yang dilakukan Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan melalui program dan kegiatannya mendukung capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dimana capaian indikator kinerja untuk urusan Lingkungan yang ada di Kutai Timur pada tahun 2021 adalah:

1. Produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya pada tahun 2020 35,50 ha menjadi 3,79 ha pada tahun 2021
2. Cakupan Bina Kelompok Tani pada tahun 2021 sebesar 21,25%
3. Produksi Pangan Utama
 - a. Padi 22.386 ton (2020)
 - b. Palawija 19.705 ton (2020)
4. Populasi Sumber Pangan Hewani, Konsumsi daging (Kg/kap/th)
 - a. Ternak besar (sapi) 9.402 ekor (2020)
 - b. Ternak kecil (kambing) 2.944 ekor (2020)
 - c. Unggas Ayam ras pedaging (dalam Ribuan)
5. Produksi



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

- a. Daging (sapi) 726,69 ton (2020)
 - b. Telur 7.390,08 butir (2020)
 - c. Susu NA
6. Konsumsi Daging (Kg/kap/th) NA
 7. Luas areal sawah tadah hujan dan sawah beririgasi (Ha)
 8. Luas Perkebunan pada tahun 2020 483.751,97 Ha
 9. Jumlah Jenis Bibit/Benih Unggul pada tahun 2020 1 jenis menjadi 5 jenis pada tahun 2021



BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT

4.1. RENCANA TINDAK LANJUT PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Tujuan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur, yaitu Menurunkan Angka Kemiskinan dengan indikator Persentase Penduduk Miskin, berikut target penurunan angka kemiskinan Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sasaran penanggulangan kemiskinan sesuai bidang ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan sosial, serta Indikasi prioritas program berdasarkan isu strategis masing-masing bidang hasil analisis prioritas bidang, termasuk faktor/determinan permasalahan kemiskinan dari sisi supply/demand side.

Berikut indikasi program prioritas penanggulangan kemiskinan masing-masing bidang:

4.2.1 Bidang Ketenagakerjaan

Isu strategis penanggulangan kemiskinan bidang ketenagakerjaan didasarkan pada hasil analisis prioritas bidang, termasuk faktor/determinan permasalahan kemiskinan dari sisi supply/demand side, sebagai berikut:

1. Rendahnya kapasitas tenaga kerja;
2. Rendahnya kesejahteraan tenaga;
3. Rendahnya kesejahteraan anggota koperasi;
4. Belum optimalnya pengembangan usaha mikro;
5. Belum optimalnya inovasi produk industri kecil dan menengah;
6. Belum optimalnya pemberdayaan petani dan peternak.

Sasaran penanggulangan kemiskinan bidang ketenagakerjaan, yaitu Meningkatkan Akses Kesempatan Bekerja dan Berusaha” dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) dan Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja. Berikut target sasaran penanggulangan kemiskinan bidang ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Timur tahun 2021- 2026. Indikasi program penanggulangan kemiskinan bidang ketenagakerjaan didukung oleh Dinas Penanaman Modal, Perizinan



Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja; Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; Dinas Kelautan dan Perikanan; dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kelima perangkat daerah tersebut dalam mendukung pencapaian capaian akhir (*outcome/impact/goals*) melalui 13 Program Prioritas.

4.2.2 Bidang Pendidikan

Isu strategis penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan didasarkan pada hasil analisis prioritas bidang, termasuk faktor/determinan permasalahan kemiskinan dari sisi supply/demand side, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya layanan pendidikan dasar;
2. Rendahnya akses anak usia sekolah ke layanan pendidikan terdekat;
3. Belum optimalnya layanan pendidikan anak usia dini;
4. Rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD;
5. Rendahnya minat literasi masyarakat.

Sasaran penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, yaitu Meningkatkan Akses dan Perluasan Kesempatan Belajar” dengan indikator Ratarata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Berikut target sasaran penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026.

Penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Kedua perangkat daerah tersebut dalam mendukung pencapaian capaian akhir (*outcome/impact/goals*) melalui 4 Program Prioritas.

4.2.3 Bidang Kesehatan

Isu strategis penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan didasarkan pada hasil analisis prioritas bidang, termasuk faktor/determinan permasalahan kemiskinan dari sisi supply/demand side, termasuk masa pandemi COVID-19, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya layanan kesehatan dasar bagi bayi dan balita;
2. Belum optimalnya layanan kesehatan dasar bagi ibu;



3. Belum optimalnya pengendalian dan penanganan penyakit menular dan tidak menular;
4. Belum optimalnya layanan Keluarga Berencana dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Sasaran penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan, yaitu "Meningkatnya Perbaikan Layanan Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat" dengan indikator Usia Harapan Hidup.

Indikasi program penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan didukung oleh Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kedua perangkat daerah tersebut dalam mendukung pencapaian capaian akhir (*outcome/impact/goals*) melalui 4 Program Prioritas.

4.2.4 Bidang Infrastruktur Dasar

Isu strategis penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur dasar didasarkan pada hasil analisis prioritas bidang, termasuk faktor/determinan permasalahan kemiskinan dari sisi supply/demand side, sebagai berikut:

1. Rendahnya akses rumah tangga terhadap sanitasi.
2. Belum optimalnya layanan air minum bagi rumah tangga.
3. Belum optimalnya pemenuhan rumah layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.

Sasaran penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur dasar, yaitu "Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar Permukiman dan Livelihood" dengan indikator Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dan Persentase Kawasan Kumuh yang Ditangani. Berikut target sasaran penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur dasar Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026.

Indikasi program penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur dasar didukung oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup



mendukung pencapaian capaian akhir (outcome/impact/goals) melalui 3 Program Prioritas.

4.2.5 Bidang Ketahanan Pangan

Isu strategis penanggulangan kemiskinan bidang ketahanan pangan didasarkan pada hasil analisis prioritas bidang, termasuk faktor/determinan permasalahan kemiskinan dari sisi supply/demand side, termasuk masa pandemi COVID-19, sebagai berikut:

1. Rendahnya konsumsi energi dan protein.
2. Belum optimalnya pemenuhan keragaman konsumsi pangan.

Sasaran penanggulangan kemiskinan bidang ketahanan pangan, yaitu “Meningkatnya Keragaman dan Keseimbangan Konsumsi Pangan yang Ideal” dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Berikut target sasaran penanggulangan kemiskinan bidang ketahanan pangan Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2024.

Indikasi program penanggulangan kemiskinan bidang ketahanan pangan didukung oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Ketiga perangkat daerah tersebut dalam mendukung pencapaian capaian akhir (outcome/impact/goals) melalui 4 Program Prioritas.

4.2.6 Bidang Sosial

Isu strategis penanggulangan kemiskinan bidang sosial didasarkan pada hasil analisis prioritas bidang, termasuk faktor/determinan permasalahan kemiskinan dari sisi supply/demand side, termasuk masa pandemi COVID-19, sebagai berikut:

1. Rendahnya bantuan sosial bagi PMKS;
2. Rendahnya fakir miskin yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi;
3. Belum optimalnya layanan administrasi kependudukan.

Sasaran penanggulangan kemiskinan bidang sosial, yaitu “Meningkatnya Layanan Perlindungan Sosial” dengan indikator Persentase PMKS yang Memperoleh



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Bantuan Sosial. Berikut target sasaran penanggulangan kemiskinan bidang sosial Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2024.

Indikasi program penanggulangan kemiskinan bidang sosial didukung oleh Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kedua peangkat daerah tersebut dalam mendukung pencapaian capaian akhir (*outcome/impact/goals*) melalui 3 (tiga) Program Prioritas.



BAB V PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan juga merupakan permasalahan nasional yang menjadi prioritas pembangunan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Oleh Karena itu pengentasan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan dan harus dilakukan secara sistematis, terfokus, terencana dan terkoordinasi dengan baik. Kemiskinan juga telah menjadi permasalahan global yang secara khusus tertuang dalam tujuan SDG's. Penanganan masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan yang bersinergi secara efektif sehingga penanganannya dilakukan secara lintas sektor dan menjadi tanggungjawab multipihak, serta terkoordinasi dengan baik.

Kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur dapat dikurangi atau dapat ditekan melalui stimulus pemberian program, baik program dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah sendiri. Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang tertuang dalam dokumen Rencana Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2026, sehingga setiap sektor secara bersama menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas yang berdampak pada alokasi anggaran yang disusun oleh Perangkat Daerah terkait.

Angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur tahun 2021 menunjukkan kenaikan daripada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan dampak pandemi COVID-19 yang telah melanda dan adanya Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Oleh karena itu, upaya-upaya melalui program-program penanggulangan kemiskinan baik yang bersifat stimulus maupun bantuan langsung dapat lebih tepat sasaran.



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

Dalam rangka upaya strategis penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan koordinasinya dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Kutai Timur. Selain TKPK sebagai koordinator juga menjadi tim pengendali pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang bertugas melakukan monitoring dan penanganan pengaduan masyarakat serta melaksanakan evaluasi program penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan pada hakekatnya merupakan kebijakan publik yang berpihak kepada orang miskin (pro poor policy). Oleh karena itu kebijakan tersebut harus diterjemahkan dalam pembangunan yang berpihak kepada kaum miskin (pro poor development) dan pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor growth). Kebijakan dan program kerja dalam penanggulangan kemiskinan pada prinsipnya bersifat lintas sektor, dan kompleks yang diakibatkan oleh kemiskinan tersebut. Maka upaya penanggulangan kemiskinan akan terus diupayakan dan akan menjadi bagian dari pembangunan ini. Salah satu fungsi Kabupaten Kutai Timur dalam pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan adalah mengendalikan pemantauan penanggulangan kemiskinan oleh OPD terkait.

Capaian kinerja penanggulangan kemiskinan dapat diukur dengan melihat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat miskin, pengembangan diversifikasi usaha keluarga miskin, efektivitas program pengembangan ekonomi produktif, perluasan kesempatan kerja bagi warga miskin, serta pola pemanfaatan program pengentasan kemiskinan. Sehingga dapat disusun program strategis dan langkah-langkah pembinaan yang terpadu, berkesinambungan dan bersifat kontekstual.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga telah menyusun beberapa program-program inovasi dan program terapan dari pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.

Untuk membantu pendanaan agar program penanggulangan kemiskinan dapat tercapai, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menggandeng perusahaan



yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Timur sebagai mitra untuk melakukan pendanaan Non APBD. Secara keseluruhan kinerja pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam capaian penggulangan kemiskinan telah berjalan cukup baik dan optimal walaupun masih membutuhkan peningkatan-peningkatan di semua bidang.

5.2. REKOMENDASI

1. Dalam melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah Daerah diharapkan melakukan perbaikan iklim investasi untuk memfasilitasi pembentukan modal, dan peningkatan nilai tambah serta penguatan potensi sektor pertanian dan pariwisata;
2. Agar Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif, melalui perluasan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan ke penduduk miskin, serta peningkatan kapasitas ekonomi produktif melalui program pembukaan akses pasar dan keuangan;
3. Penanggulangan kemiskinan harus menjadi prioritas pembangunan daerah dan harus dilakukan secara sistematis, terfokus, terencana dan terkoordinasi dengan baik dibawah kendali oleh TKPK Kabupaten Kutai Timur;
4. Kebijakan penanggulangan kemiskinan harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu kebijakan publik yang berpihak kepada orang miskin (*pro poor policy*), yang diterjemahkan dalam pembangunan yang berpihak kepada kaum miskin (*pro poor development*) dan pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada orang miskin (*pro poor growth*);
6. Perlunya dilaksanakan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur untuk menurunkan jumlah masyarakat miskin dan peningkatan taraf hidup kesejahteraan masyarakat;
7. Capaian kinerja bidang kesehatan dan pendidikan masih perlu dipacu dan ditingkatkan. Untuk Pendidikan yang perlu dipacu agar masyarakat terutama



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021

anak usia sekolah yang belum bersekolah atau putus sekolah dapat melanjutkan pendidikannya sehingga nantinya mereka menjadi pemutus rantai kemiskinan yang mendera ekonomi keluarga mereka, sedangkan untuk kesehatan adalah penekanan pada kasus kematian bayi dan ibu meninggal pasca melahirkan, karena hal ini menjadi pekerjaan serius bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat; dan

8. Peran TKPK sebagai lembaga yang mengkoordinasikan program-program penanggulangan kemiskinan harus terus ditingkatkan agar semangat penanggulangan kemiskinan juga sejalan dengan optimalisasi tata kelola pemerintahan dan dapat mencapai target penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan.

Kutai Timur, Agustus 2022

WAKIL BUPATI Kutai Timur

Selaku

KETUA TIM KOORDINASI PENGULANGAN KEMISKINAN